

KATA PENGANTAR



Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2017 disusun sebagai pertanggungjawaban sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban. Secara spesifik Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2017 berisi uraian capaian kinerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

Laporan ini menjabarkan hasil kegiatan prasarana dan sarana pertanian yang telah dilaksanakan di Pusat maupun Daerah periode 1 Januari s/d 31 Desember Tahun

2017. Laporan ini disusun berdasarkan pada Program Kerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian serta tugas khusus lainnya.

Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2017, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan referensi untuk meningkatkan keberhasilan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan prasarana dan sarana pertanian pada tahun yang akan datang.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2017 diucapkan terima kasih dan semoga Laporan Tahunan ini dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.



Direktur Jenderal,



Pending Dadih Permana
NIP. 19600508 198603 1 026



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	Error! Bookmark not defined.
BAB I	
PENDAHULUAN	1
BAB II	
ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA	4
2.1. Struktur Organisasi Dan Tata Kerja	4
2.2. Dukungan Sumber Daya Manusia.....	8
BAB III	
PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN TAHUN 2016-2019.....	11
3.1. Rencana strategis 2015-2019	11
3.2. Visi dan Misi	11
3.2.1. Visi.....	11
3.2.2. Misi	11
3.3. Tujuan dan Sasaran	12
3.3.1. Tujuan	12
3.3.2. Sasaran	13
3.4. Program dan Kegiatan	13
BAB IV	
KINERJA PENGELOLAAN ANGGARAN	15
4.1. Keragaan Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	15
4.2. Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	15

4.2.1. Realisasi Anggaran Pusat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.....	16
4.2.2. Realisasi Anggaran Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.....	17
4.2.3. Realisasi Anggaran Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	17

BAB V

KINERJA PEMBANGUNAN PRASARANA & SARANA PERTANIAN

TAHUN 2017	19
5.1. Sasaran dan Capaian Kegiatan Strategis Prasarana dan Sarana Pertanian	19
5.2. Sasaran dan Capaian Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian.....	22
5.2.1. Aspek Perluasan dan Pengendalian Lahan.....	22
5.2.2. Aspek Irigasi Pertanian.....	40
5.2.3. Aspek Pupuk dan Pestisida	54
5.2.4. Aspek Alat dan Mesin Pertanian.....	70
5.2.5. Aspek Pembiayaan Pertanian	76
5.2.6. Aspek Sekretariat Direktorat Jenderal	89

BAB VI

PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT.....

6.1. Permasalahan	98
6.1.1. Kegiatan Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan	98
6.1.2. Kegiatan Direktorat Irigasi Pertanian	102
6.1.3. Kegiatan Direktorat Alat dan Mesin Pertanian	104
6.1.4. Kegiatan Direktorat Pembiayaan Pertanian.....	105
6.1.5. Kegiatan Direktorat Pupuk dan Pestisida	107
6.1.6. Kegiatan Sekretariat Direktorat.....	108
6.2. Tindak Lanjut.....	108
6.2.1. Kegiatan Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan	108
6.2.2. Kegiatan Direktorat Irigasi Pertanian	112
6.2.3. Kegiatan Direktorat Alat dan Mesin Pertanian	114
6.2.4. Kegiatan Direktorat Pembiayaan Pertanian.....	115
6.2.5. Kegiatan Direktorat Pupuk dan Pestisida	117

6.2.6. Kegiatan Sekretariat Direktorat..... 119

BAB V

PENUTUP 119

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Dukungan Sumber Daya Manusia.....	9
Tabel 2.	Distribusi Pegawai Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Berdasarkan Golongan	9
Tabel 3.	Distribusi Pegawai Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Berdasarkan Golongan Ruang.....	10
Tabel 4.	Distribusi Pegawai Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Berdasarkan Sebaran Pejabat Eselon I, II, III dan IV	10
Tabel 5.	<i>Self Blocking</i> per Jenis Anggaran.....	15
Tabel 6.	Rincian Realisasi Per Jenis Alokasi Anggaran	16
Tabel 7.	Rincian Realisasi Anggaran Per Kegiatan.....	16
Tabel 8.	Rincian Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja	17
Tabel 9.	Perjanjian Kinerja (Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja) Ditjen PSP Tahun 2017	19
Tabel 10.	Tabel Indikator Kinerja Utama Serta Target dan Realisasi Tahun 2016-2017	20
Tabel 11.	Realisasi Anggaran Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan per Kewenangan	23
Tabel 12.	Realisasi Anggaran Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan per Kegiatan	24
Tabel 13.	Realisasi Anggaran Per Sub Direktorat	25
Tabel 14.	Peserta Pelatihan Pengoperasian GPS dan GIS	38
Tabel 15.	Pagu Kegiatan Irigasi Pertanian TA. 2017.....	41
Tabel 16.	Realisasi Anggaran Direktorat Irigasi Pertanian TA. 2017.....	42
Tabel 17.	Lokasi dan Komoditas Proyek Pengembangan Sistem Pertanian Terpadu di Daerah Dataran Tinggi	52
Tabel 18.	Realisasi Anggaran Direktorat Pupuk dan Pestisida Lahan per Kewenangan	55
Tabel 19.	Alokasi dan Anggaran Pupuk Bersubsidi.....	57
Tabel 20.	Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan Penyaluran Pupuk Bersubsidi TA. 2017	59
Tabel 21.	Realisasi Pupuk Subsidi Tahun 2012 – 2017	59



Tabel 23. Matrik Capaian Realisasi Fisik Penyediaan Bantuan Alsintan Satker Pusat TA. 2017	71
Tabel 24. Matrik Kontribusi Alsintan Terhadap Pencapaian Surplus Beras Tahun 2011-2015	72
Tabel 25. Matrik Bantuan Alsintan dari APBN Tahun 2012 s.d 2017	75
Tabel 26. Anggaran Fasilitas Pembiayaan Pertanian.....	77
Tabel 27. Realisasi Anggaran Pusat Direktorat Pembiayaan Pertanian.....	77
Tabel 28. Capaian Fasilitas Pembiayaan, Pemberdayaan Kelembagaan, dan Permodalan Petani, serta Peningkatan Perlindungan Terhadap Resiko TA. 2017	78
Tabel 29. Capaian Kegiatan Asuransi Pertanian Tahun 2017	78
Tabel 30. Realisasi Anggaran Asuransi Pertanian (AOTP)	79
Tabel 31. Capaian Kegiatan Asuransi Ternak Sapi Tahun 2016.....	80
Tabel 32. Realisasi Anggaran Asuransi Pertanian (AUTS)	80
Tabel 33. Realisasi Anggaran Unit Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian TA. 2017.....	89
Tabel 34. Hasil Rekonsiliasi Data Kerugian Negara Antara Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.....	90
Tabel 35. Capaian Anggaran Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya	91



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.....	4
Gambar 2.	Grafik Data Series Tren Luas Tanam Padi di Indonesia Tahun 2006-2016	21
Gambar 3.	Grafik Realisasi Luas Tanam Padi 2016-2017	21
Gambar 4.	Realisasi Anggaran Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier..	43
Gambar 5.	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (a). Desa Motomingo Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara; (b). Desa Sekabuk Kecamatan Sadaniang Kabupaten Mempawah	43
Gambar 6.	Matrik Capaian Kegiatan & Target Pengembangan Jaringan Irigasi Periode TA. 2015-2019.	44
Gambar 7.	Realisasi Anggaran Kegiatan Pengembangan Irigasi Perpipa-an/Perpompaan	45
Gambar 8.	Irigasi Perpipa-an Desa Tamnjaya Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi	45
Gambar 9.	Matrik Capaian Kegiatan & Target Pengembangan Perpompaa-n/Perpipaa-n Periode TA. 2015-2019	46
Gambar 10.	Realisasi Anggaran Kegiatan Pengembangan Irigasi Rawa	47
Gambar 11.	Matrik Capaian Kegiatan & Target Pengembangan Irigasi Rawa Periode TA. 2015-2019	47
Gambar 12.	Realisasi Anggaran Kegiatan Pengembangan Konservasi Air dan Antisipasi Perubahan Iklim	48
Gambar 13.	Matrik Capaian Kegiatan & Target Pengembangan Embung/Dam Parit/Long Storage Periode TA. 2015-2019	49
Gambar 14.	Embung di Desa Tanjung Sari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Bogor.....	49
Gambar 15.	Grafik Alokasi Pupuk Bersubsidi	57
Gambar 16.	Distribusi Pupuk Bersubsidi	58
Gambar 17.	Grafik Realisasi Pupuk Subsidi Tahun 2012 – 2017	60
Gambar 18.	Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi Asuransi Usaha Tani Padi di Provinsi Sulawesi Selatan	70

Gambar 20. Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi Asuransi Usaha Tani Padi di Provinsi Sulawesi Selatan	79
Gambar 21. Evaluasi Realisasi Penyaluran KUR 2017.....	84
Gambar 22. Pilot Project Optimalisasi Lahan Responsive Gender melalui pengintegrasian ternak kambing dengan areal tanaman pangan/hortikultura.....	94
Gambar 23. Ternak kelinci dalam kegiatan Pilot Project Optimalisasi Lahan	95
Gambar 24. Lokasi Kegiatan Pengembangan Embung/Dam Parit/ Long Storage.....	97



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Realisasi Anggaran Ditjen PSP
- Lampiran 2. Realisasi Kegiatan Pengembangan Lahan Rawa/Gambut Terpadu
- Lampiran 3. Realisasi Kegiatan Prasertifikasi Lahan Pertanian
- Lampiran 4. Realisasi Kegiatan Penanaman Padi Pasca Cetak Sawah
- Lampiran 5. Realisasi Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier
- Lampiran 6. Realisasi Kegiatan Irigasi Perpipaan/Perpompaan
- Lampiran 7. Realisasi Kegiatan Pengembangan Irigasi Rawa
- Lampiran 8. Realisasi Kegiatan Pengembangan Embung Pertanian
- Lampiran 9. Realisasi Kegiatan Bantuan Alat dan Mesin Pertanian Pusat
- Lampiran 10. Realisasi Kegiatan Bantuan Alat dan Mesin Pertanian TP-Provinsi
- Lampiran 11. Kegiatan Pengembangan Embung/DamParit/Long Storage
- Lampiran 12. Daftar Penerima Manfaat Kegiatan Pengembangan Project Optimasi Lahan Responsive Gender





Pembangunan sektor pertanian dalam lima tahun ke depan (2015-2019) akan mengacu pada Paradigma Pertanian untuk Pembangunan (*Agriculture for Development*) yang memosisikan sektor pertanian sebagai penggerak transformasi pembangunan yang berimbang dan menyeluruh mencakup transformasi demografi, ekonomi, intersektoral, spasial, institusional, dan tatakelola pembangunan. Paradigma tersebut memberikan arah bahwa sektor pertanian mencakup berbagai kepentingan yang tidak saja untuk memenuhi kepentingan penyediaan pangan bagi masyarakat tetapi juga kepentingan yang luas dan multifungsi. Selain sebagai sektor utama yang menjadi tumpuan ketahanan pangan, sektor pertanian memiliki fungsi strategis lainnya termasuk untuk menyelesaikan persoalan-persoalan lingkungan dan sosial (kemiskinan, keadilan dan lain-lain) serta fungsinya sebagai penyedia sarana wisata (agrowisata). Memosisikan sektor pertanian dalam pembangunan nasional merupakan kunci utama keberhasilan dalam mewujudkan Indonesia yang Bermartabat, Mandiri, Maju, Adil dan Makmur

Dalam upaya memperkuat pembangunan pertanian untuk kedaulatan pangan Kementerian Pertanian menyusun dan melaksanakan tujuh Strategi Utama Penguatan Pembangunan Pertanian yaitu:

1. Peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan lahan.
2. Peningkatan infrastruktur dan sarana pertanian.
3. Pengembangan dan perluasan logistik benih/bibit.
4. Penguatan kelembagaan petani.
5. Pengembangan dan penguatan pembiayaan.
6. Pengembangan dan penguatan bioindustri dan bioenergi.
7. Penguatan jaringan pasar produk pertanian.

Permasalahan penting pembangunan pertanian saat ini adalah terjadinya penurunan kondisi prasarana dan sarana pertanian. Penurunan ini terutama menyangkut aspek kuantitas dan kualitas, yang mengakibatkan menurunnya daya dukung terhadap pencapaian produksi pertanian. Kondisi ini menjadi dorongan dan tekad pemerintah untuk lebih serius dalam menangani aspek pengelolaan prasarana dan sarana pertanian.

Program dan kegiatan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian difokuskan untuk mendukung pembangunan empat sub sektor, yaitu tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan. Secara normatif, tugas Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian adalah merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis dibidang pengelolaan lahan, air irigasi, pembiayaan, pupuk dan pestisida serta alat mesin pertanian. Sedangkan fungsinya adalah :

1. Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan perluasan dan perlindungan lahan pertanian, pengembangan dan rehabilitasi irigasi tersier, fasilitasi pembiayaan, serta penyediaan pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian prapanen;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan perluasan dan perlindungan lahan pertanian, pengembangan dan rehabilitasi irigasi tersier, fasilitasi pembiayaan, serta penyediaan pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian prapanen;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyelenggaraan perluasan dan perlindungan lahan pertanian, pengembangan dan rehabilitasi irigasi tersier, fasilitasi pembiayaan, serta penyediaan pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian prapanen;
4. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan perluasan dan perlindungan lahan pertanian, pengembangan dan rehabilitasi irigasi tersier, fasilitasi pembiayaan serta penyediaan pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian prapanen;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan perluasan dan perlindungan lahan pertanian, pengembangan dan rehabilitasi irigasi

tersier, fasilitasi pembiayaan serta penyediaan pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian prapanen;

6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian didukung oleh 6 (enam) Unit Kerja Eselon II, yaitu :

1. Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan
2. Direktorat Irigasi Pertanian
3. Direktorat Alat dan Mesin Pertanian
4. Direktorat Pembiayaan Pertanian
5. Direktorat Pupuk dan Pestisida
6. Sekretariat Direktorat Jenderal

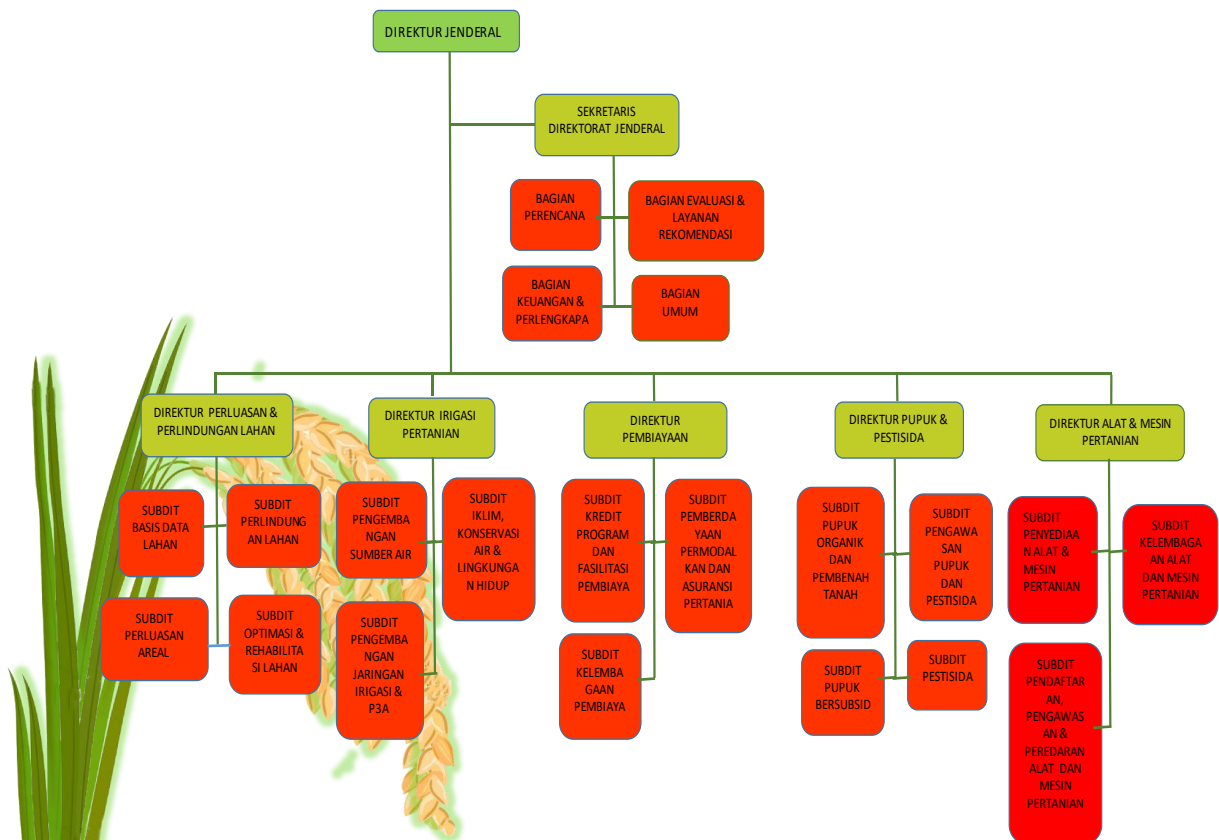
Masing-masing Unit Kerja Direktorat didukung oleh 3 (tiga) sampai 4 (empat) unit eselon III dan 6 (enam) sampai 10 (sepuluh) unit eselon IV. Sedangkan Sekretariat Direktorat Jenderal didukung oleh 4 (empat) unit eselon III dan 12 (dua belas) unit eselon IV.



BAB II ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA

2.1. STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden No. 45 Tahun 2015 dan Permentan No 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian dengan susunan organisasi yang terdiri dari Sekretariat Direktorat Jenderal, 5 Unit Direktorat, 21 Unit Eselon III dan 51 Unit Eselon IV. Secara lengkap struktur Organisasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dari Eselon I sampai Eselon III dapat dilihat pada Gambar 1.



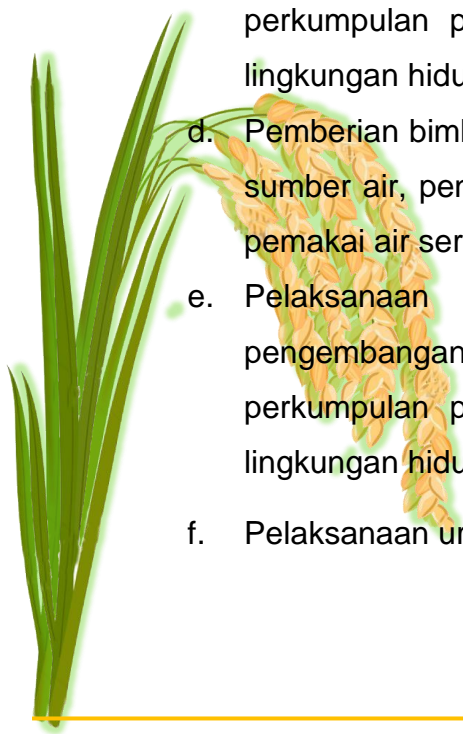
Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian tersebut, maka tugas dan fungsi dari masing-masing unit kerja adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan sarana Pertanian menyelenggarakan fungsi :
 - a. Koordinasi penyusunan rencana dan program, anggaran, serta kerja sama di bidang prasarana dan sarana pertanian;
 - b. Pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan;
 - c. Evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tata laksana, pengelolaan urusan kepegawaian, dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, dan pelaksanaan hubungan masyarakat serta informasi publik;
 - d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan, serta pemberian layanan rekomendasi di bidang prasarana dan sarana pertanian; dan
 - e. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

2. Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perluasan dan perlindungan lahan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang basis data lahan, perluasan areal, optimasi dan rehabilitasi lahan serta perlindungan lahan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang basis data lahan, perluasan areal, optimasi dan rehabilitasi lahan serta perlindungan lahan;
 - c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang basis data lahan, perluasan areal, optimasi dan rehabilitasi lahan serta perlindungan lahan;

- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang basis data lahan, perluasan areal, optimasi dan rehabilitasi lahan serta perlindungan lahan;
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang basis data lahan, perluasan areal, optimasi dan rehabilitasi lahan serta perlindungan lahan; dan
 - f. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan.
3. Direktorat Irigasi Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan dan rehabilitasi irigasi tersier. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Irigasi Pertanian menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan sumber air, pengembangan jaringan irigasi dan perkumpulan petani pemakai air serta iklim, konservasi air dan lingkungan hidup;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sumber air, pengembangan jaringan irigasi dan perkumpulan petani pemakai air serta iklim, konservasi air dan lingkungan hidup;
 - c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan sumber air, pengembangan jaringan irigasi dan perkumpulan petani pemakai air serta iklim, konservasi air dan lingkungan hidup;
 - d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan sumber air, pengembangan jaringan irigasi dan perkumpulan petani pemakai air serta iklim, konservasi air dan lingkungan hidup;
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengembangan sumber air, pengembangan jaringan irigasi dan perkumpulan petani pemakai air serta iklim, konservasi air dan lingkungan hidup; dan
 - f. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Irigasi Pertanian.



4. Direktorat Pembiayaan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi pembiayaan pertanian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Pembiayaan Pertanian menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang kredit program dan fasilitasi pembiayaan, kelembagaan pembiayaan serta pemberdayaan permodalan dan asuransi pertanian;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kredit program dan fasilitasi pembiayaan, kelembagaan pembiayaan serta pemberdayaan permodalan dan asuransi pertanian;
 - c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kredit program dan fasilitasi pembiayaan, kelembagaan pembiayaan serta pemberdayaan permodalan dan asuransi pertanian;
 - d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kredit program dan fasilitasi pembiayaan, kelembagaan pembiayaan serta pemberdayaan permodalan dan asuransi pertanian;
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kredit program dan fasilitasi pembiayaan, kelembagaan pembiayaan serta pemberdayaan permodalan dan asuransi pertanian; dan
 - f. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pembiayaan Pertanian.

5. Direktorat Pupuk dan Pestisida mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan pupuk dan pestisida. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat pupuk dan pestisida menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyediaan pupuk organik dan pembenah tanah, pupuk anorganik, dan pestisida, serta pengawasan pupuk dan pestisida;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan pupuk organik dan pembenah tanah, pupuk anorganik, dan pestisida, serta pengawasan pupuk dan pestisida;

- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyediaan pupuk organik dan pembenah tanah, pupuk anorganik, dan pestisida, serta pengawasan pupuk dan pestisida;
 - d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penyediaan pupuk organik dan pembenah tanah, pupuk anorganik, dan pestisida, serta pengawasan pupuk dan pestisida; dan
 - e. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pupuk dan Pestisida.
6. Direktorat Alat dan Mesin Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan alat dan mesin pertanian prapanen. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Alat dan Mesin Pertanian menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyediaan, pendaftaran, pengawasan dan peredaran serta kelembagaan alat dan mesin pertanian prapanen;
 - b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan, pendaftaran, pengawasan dan peredaran serta kelembagaan alat dan mesin pertanian prapanen;
 - c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyediaan, pendaftaran, pengawasan dan peredaran serta kelembagaan alat dan mesin pertanian prapanen;
 - d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyediaan, pendaftaran, pengawasan dan peredaran serta kelembagaan alat dan mesin pertanian prapanen;
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penyediaan, pendaftaran, pengawasan dan peredaran serta kelembagaan alat dan mesin pertanian prapanen; dan
 - f. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Alat dan Mesin Pertanian.

2.2. DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian mendapatkan dukungan sumber daya manusia sebanyak

361 orang yang tersebar pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan 5 (lima) Direktorat dengan perincian sebagai berikut :

1. Sekretariat Direktorat sebanyak 83 orang,
2. Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan sebanyak 60 orang,
3. Direktorat Irigasi Pertanian sebanyak 65 orang,
4. Direktorat Pembiayaan Pertanian sebanyak 42 orang,
5. Direktorat Pupuk dan Pestisida sebanyak 58 orang,
6. Direktorat Alat dan Mesin Pertanian sebanyak 53 orang.

Dukungan sumber daya manusia dan distribusi pegawai pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian secara rinci dapat dilihat pada tabel 1 – 4.

Tabel 1. Dukungan Sumber Daya Manusia

No	Gol / Ruang	S3	S2	S1	D4	SM	D3	D2	D1	SLTA	SLTP	SD	Jumlah
1	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	II	0	0	0	0	1	6	0	0	28	1	1	37
3	III	0	54	170	0	0	6	0	0	34	0	0	264
4	IV	3	45	5	0	0	0	0	0	0	0	0	53
	Jumlah	3	99	175	0	1	12	0	0	62	1	1	354

Tabel 2. Distribusi Pegawai Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Berdasarkan Golongan

No	Unit Kerja	Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV	Jumlah
1	DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN	0	0	0	1	1
2	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL	0	5	69	10	84
3	DIREKTORAT PERLUASAN DAN PERLINDUNGAN LAHAN	0	8	44	8	60
4	DIREKTORAT IRIGASI PERTANIAN	0	8	43	8	59
5	DIREKTORAT PEMBIAYAAN PERTANIAN	0	6	28	11	42
6	DIREKTORAT PUPUK DAN PESTISIDA	0	5	42	8	55
7	DIREKTORAT ALAT DAN MESIN PERTANIAN	0	8	38	7	53
	Jumlah	0	37	264	53	354

Tabel 3. Distribusi Pegawai Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Berdasarkan Golongan Ruang

No	Golongan	Ruang					Jumlah
		A	B	C	D	E	
1	I	0	0	0	0	0	0
2	II	1	0	8	28	0	37
3	III	38	91	58	77	0	264
4	IV	33	15	0	5	0	53
	Jumlah	72	106	66	110	0	354

Tabel 4. Distribusi Pegawai Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Berdasarkan Sebaran Pejabat Eselon I, II, III dan IV

No.	Pejabat	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Eselon I	1	0	1
2	Eselon II	4	1	5
3	Eselon III	16	3	19
4	Eselon IV	31	22	53
	Jumlah	52	26	78





BAB III

PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN TAHUN 2016-2019

3.1. RENCANA STRATEGIS 2015-2019

Rencana Strategis (Renstra) Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian 2015-2019 disusun dengan mengacu kepada Renstra Kementerian Pertanian 2015-2019. Renstra Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian selama periode 2015-2019 telah mengalami beberapa kali review, seiring dengan perubahan atau revisi anggaran yang terjadi sehingga perlu dilakukan penyempurnaan akibat perubahan kebijakan yang ada.

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tahun 2015–2019 memuat program/kegiatan untuk mendukung 4 (empat) target sukses Kementerian Pertanian. Renstra ini merupakan dokumen perencanaan yang berisikan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, strategi, program dan kegiatan pembangunan prasarana dan sarana pertanian yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian selama periode 2015-2019 sesuai review renstra terakhir, yakni review keempat (Desember 2017).

3.2. VISI DAN MISI

3.2.1. Visi

Visi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian adalah "Terwujudnya Pembangunan Prasarana dan Sarana Pertanian Mendukung Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani".

3.2.2. Misi

Untuk mencapai Visi tersebut Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian mengemban Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan perluasan dan perlindungan lahan pertanian;

2. Mengembangkan pengelolaan air dan irigasi pertanian;
3. Memfasilitasi penyediaan, penyaluran, dan penggunaan pupuk bersubsidi melalui PSO sesuai azas 6 (enam) tepat jenis, jumlah, tempat, waktu, mutu, dan harga serta meningkatkan pengawasan terhadap pupuk dan pestisida beredar;
4. Mewujudkan dan mengembangkan sistem pembiayaan sektor pertanian serta mendorong perlindungan usaha tani melalui pengembangan asuransi pertanian;
5. Menyelenggarakan sistem mekanisasi pertanian di Indonesia.

3.3. TUJUAN DAN SASARAN

3.3.1. Tujuan

Tujuan strategis Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian adalah “Melaksanakan penyediaan dan pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian yang meliputi aspek pengelolaan dan perlindungan lahan, pengelolaan air irigasi, pembiayaan pertanian, pupuk dan pestisida, serta alat dan mesin pertanian”

Tujuan strategis Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tahun 2015 – 2019 dicapai dengan:

1. Tersedianya lahan pertanian dalam mendukung pengembangan komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan;
2. Terwujudnya Pengelolaan air irigasi pertanian dalam mendukung pengembangan komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan;
3. Tersalurnya pupuk bersubsidi sesuai azas 6 (enam) tepat (jenis, jumlah, tempat, waktu, mutu, dan harga) serta lebih teraturnya peredaran pupuk pestisida di lapangan sesuai peraturan yang berlaku;
4. Terfasilitasinya pembiayaan dan perlindungan usaha tani;
5. Terwujudnya sistem mekanisasi pertanian di Indonesia sesuai dengan arah pembangunan pertanian.

3.3.2. Sasaran

Sasaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian adalah : Penambahan Luas Pertanaman seluas 1.933.605 Ha, yang dicapai melalui kegiatan:

1. Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian
2. Peningkatan ketersediaan air untuk sektor pertanian
3. Peningkatan fasilitasi penyaluran pupuk dan pengawasan pestisida
4. Peningkatan fasilitasi pembiayaan, pemberdayaan kelembagaan, dan permodalan pertanian, serta peningkatan perlindungan terhadap resiko
5. Peningkatan pemanfaatan alat dan mesin pertanian
6. Dukungan Manajemen dan Teknis Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian.

3.4. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian adalah Program Pengembangan dan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pertanian dengan indikator kinerja program adalah :

1. Tersedianya kebijakan, norma, standar, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang prasarana dan sarana pertanian;
2. Terlaksananya bimbingan teknis dan pengawasan di bidang prasarana dan sarana pertanian;
3. Tersedianya dan teroptimisasinya pendayagunaan lahan dan air dalam mendukung pengembangan komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan;
4. Berkembangnya sistem pembiayaan usaha pertanian yang fleksibel dan mudah diakses oleh petani serta sistem perlindungan usaha petani dan mitigasi resiko usaha petani melalui Asuransi Pertanian;
5. Tersedianya dan Tersalurkannya pupuk dan pestisida sesuai azas 6 (enam) tepat (jenis, jumlah, tempat, waktu, mutu dan harga);
6. Berkembangnya sistem mekanisasi pertanian di Indonesia melalui kebijakan pengembangan, pemanfaatan, pengawasan dan kelembagaan

alat dan mesin pertanian yang sesuai dengan arah pembangunan pertanian;

7. Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi antar sektor dan lembaga dalam mendorong optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan prasarana dan sarana pertanian untuk mendukung ketahanan pangan nasional;
8. Meningkatnya peran serta masyarakat dan *stakeholder* dalam pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana pertanian secara efektif dan efisien untuk kegiatan pertanian berkelanjutan;
9. Terselenggaranya manajemen dan administrasi pembangunan berdasarkan prinsip profesionalitas, integritas, transparansi dan akuntabilitas.



BAB IV KINERJA PENGELOLAAN ANGGARAN

4.1. KERAGAAN ANGGARAN DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

Dukungan alokasi anggaran pada awal Tahun 2017 melalui dana APBN adalah sebesar Rp.7.091.397.278.000,00, namun dalam perkembangannya mengalami beberapa kali perubahan. Hal ini disebabkan kondisi ekonomi makro Indonesia yang kurang mendukung dimana penurunan harga komoditas ekspor dan melesetnya target penerimaan pajak yang berdampak pada pencapaian pendapatan negara, yang mengakibatkan diberlakukannya kebijakan penghematan anggaran termasuk di sektor pertanian cq. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2017, sehingga anggaran menjadi Rp.6.926.098.850.000,00. Dari pagu tersebut terbagi menjadi 3 (tiga) berdasarkan kewenangannya, yakni Dana Tugas Pembantuan sebesar Rp. 4.358.650.579.000,00; Dana Dekonsentrasi sebesar Rp. 474.336.478.000,00; dan Dana Pusat sebesar Rp. 2.177.693.036.000,00. Rincian pagu Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dapat dilihat pada Tabel 5 berikut.

Tabel 5. *Self Blocking* per Jenis Anggaran

NO.	KEWENANGAN	PAGU AWAL (Rp.)	PAGU REVISI (Rp.)
1	Dekonsentrasi (DK)	390.269.170.000	410.606.239.000
2	Kantor Pusat (KP)	4.536.252.638.000	3.838.796.616.000
3	Tugas Pembantuan (TP)	2.164.875.470.000	2.676.695.995.000
JUMLAH		7.091.397.278.000	6.926.098.850.000

4.2. Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

Realisasi anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2017 sebesar Rp.6.362.277.025.467,00 atau sebesar 91,86% dari target Rp.6.926.098.850.000,00. Rincian realisasi per jenis alokasi anggaran dapat dilihat pada Tabel 6, sedangkan rincian realisasi anggaran per kegiatan pada Tabel 7.

Tabel 6. Rincian Realisasi Per Jenis Alokasi Anggaran

NO.	KEWENANGAN	PAGU AWAL (Rp.)	PAGU REVISI (Rp.)	REALISASI SP2D (Rp.)	PERSENTASE TRHDP PAGU AWAL (%)	PERSENTASE TRHDP PAGU REVISI (%)
1	Dekonsentrasi (DK)	390.269.170.000	410.606.239.000	384.781.233.201	98,59	93,71
2	Kantor Pusat (KP)	4.536.252.638.000	3.838.796.616.000	3.611.845.076.953	79,62	94,09
3	Tugas Pembantuan (TP)	2.164.875.470.000	2.676.695.995.000	2.365.650.715.313	109,27	88,38
JUMLAH		7.091.397.278.000	6.926.098.850.000	6.362.277.025.467	89,72	91,86

Tabel 7. Rincian Realisasi Anggaran Per Kegiatan

NO.	KEGIATAN	PAGU AWAL (Rp.)	PAGU REVISI (Rp.)	REALISASI SP2D (Rp.)	PERSENTASE TRHDP PAGU AWAL (%)	PERSENTASE TRHDP PAGU REVISI (%)
1	Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian	417.048.493.000	352.076.836.000	349.758.580.242	83,87	99,34
2	Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian	1.864.438.149.000	1.788.005.840.000	1.508.319.740.485	80,90	84,36
3	Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian	3.681.432.723.000	3.719.570.697.000	3.623.582.763.882	98,43	97,42
4	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	872.170.763.000	796.463.057.000	623.474.115.843	71,49	78,28
5	Fasilitasi Pupuk dan Pestisida	81.641.800.000	82.028.460.000	76.151.425.874	93,28	92,84
6	Fasilitasi Pembiayaan Pertanian	174.665.350.000	187.953.960.000	180.990.399.141	103,62	96,30
JUMLAH		7.091.397.278.000	6.926.098.850.000	6.362.277.025.467	89,72	91,86

4.2.1. Realisasi Anggaran Pusat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

Dana Pusat sebesar Rp. 3.838.796.616.000,00 digunakan untuk mendukung kegiatan di 6 (enam) Eselon II yaitu Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan, Direktorat Irigasi Pertanian, Direktorat Pembiayaan Pertanian, Direktorat Pupuk dan Pestisida, Direktorat Alat dan Mesin Pertanian dan Sekretariat Direktorat Jenderal. Sampai dengan 31 Desember 2017 realisasi keuangan satker pusat sebesar Rp. 3.611.845.076.953,00 atau sebesar 94,09%. Rincian realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Rincian Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja

NO.	URAIAN	31 DESEMBER 2017 (TA. 2017)			31 DESEMBER 2016 (TA. 2016)
		PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	PERSENTASE (%)	REALISASI (Rp.)
1	Belanja Pegawai	24.318.282.000	23.179.898.791	95,32	24.054.095.468
2	Belanja Barang	3.807.341.645.000	3.582.682.477.417	94,10	2.094.561.709.789
3	Belanja Modal	7.136.689.000	5.982.700.745	83,83	3.559.180.167
JUMLAH		3.838.796.616.000	3.611.845.076.953	94,09	2.122.174.985.424

4.2.2. Realisasi Anggaran Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

Anggaran Dekonsentrasi dikelola oleh satker Ditjen PSP yang berada di tingkat provinsi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian di provinsi. Dari total dana sebesar Rp.410.606.239.000,00 terealisasi sebesar Rp.384.781.233.201,00 (93,71%).

4.2.3. Realisasi Anggaran Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

Total anggaran Tugas Pembantuan yang dikelola oleh Kabupaten/Kota pada Tahun 2016 sebesar Rp.2.676.695.995.000,00 telah terealisasi sebesar Rp.2.365.650.715.313,00 (88,38%)

Jenis kegiatan prasarana dan sarana pertanian yang masuk dalam anggaran Tugas Pembantuan antara lain: Jaringan Irigasi Tersier, Pengembangan Irigasi Rawa, Pengembangan Irigasi

Perpipaan/Perpompaan, Pengembangan Embung/Dam Parit/Long Storage, Perluasan Sawah, Pendampingan Cetak Sawah, Pengembangan Pemanfaatan Lahan Rawa/Gambut Terpadu, Pra Sertifikasi Lahan Pertanian, Pengembangan Lahan Rawa dan Lahan Sub Optimal, Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian, Fasilitas Penyediaan dan Pengawasan Alat dan Mesin Pertanian, Fasilitas Pestisida untuk Pertanian, Pendampingan Penyaluran Pupuk, dan Fasilitas Pembiayaan Pertanian.

Realisasi anggaran per satker dapat dilihat pada Lampiran 1.



BAB V

KINERJA PEMBANGUNAN PRASARANA & SARANA PERTANIAN TAHUN 2017

5.1. SASARAN DAN CAPAIAN KEGIATAN STRATEGIS PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

Pembangunan dan pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian merupakan bagian integral yang memiliki fungsi strategis dan penting dalam mendukung pembangunan pertanian nasional, melalui program penyediaan infrastruktur lahan dan air, penyediaan pembiayaan petani, penyediaan pupuk dan pestisida, serta dukungan alat dan mesin pertanian yang diharapkan dapat memberikan kontribusi dan dampak positif terhadap peningkatan produktifitas dan produksi pertanian serta kesejahteraan petani.

Program pembangunan prasarana dan sarana pertanian Tahun 2016 didukung melalui program kegiatan strategis, antara lain :

1. Perluasan Sawah;
2. Pengembangan Jaringan Irigasi;
3. Penyaluran Pupuk Bersubsidi;
4. Bantuan Alat dan Mesin Pertanian (TR2, TR4, Pompa Air, *Rice Transplanter*);
5. Asuransi Usaha Tani (Asuransi Usaha Tani Padi/AUTP dan Asuransi Usaha Ternak Sapi/AUTS).

Dalam Tahun 2016, ditetapkan bahwa pencapaian sasaran strategis program adalah meningkatnya produktivitas pertanian melalui terlaksananya penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian, untuk mendukung Program Kementerian Pertanian sebagaimana tertuang dalam kontrak perjanjian kinerja yang terukur melalui indikator kinerja antara lain :

1. Jumlah Penambahan Luas Lahan Sawah
2. Jumlah Penambahan Luas Tanam Padi

Tabel 9. Perjanjian Kinerja (Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja) Ditjen PSP Tahun 2017

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
Penambahan Luas Pertanaman	1 Jumlah Penambahan Luas Baku Lahan Sawah	72.033 Ha
	2 Jumlah Penambahan Luas Tanam Padi	37.650 Ha

Sumber Data : PK Ditjen PSP, 2017

Pencapaian sasaran strategis program melalui indikator kinerja penambahan luas baku lahan padi dilakukan dengan cara membandingkan angka realisasi kegiatan perluasan sawah TA. 2017, sedangkan pengukuran indikator kinerja penambahan luas tanam padi dilakukan dengan cara membandingkan angka realisasi jumlah penambahan luas tanam padi Tahun 2017 dengan angka target penambahan luas tanam padi yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja, dengan target sebagaimana tertuang dalam tabel berikut :

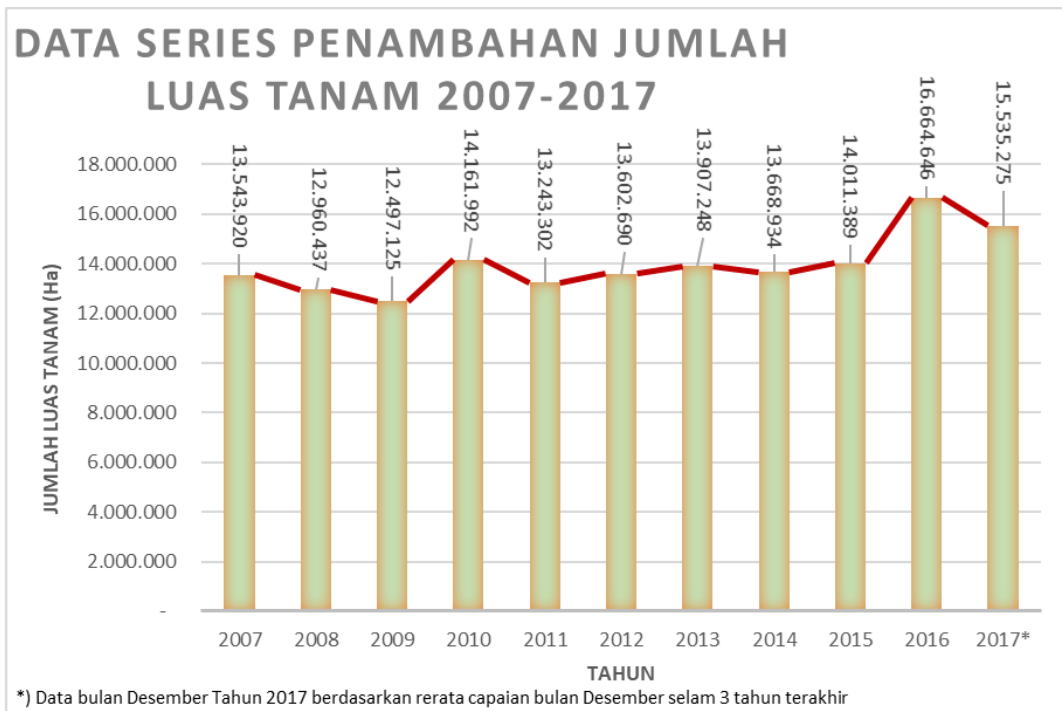
Tabel 10. Tabel Indikator Kinerja Utama Serta Target dan Realisasi Tahun 2016-2017

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2016			TAHUN 2017		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1 Jumlah Penambahan Luas Baku Lahan Sawah	132.155 Ha	129.096 Ha	97,69%	72.033 Ha	60.243,83 Ha	83,63%
2 Jumlah Penambahan Luas Tanam Padi	175.055 Ha	2.487.947 Ha	1421,24%	37.650 Ha	174.806,37 Ha	464,29%

Sumber Data : PK dan Hasil Pengukuran Ditjen PSP, 2017

Dari pengukuran pencapaian sasaran program dengan indikator utama “penambahan luas pertanaman”, capaian jumlah penambahan luas baku lahan padi adalah sebesar 83,63% termasuk dalam katagori “**berhasil**” dengan kenaikan capaian sebesar 9,74 %, sedangkan terhadap indikator utama “penambahan luas tanam padi”, capaian jumlah penambahan luas tanam padi adalah sebesar 464,29 % termasuk dalam katagori “**sangat berhasil**”.





Sumber Data : 1. Data Luas Tanam Th. 2007-2017, Angka Tetap BPS
 2. Data Luas Tanam Th. 2017, Angka BPS per 5 Januari 2018

Gambar 2. Grafik Data Series Tren Luas Tanam Padi di Indonesia Tahun 2006-2016



Sumber Data : 1. Data Luas Tanam Th. 2016, Angka Tetap BPS
 2. Data Luas Tanam Th. 2017, Angka BPS per 5 Januari 2018

Gambar 3. Grafik Realisasi Luas Tanam Padi 2016-2017

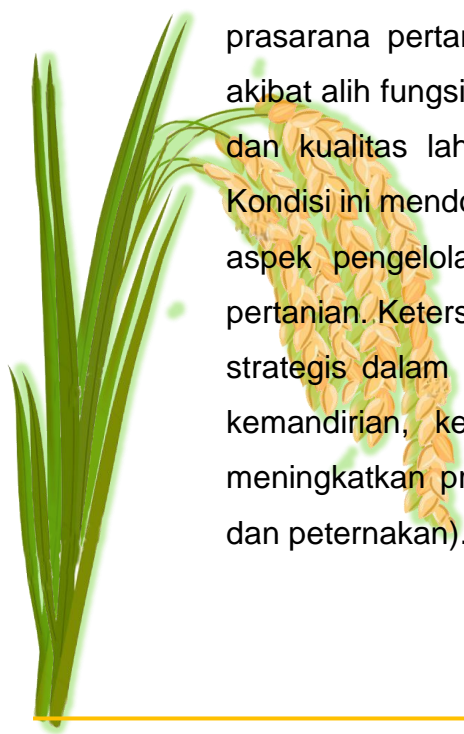
Pencapaian kinerja yang tergolong signifikan ini (**berhasil dan sangat berhasil**), tidak lepas dari adanya terobosan kebijakan di Kementerian Pertanian, khususnya dalam upaya pencapaian program swasembada pangan, antara lain melalui: *refocussing* kegiatan dan anggaran untuk komoditas utama (pengembangan dan rehabilitasi jaringan irigasi, penyediaan alat dan mesin pertanian pra panen, perluasan sawah baru, dll), penerapan *system reward* dan *punishment*, pengawalan dan pendampingan UPSUS (kerjasama dengan TNI), antisipasi dini banjir dan pasca banjir, serta penanganan serangan OPT.

5.2. SASARAN DAN CAPAIAN KEGIATAN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

Selain kegiatan perluasan sawah dan pengembangan jaringan irigasi yang berkontribusi langsung terhadap penambahan luas pertanaman padi mendukung pencapaian swasembada padi, terdapat juga kegiatan prasarana dan sarana pertanian yang dilaksanakan oleh Ditjen PSP mendukung pencapaian swasembada padi, jagung dan kedelai. Capaian kegiatan berdasarkan aspek prasarana dan sarana pertanian adalah sebagai berikut :

5.2.1. Aspek Perluasan dan Pengendalian Lahan

Salah satu permasalahan utama dan penting dalam pembangunan pertanian saat ini adalah terjadinya penurunan kondisi sarana dalam prasarana pertanian, terutama menurunnya jumlah lahan pertanian akibat alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian. Penurunan jumlah dan kualitas lahan menyebabkan menurunnya produksi pertanian. Kondisi ini mendorong pemerintah untuk lebih serius dalam menangani aspek pengelolaan lahan guna mendukung peningkatan produksi pertanian. Ketersediaan lahan merupakan salah satu faktor utama dan strategis dalam pembangunan pertanian dalam rangka mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional, serta meningkatkan produksi pertanian (pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan).



Pelaksanaan Kegiatan Perluasan dan Perlindungan Lahan dalam rangka pembangunan prasarana dan sarana pertanian dilaksanakan oleh Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan dengan sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan untuk Tahun Anggaran 2016 setelah revisi DIPA bulan Desember 2017 mendapat dukungan anggaran sebesar Rp.2.816.231.515.000,00, terdiri dari anggaran pusat sebesar Rp.20.830.827.000,00, dana dekonsentrasi sebesar Rp.218.697.207.000,00, dan dana tugas pembantuan sebesar Rp.2.576.703.481.000,00.

Secara total sampai dengan 31 Desember 2017, realisasi penyerapan anggaran Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan sebesar Rp. 1.521.799.743.145,00 dari target anggaran Rp. 1.801.879.207.000,00 (84,45%). Realisasi anggaran Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan per kewenangan seperti pada tabel 11. Sedangkan realisasi anggaran Direktorat Perluasan dan Pengendalian Lahan per kegiatan seperti pada tabel 12.

Tabel 11. Realisasi Anggaran Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan per Kewenangan

No.	Satker	Pagu	Real. Penyerapan	
			Rp	%
1.	Pusat	23.282.867.000	14.853.341.405	63,79
2.	Dekonsentrasi	96.363.185.000	76.777.402.470	79,67
3.	Tugas Pembantuan	1.682.223.155.000	1.430.166.709.290	85,015
	JUMLAH	1.801.879.207.000	1.521.799.743.145	84,45

Sumber data : Monev Anggaran Kementerian Keuangan, 2017

Tabel 12. Realisasi Anggaran Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan per Kegiatan

KEWENANGAN SATKER	OUTPUT KEGIATAN	PAGU	REALISASI SP2D	SISA ANGGARAN	%
Kantor Pusat (KP)	Layanan Operasional Kegiatan PPL	13.873.367.000	13.477.712.660	395.654.340	97,15
	Konservasi Lahan	9.409.500.000	1.377.918.725	8.031.581.275	14,64
	Total	23.282.867.000	14.855.631.385	8.427.235.615	63,80
Dekonsentrasi (DK)	Design Cetak Sawah	83.319.819.000	64.739.581.129	18.580.237.871	77,70
	Layanan dan Pembinaan Kegiatan Lingkup Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian	13.043.366.000	12.037.821.341	1.005.544.659	92,29
	Total	96.363.185.000	76.777.402.470	19.585.782.530	79,68
Tugas Pembantuan (TP)	Perluasan Sawah	1.407.841.530.000	1.204.659.665.393	203.181.864.607	85,57
	Prasertifikasi Lahan Pertanian	16.080.000.000	11.883.654.800	4.196.345.200	73,90
	Optimasi Lahan	257.423.500.000	213.439.407.004	43.984.092.996	82,91
	Layanan dan Pembinaan Kegiatan Lingkup Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian	888.125.000	183.982.093	704.142.907	20,72
	Total	1.682.233.155.000	1.430.166.709.290	252.066.445.710	85,02

Sumber data : Monev Anggaran, Kementerian Keuangan, 2017

Total anggaran kegiatan Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian sebesar Rp. 1.801.879.207.000,00. Realisasi penyerapan anggaran Perluasan dan Perlindungan Lahan adalah sebesar Rp. 1.521.799.743.145,00 (84,45%). Sesuai dengan pagu yang tertera pada Tabel 12, anggaran pada dana Kantor Pusat (KP) sebesar Rp. 23.282.867.000,00 terdiri dari dua kegiatan/program yaitu Pelaksanaan Konservasi Lahan (FMSRB) dan Layanan Operasional Kegiatan Perluasan dan Perlindungan Lahan. Dimana pelaksanaan Konservasi Lahan (FMSRB) sebenarnya menurut DIPA/POK dan RKAKL hanya sebesar Rp. 2.580.500.000,00. Adapun dana tambahan yang tercantum sebesar Rp. 6.829.000.000,00 merupakan dana Cadangan Project PHLN yang sampai saat ini tidak digunakan, sehingga tidak sesuai dengan pagu yang tercantum didalam SPAN/Monev Anggaran sebesar Rp. 9.409.500.000,00. Oleh karenanya, total anggaran pagu Kantor Pusat sesuai dengan DIPA/POK dan RKAKL adalah sebesar Rp. 16.453.867.000,00.

Dana Pusat Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan sebesar Rp. 16.453.867.000,00 digunakan untuk mendukung kegiatan di 4 (empat) Sub Direktorat, 1 (satu) Subbag Tata Usaha dan kegiatan konservasi lahan PHLN. Dari total anggaran tersebut, telah terealisasi sebesar Rp.14.855.631.385,00 (90,29%). Sisa anggaran pusat yang tidak terserap sejumlah Rp. 1.598.235.615,00 atau (9,71%). Rincian serapan anggaran pusat sebagaimana tabel berikut :

Tabel 13. Realisasi Anggaran Per Sub Direktorat

No.	Uraian	PAGU (Rp)	Realisasi		Sisa Anggaran	
			(Rp)	%	Rp	%
1	Konservasi Lahan (FMSRB)	2.580.500.000	1.377.918.725	53,40	1.202.581.275	46,60
2	Subdit Basis Data Lahan	1.365.500.000	1.356.839.313	99,37	8.660.687	0,63
3	Subdit Perluasan Areal	4.350.667.000	4.071.360.826	93,58	279.306.174	6,42
4	Subdirektorat Optimasi dan Rehabilitasi Lahan	1.500.450.000	1.459.372.552	97,26	41.077.448	2,74
5	Subdirektorat Perlindungan Lahan	1.190.000.000	1.170.726.105	98,38	19.273.895	1,62
6	Sub Bagian Tata Usaha/Layanan Operasional Kegiatan Perluasan dan Perlindungan Lahan	5.466.750.000	5.419.413.864	99,13	47.336.136	0,87
Total		16.453.867.000	14.855.631.385	90,29	1.598.235.615	9,71

Sumber : Ditjen PSP Kementerian Pertanian, 2017

1. Perluasan Sawah

Perluasan Sawah adalah suatu usaha penambahan luasan/baku lahan sawah pada berbagai tipologi lahan dengan kondisi yang belum dan atau lahan terlantar yang dapat diusahakan untuk usahatani sawah. Upaya penambahan baku lahan tanaman pangan melalui perluasan sawah sangat penting dalam upaya mempercepat pencapaian surplus beras dan swasembada beras berkelanjutan. Pada TA. 2017, pembangunan fisik perluasan sawah dilaksanakan dengan pola swakelola dengan instansi pemerintah lainnya yaitu Direktorat Zeni dan Komando Daerah Militer TNI Angkatan Darat.

Sasaran kegiatan ini adalah terelisasinya kegiatan perluasan sawah dengan target awal seluas 72.033 Ha dengan alokasi anggaran konstruksi dan pendukungnya sebesar Rp.1.407.841.530.000,00. *Unit cost* per hektar pekerjaan cetak



sawah sebesar Rp.19.000.000,00 untuk kabupaten di lingkup Propinsi Papua, Papua Barat, Maluku dan Maluku Utara, dan sebesar Rp.16.000.000,00 untuk Kabupaten diluar Propinsi Papua, Papua Barat, Maluku dan Maluku Utara.

Sasaran kegiatan ini adalah terelisasinya kegiatan perluasan sawah dengan target awal seluas 80.000 ha dengan alokasi anggaran konstruksi dan pendukungnya sebesar Rp. 1.518.620.250.000,00. Selanjutnya terjadi beberapa revisi DIPA sehingga alokasi kegiatan perluasan sawah menjadi seluas 72.033 ha dengan total anggaran konstruksi dan kegiatan pendukung sebesar Rp. 1.407.841.530.000,00 terdapat di 27 propinsi pada 161 kabupaten. Pada Tahun Anggaran 2017 kegiatan cetak sawah melalui RDP oleh DPR-RI, pelaksanaan kegiatan sawah ditunda sementara selama kurang lebih 40 hari, hal ini bertujuan untuk pelaksanaan evaluasi kegiatan perluasan sawah TA. 2015 dan TA. 2016. Evaluasi dilakukan di 7 (tujuh) provinsi dengan pelaksana evaluasi dari perguruan tinggi (Unpad), Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) dan Inspektorat Jenderal-Kementerian Pertanian yang hasilnya telah dilaporkan ke DPR. Adapun hasil akhir evaluasi tersebut menyatakan bahwa pada prinsipnya perluasan sawah TA. 2017 dapat dilanjutkan dengan berbagai penyempurnaan terutama perencanaan (SID), dilaksanakan secara bertahap dan berkualitas serta dilaporkan secara periodik.

Hasil RDP DPR-RI antara lain menyatakan bahwa pada prinsipnya perluasan sawah TA. 2017 dapat dilanjutkan dengan berbagai penyempurnaan terutama perencanaan (SID), dilaksanakan secara bertahap dan berkualitas serta dilaporkan secara periodik. Komponen kegiatan perluasan sawah yang dibiayai melalui anggaran tersebut terdiri :

- a. Pelaksanaan Kegiatan Perluasan Sawah
- b. Operasional Kegiatan Perluasan Sawah

- c. Dokumen Lingkungan
- d. Pengawasan Kegiatan Perluasan Sawah
- e. Bantuan saprodi Mendukung Kegiatan Perluasan Sawah.

Tahapan pelaksanaan kegiatan perluasan sawah sebagai berikut:

- a. Penyusunan tim swakelola (tim perencana, pelaksana, pengawas dan Penerima Hasil Pekerjaan).
- b. Menerbitkan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis
Pedoman teknis kegiatan perluasan sawah pola swakelola dijabarkan lebih lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaan yang dibuat oleh Dinas lingkup Pertanian Provinsi dan Petunjuk Teknis yang dibuat oleh Dinas lingkup pertanian yang menangani perluasan sawah di Kabupaten/Kota.
- c. Sosialisasi Kegiatan
Sosialisasi bertujuan agar kelompok tani calon penerima manfaat mengetahui dengan jelas tentang rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.
- d. Penetapan Petani dan Lokasi
Hasil identifikasi calon petani dan calon lokasi yang memenuhi syarat dan kriteria yang telah ditentukan, selanjutnya ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas lingkup pertanian kabupaten/kota.
- e. Pembuatan Kerangka Acuan Kerja (jadwal, RAB, desain/gambar rencana kerja dan atau spesifikasi teknis)
- f. Penyampaian surat penawaran pekerjaan perluasan sawah oleh KPA kepada IPL dilampiri KAK dan dokumen perencanaan.
- g. Penandatanganan naskah kerja sama antara Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan Kepala Pelaksana Swakelola (Direktur Zeni TNI-AD atau Kasdam di masing-masing KODAM)



- h. Penandatanganan kontrak pelaksanaan antara PPK dengan Pelaksana Swakelola
- i. Penyusunan dokumen lingkungan
- j. Koordinasi
Koordinasi dilakukan dengan instansi terkait antara lain instansi lingkup pertanian, Badan Pertanahan Nasional, Dinas Kehutanan, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Pemerintah Daerah serta masyarakat luas untuk memperoleh dukungan dan kemudahan dalam pelaksanaan kegiatan.
- k. Pelaksanaan kegiatan (konstruksi)
Pelaksanaan kegiatan perluasan sawah dilakukan melalui pola swakelola dengan TNI AD. Konstruksi perluasan sawah dilaksanakan pada lokasi-lokasi yang telah ditetapkan CPCL dan telah mempunyai desain atau minimal telah memiliki gambar kerja. Pekerjaan dimulai dari pembersihan lahan (land clearing), perataan (land leveling) dan olah tanah.
- l. Sawah yang telah selesai dicetak harus segera dimanfaatkan atau ditanami dengan komoditas tanaman pangan utamanya padi. Sawah yang telah selesai dicetak dilarang dialihfungsikan untuk fungsi-fungsi yang lain.

Realisasi kegiatan perluasan sawah sampai dengan akhir tahun anggaran 2017 seluas 60.243,83 ha dari target seluas 72.033 Ha (83,63%), capaian ini termasuk kategori “berhasil”. Realisasi anggaran kegiatan perluasan sawah sebesar Rp. 1.206.494.024.550,00 dari total target anggaran sebesar Rp. 1.407.841.530.000,00 (85,70%). Rincian realisasi keuangan dan realisasi fisik kegiatan cetak sawah terlampir.

2. SID Perluasan Sawah

SID Perluasan sawah merupakan rangkaian kegiatan perencanaan perluasan sawah dimulai dari kompilasi usulan, identifikasi Calon Petani dan Calon Lokasi (CP/CL) dan kemudian disempurnakan

melalui kegiatan survei dan investigasi calon lokasi serta pembuatan desain terhadap lokasi yang layak untuk dijadikan sawah baru.

Pada tahun anggaran 2017, target awal kegiatan SI CPCL seluas 164.000 Ha dan Pemetaan Desain seluas 250.000 Ha. Dengan *unit cost* per hektar Rp. 200.000,00 untuk kegiatan SI CPCL. Total pagu anggaran kegiatan SI CPCL dan pemetaan desain beserta pendukungnya sebesar Rp. 83.319.819.000,00 dan tersebar di 28 propinsi.

Pelaksanaan kegiatan SI-CPCL dan Pemetaan Desain dapat dilakukan dengan jasa konsultan, swakelola dengan Instansi Pemerintah Lain (IPL) maupun swakelola dilaksanakan sendiri oleh Penanggung Jawab Anggaran dalam hal ini Dinas Pertanian (swakelola mandiri). Jika pekerjaan swakelola dengan instansi lain atau swakelola mandiri menggunakan tenaga ahli non PNS, maka pengadaannya berpedoman kepada tata cara pengadaan konsultan pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 dan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015.

Tahapan pelaksanaan kegiatan SID perluasan sawah sebagai berikut :

- a. Persiapan
- b. Sosialisasi dan koordinasi
- c. Pengumpulan data primer dan sekunder
- d. Tabulasi dan pengolahan data
- e. Penentuan kelayakan calon lokasi
- f. Survey dan Pengukuran lokasi secara terestris dan pembuatan desain, meliputi pengukuran lapangan, penyediaan peta dasar teknis, pembuatan peta situasi lokasi skala 1 : 1000, Pembuatan peta topografi skala 1 : 1000 dan Pembuatan peta rancangan/desain skala 1 : 1000

- g. Pembuatan daftar petani pemilik/penggarap
- h. Analisis harga satuan dan perhitungan biaya konstruksi perluasan sawah

Pada tahun anggaran 2017, target awal kegiatan SI CPCL seluas 164.000,- Ha dan Pemetaan Desain seluas 164.000 Ha. Dengan unit cost per hektar Rp. 200.000,- untuk kegiatan SI CPCL dan Rp. 300.000,- untuk Pemetaan Desain. Total pagu anggaran kegiatan SI CPCL dan Pemetaan Desain beserta pendukungnya sebesar Rp. 83.319.819.000,- yang tersebar di 28 Provinsi. Dari alokasi tersebut hanya Provinsi Sumatera Utara yang tidak melaksanakan kegiatan SID TA. 2017, sehingga realisasi fisik mencapai 27 dokumen dari target 28 dokumen (92,86%) dan realisasi keuangan Rp. 64.739.581.129 dari pagu Rp. 83.319.819.000,- (77,70%).

3. Pengembangan Pemanfaatan Lahan Rawa/ Gambut Terpadu

Alokasi anggaran Pengembangan Pemanfaatan Lahan Rawa/ Gambut Terpadu yang mendukung pencapaian sasaran strategis Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan Tahun 2017 yaitu tercapainya Jumlah Pengembangan Pemanfaatan Lahan Rawa/Gambut Terpadu seluas 7.000 ha sebesar Rp. 53.500.000.000,00 dengan rincian yaitu pengembangan pemanfaatan lahan rawa/gambut terpadu reguler Rp. 16.000.000.000,00 dan penanganan lahan suboptimal Rp. 37.500.000.000,00. Anggaran tersebut dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan fisik Pengembangan Pemanfaatan Lahan Rawa/Gambut Terpadu melalui Dana Bantuan Pemerintah. Dari total alokasi kegiatan seluas 7.000 ha tersebut, dapat diselesaikan hanya seluas 4.645 ha.

Dari total anggaran kegiatan Pengembangan Lahan Rawa/Gambut Terpadu sebesar Rp. 53.500.000.000,00 tersebut terealisasi Rp.21.688.500,00 atau 40,54%. Kecilnya realisasi keuangan pada kegiatan Pemanfaatan Lahan Rawa Gambut Terpadu dikarenakan



perbedaan besaran satuan anggaran per hektar pada kegiatan tersebut. Untuk 4.000 ha dengan realisasi 3.529 ha pembiayaannya adalah Rp. 4.000.000 per hektar. Sedangkan untuk 3.000 ha tambahan besaran biaya Rp. 12.500.000 per hektar. Pada perjalanan pelaksanaan kegiatan pada tambahan 3.000 ha tersebut realisasi yang dicapai seluas 1.116 ha dengan catatan bahwa 700 ha dengan pembiayaan Rp. 4.000.000 per hektar dan 416 ha dengan pembiayaan Rp. 12.500.000 per hektar. Luas Pengembangan Pemanfaatan Lahan Rawa Terpadu Tahun 2017 mencapai 4.645 ha dari target 7.000 ha (66,36%). Realisasi keuangan dan fisik kegiatan Pengembangan Lahan Rawa/Gambut Terpadu pada Lampiran 2.

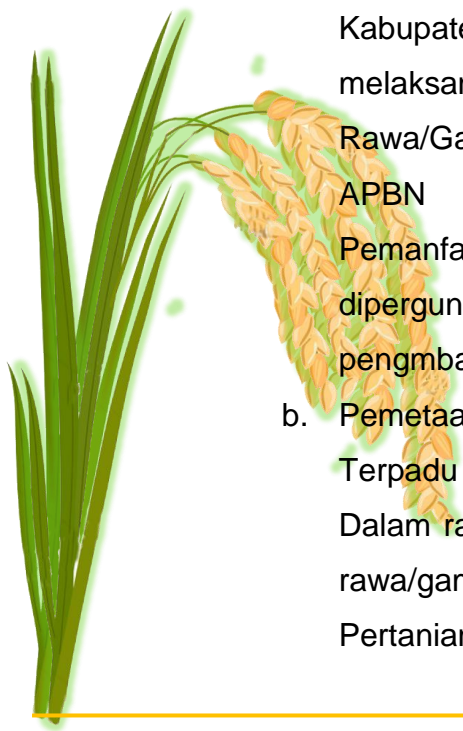
Dalam rangka mendukung tercapainya Kegiatan Pengembangan Pemanfaatan Lahan Rawa/Gambut Terpadu, beberapa kegiatan yang dilaksanakan di pusat antara lain :

a. Pencetakan Pedoman Teknis Pengembangan Pemanfaatan Lahan Rawa/Gambut Terpadu

Pedoman Teknis Pengembangan Pemanfaatan Lahan/Rawa Gambut Terpadu dimaksudkan sebagai acuan bagi petugas Dinas lingkup Pertanian Tanaman Pangan baik Propinsi, Kabupaten/Kota maupun petugas lapangan dalam melaksanakan kegiatan Pengembangan Pemanfaatan Lahan Rawa/Gambut Terpadu yang dananya bersumber dari dana APBN TA. 2017. Pedoman Teknis Pengembangan Pemanfaatan Lahan Rawa/Gambut Terpadu dicetak dipergunakan sebagai dasar baku pelaksanaan kegiatan pengembangan lahan rawa/gambut terpadu di lapangan.

b. Pemetaan Pengembangan Pemanfaatan Lahan Rawa/Gambut Terpadu

Dalam rangka Pemetaan pengembangan pemanfaatan lahan rawa/gambut terpadu telah dilakukan koordinasi dengan Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Pertanian



Kabupaten OKI dan Dinas Pertanian Kabupaten OI untuk pengukuran dan tracking di lapangan dengan menggunakan drone. Hasil pengukuran dan tracking berupa poligon-poligon yang dijadikan dasar untuk pemetaan lahan rawa/gambut yang telah dimanfaatkan secara terpadu untuk budidaya padi di Kabupaten OKI dan OI di Sumatera Selatan.

4. Pra Sertifikasi Lahan Pertanian

Kegiatan pra sertifikasi lahan bertujuan untuk penguatan hal atas tanah juga untuk perlindungan lahan pertanian dengan mencegah terjadinya konversi lahan pertanian ke non pertanian dan upaya penyediaan jaminan dalam mengembangkan modal usahatani. Sesuai dengan Keputusan Bersama antara Menteri Pertanian dengan Kepala BPN RI Nomor 515/Kpts/HK.060/9/2004 dan Nomor 2/SKB/BPN/2004 tentang Pelaksanaan Program Pensertipikatan Tanah Dalam Rangka Pemberdayaan Petani maka kegiatan pra sertifikasi lahan pertanian dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian. Sedangkan kegiatan sertifikasi lahan pertanian dilaksanakan oleh BPN RI.

Kegiatan pra sertifikasi lahan pertanian dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan tahun 2017 yaitu tercapainya jumlah bidang tanah petani yang di pra sertifikasi dengan target 80.000 paket di 26 propinsi pada 163 kabupaten/kota, dengan alokasi anggaran Rp.16.080.000.000,00 dimana Rp.80.000.000,- merupakan luncuran anggaran untuk kegiatan 2016 di Prov NTT. Realisasi kegiatan pra sertifikasi lahan pertanian tahun 2017 sebesar Rp.12.883.654.800,00, atau sebesar 84,64% berdasarkan pagu. Sedangkan realisasi fisik sebanyak 68.052 paket atau 85,06%. Rincian realisasi keuangan dan fisik kegiatan pra sertifikasi lahan pertanian pada Lampiran 3. Capaian kegiatan Pra Sertifikasi Lahan Pertanian ini termasuk kategori “berhasil”.



Kontribusi kegiatan Pra Sertifikasi Lahan Petani yaitu :

- a. Diperolehnya data penetapan calon lokasi dan calon petani (CPCL) serta jumlah persil/bidang yang diperuntukan bagi petani dan/atau pemilik penggarap lahan pertanian rakyat yang akan digunakan untuk perencanaan kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah (SHAT) oleh BPN ditahun mendatang.
- b. Memberikan kepastian kepada petani pemilik penggarap yang telah mengusahakan tanahnya tetapi belum mempunyai hak atas tanah yang tetap (subyek) dan lahan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan di sentra produksi (obyek) atas tanah yang akan disertifikasi secara cepat, tepat, mudah, aman
- c. Mempercepat penyajian dokumen administrasi subyek dan obyek untuk diproses lebih lanjut dalam pembuatan sertifikat tanah oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

5. Penanaman Padi Pasca Cetak Sawah

Kegiatan penanaman padi pasca cetak sawah merupakan suatu kegiatan dalam rangka peningkatan produksi padi pada lahan sawah bukan baru TA. 2015 dan TA. 2016, dengan alokasi kegiatan seluas 135.949 ha melalui bantuan penyediaan sarana produksi dan bantuan penyempurnaan infrastruktur sawah

Alokasi kegiatan Penanaman Padi Pasca Cetak Sawah seluas 135.949 ha yang tersebar di 27 provinsi dan 162 kabupaten. Realisasi realisasi fisik sebesar 125.608 ha atau 92,39% sampai dengan akhir tahun 2017.

Target kegiatan penanaman padi pasca cetak sawah tidak tercapai dikarenakan lebih dari 100.000 ha lahan cetak sawah belum melakukan penanaman perdana dengan menggunakan anggaran saprodi pada tahun sebelumnya, sehingga secara otomatis anggaran saprodi yang tertuang dalam kegiatan penanaman padi pasca cetak sawah baru belum bisa dimanfaatkan secara



maksimal.

Secara terperinci realisasi kegiatan Penanaman Padi Pasca Cetak Sawah TA. 2017 antara lain :

- Adanya revisi DIPA perubahan Volume luasan dan Unit Cost dari Rp.2.000.000 per ha menjadi Rp.1.500.000 per ha
- Sebagian cetak sawah Masih belum ada BASTnya
- Masih ada Saprodi Cetak sawah TA. 2015 dan TA. 2016 yang belum ditanam dan sudah diusulkan untuk penghematan
- Masih ada lahan sawah yang terkena banjir dan mesih perlu penyempurnaan fisik cetak sawahnya.

Untuk pelaksanaan kegiatan penanaman padi pasca cetak sawah dialokasikan anggaran sejumlah Rp. 203.992.500.000 dan telah terealisasi sejumlah Rp. 188.412.305.870 (92,36%). Rincian realisasi keuangan dan fisik kegiatan pra sertifikasi lahan pertanian pada Lampiran 4.

6. RPP Jaminan Perlindungan Lahan Pertanian

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Jaminan Luasan Lahan Pertanian merupakan salah satu Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Bidang Perekonomian yang dipantau oleh Kantor Staf Kepresidenan (KSP). Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk :

- a. Menghindari rataan dan ketimpangan distribusi kepemilikan lahan.
- b. Memberikan jaminan luasan lahan untuk usaha tani
- c. Memberikan kemudahan bagi petani memperoleh tanah negara bebas yang diperuntukkan atau ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian dan lahan terlantar yang potensial sebagai lahan pertanian.

Dengan penetapan RPP ini diharapkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya berkewajiban menetapkan sumber daya lahan pertanian melalui konsolidasi

lahan pertanian (pengendalian alih fungsi lahan pertanian, pemanfaatan lahan pertanian yang terlantar) dan jaminan luasan lahan pertanian.

Pencapaian RPP Jaminan Perlindungan Lahan Pertanian Tahun 2017 yaitu disetujuinya draft PP final oleh Sekretariat Negara dengan surat pengantar No. B-1064/M.Sesneg/D-1/HK.02.02/11/2017 hal Permintaan Paraf pada Naskah Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Jaminan Luasan Lahan Pertanian tertanggal 16 November 2017 untuk Menko Bidang Perekonomian, Menteri Pertanian, Menteri ATR/BPN, dan Menteri Dalam Negeri. Saat ini naskah asli telah diparaf oleh Menteri Pertanian dan sedang diproses untuk diparaf dari Menko Bidang Perekonomian. Sedangkan Menteri ATR/BPN dan Menteri Dalam Negeri akan memberikan paraf pada naskah copy-annya. Dengan penetapan PP ini nantinya diharapkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya berkewajiban menetapkan sumber daya lahan pertanian melalui konsolidasi lahan pertanian (pengendalian alih fungsi lahan pertanian, pemanfaatan lahan pertanian yang terlantar) dan jaminan luasan lahan pertanian.

7. Inventarisasi dan Pemetaan Lahan Pertanian

Kegiatan inventarisasi lahan pertanian dimaksudkan untuk mengumpulkan data lahan pertanian baik sawah maupun non sawah yang bersumber dari instansi terkait di daerah. Data yang telah terkumpul yaitu data luas tanam, data produksi, data luas lahan pertanian yang bersumber dari Badan Pusat Statistik. Data luas lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) yang sudah diperdakan ataupun belum berdasarkan dari RTRW dinas Bappeda. Kegiatan inventarisasi lahan potensial untuk pertanian yaitu untuk mengumpulkan data dan informasi spasial berupa peta potensi pertanian. Dalam pelaksanaan kegiatan ini yaitu mengumpulkan data-data pendukung. Adapun pelaksanaan pemetaan lahan

pertanian difokuskan pada pemetaan perluasan sawah, pemetaan potensi lahan, pemetaan pemanfaatan lahan rawa/gambut, dan pemetaan alih fungsi lahan.

- Pemetaan perluasan sawah

Dalam rangka pemetaan perluasan sawah telah dilakukan koordinasi dengan beberapa Dinas Pertanian Provinsi dan Dinas Pertanian Kabupaten untuk pengumpulan data spasial berupa As Built Drawing Cetak Sawah Tahun 2016. As Built Drawing Cetak Sawah Tahun 2016 merupakan data spasial yang digunakan sebagai dasar pemetaan lahan sawah. Hal - hal yang terdapat di dalam as built drawing :

- i. Peta dalam bentuk polygon (file shp)
- ii. Rencana luas pengerjaan cetak sawah dalam satuan hektar
- iii. Realisasi luas pengerjaan cetak sawah dalam satuan hektar

- Pemetaan potensi lahan

Dalam rangka pemetaan potensi lahan telah dilakukan koordinasi dengan beberapa Dinas Pertanian Provinsi dan Dinas Pertanian Kabupaten untuk pengumpulan data spasial berupa peta desain cetak sawah tahun 2017. Peta desain cetak sawah tersebut merupakan data spasial yang digunakan sebagai dasar untuk pemetaan potensi lahan untuk perluasan sawah.

- Pemetaan pengembangan pemanfaatan lahan rawa/gambut terpadu

Dalam rangka Pemetaan pengembangan pemanfaatan lahan rawa/gambut terpadu telah dilakukan koordinasi dengan Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Pertanian Kabupaten OKI dan Dinas Pertanian Kabupaten OI untuk pengukuran dan tracking di lapangan dengan menggunakan drone. Hasil pengukuran dan tracking berupa poligon-poligon yang dijadikan dasar untuk pemetaan lahan rawa/gambut yang



telah dimanfaatkan secara terpadu untuk budidaya padi di Kabupaten OKI dan OI di Sumatera Selatan.

- **Pemetaan alih fungsi lahan sawah**

Dalam rangka Pemetaan alih fungsi lahan sawah ke non sawah telah dilakukan koordinasi dengan Dinas Pertanian Kabupaten Bandung untuk pengukuran dan tracking alih fungsi lahan sawah ke non sawah di lapangan dengan drone di 4 (empat) kecamatan di Kabupaten Bandung. Hasil pengukuran tersebut berupa polygon-poligon alih fungsi lahan sawah ke non sawah yang dijadikan sebagai dasar pemetaan alih fungsi lahan sawah ke non sawah di Kabupaten Bandung.

8. Pelatihan Pengoperasian GPS dan GIS untuk Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian

Dalam rangka pendayagunaan pengelola laboratorium basis data lahan telah dilaksanakan pelatihan GPS dan GIS di laboratorium basis data lahan, Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan. Peserta pelatihan adalah para petugas dari dinas lingkup pertanian propinsi dan kabupaten/kota, dengan instruktur staf Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan.

Paket Pelatihan kegiatan ini terdiri dari : Paket I (Pengenalan dan Penggunaan Teknologi GPS); Paket II (Pengenalan GIS Tingkat Dasar); Paket III (Aplikasi GPS Mapping Untuk Pemetaan Bidang Pertanian); Paket IV (GIS Lanjutan untuk analisis Lahan Pertanian). Peserta yang mengikuti pelatihan GPS dan GIS di Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan mendapat sertifikat dari Direktur Perluasan dan Perlindungan Lahan.

Kabupaten/Propinsi peserta pelatihan pengoperasian GPS dan GIS untuk pengembangan prasarana dan sarana pertanian dapat dilihat pada tabel 14.



Tabel 14. Peserta Pelatihan Pengoperasian GPS dan GIS

No.	Kabupaten/Provinsi	Tanggal	Jumlah Peserta
PELATIHAN GPS DAN GIS			
1.	Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan	22-24 Februari 2017	2
2.	Dinas TPH Prov Lampung dan Dinas Pertanian Kab Tulang Bawang	22-24 Agustus 2017	6
3.	Dinas Pertanian Prov. Sulawesi Barat, Kades dan Staf di Kab. Polewali Mandar	3-4 Agustus 2017	22
4.	Dinas Pertanian TP Prov Jambi	11-13 Desember 2017	9
PELATIHAN DRONE DAN GIS			
1.	Dinas Pertanian dan Peternakan Kab Seram Bagian Timur, Prov Maluku	30 -31 Maret 2017	5
2.	Dinas Pertanian dan Peternakan Prov. Kalimantan Tengah	31 Juli - 2 Agustus 2017	2
3.	Dinas Pertanian Prov Kepulauan Bangka Belitung	10-12 Agustus 2017	5
4.	Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kab. Sanggau, Prov. Kalimantan Barat	11-13 September 2017	7
REVIEW SID			
1.	26 Dinas Pertanian Provinsi Pelaksana SID Perluasan Sawah 2017	30 Oktober - 2 November 2017	104

9. Konservasi Lahan/*Flood Management in Selected River Basins (FMSRB)*

Kegiatan FMSRB merupakan proyek yang bertujuan untuk meningkatkan kesiapan dalam mengelola dan mengurangi (mitigasi) resiko banjir, serta mengubah paradigma dari kegiatan yang berorientasi proyek pengendalian banjir menjadi pendekatan pengelolaan banjir terpadu. *Flood Management In Selected River*

Basin pada sektor pertanian harus mampu mendukung/meningkatkan produksi pertanian khususnya padi. Dengan fokus pada kegiatan konservasi air dan lahan dalam upaya mengurangi terjadinya degradasi kesuburan lahan dan kekurangan pasokan air.

Mekanisme penganggaran yang dipergunakan dalam pelaksanaan kegiatan pelaksanaan FMSRB merupakan proyek bantuan dari Asian Development Bank (ADB) dengan No. Loan INO-3440 yang ditandatangani pada tanggal 6 November 2016 dan Loan efektif pada tanggal 9 Desember 2016.

Sasaran kegiatan yaitu DAS Cidanau, Ciujung & Cidurian berada di Propinsi Banten, Kab, Lebak, Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang. Keterlibatan Kementan dalam kegiatan Flood Management in Selected River Basins (FMSRB) melalui Loan ADB, tidak hanya dalam dukungan terhadap program rehabilitasi degradasi lahan di hulu DAS Ciujung melalui mitigasi erosi dan sedimentasi, pemanfaatan lahan tidur, peningkatan produktivitas komoditas pertanian khususnya padi, namun juga diarahkan ke kegiatan penanganan hasil pertanian sampai dengan pengemasan produk pertanian yang berorientasi bisnis dipandang relevan untuk ditambahkan menjadi salah satu bagian kegiatan proyek.

Tahapan pelaksanaan kegiatan FMSRB terdiri dari :

- a. Koordinasi dan Sosialisasi Kegiatan FMSRB;
- b. Penyusunan dan Asistensi *Annual Work Plan* (AWP);
- c. Verifikasi dan Identifikasi CPCL;
- d. Pertemuan Koordinasi dan Sosialisasi FMSRB.

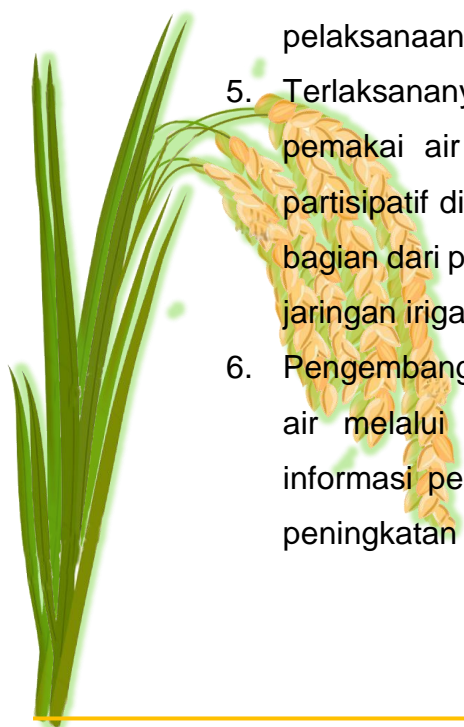
Alokasi anggaran kegiatan FMSRB berdasarkan DIPA/POK dan RKAKL TA. 2017 sebesar Rp. 2.580.500.000,00 sampai dengan akhir tahun telah terealisasi Rp. 1.377.918.725,00 (53,40%). Anggaran FMSRB merupakan Rupiah Murni (RM) dan Rekening Khusus (RK) pada DIPA/POK TA. 2017 sebagai bentuk dukungan teknis untuk kegiatan FMSRB. Adapun anggaran yang tercantum

dalam SPAN/Monev Anggaran sebesar Rp. 9.409.500.000,00 merupakan penggabungan antara anggaran FMSRB yang tercantum dalam DIPA/POK yang telah diuraikan diatas dengan dana cadangan *Project* Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) yang sampai saat ini tidak digunakan sebesar Rp. 6.829.000.000,00.

5.2.2. Aspek Irigasi Pertanian

Dalam upaya pengelolaan air irigasi untuk pertanian, program kerja yang dilaksanakan oleh Direktorat Irigasi Pertanian adalah :

1. Terwujudnya pengembangan sumber air irigasi alternatif dalam skala kecil, baik yang bersumber dari air tanah maupun air permukaan sebanyak 5.411 unit;
2. Terwujudnya optimalisasi pemanfaatan air irigasi melalui kegiatan pengembangan jaringan irigasi seluas 3.312.723 ha;
3. Terwujudnya kegiatan pengembangan irigasi rawa seluas seluas 200.000 ha;
4. Terwujudnya upaya konservasi air dalam rangka pemanfaatan curah hujan efektif dan aliran permukaan untuk tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan sebanyak 4.020 unit serta pelaksanaan penyebaran informasi perubahan iklim dan pelaksanaan *training* adaptasi perubahan iklim di 34 provinsi;
5. Terlaksananya pembinaan dan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air (P3A) untuk mendorong pola pengelolaan irigasi partisipatif di 34 provinsi, serta ter updated nya data P3A sebagai bagian dari proses pembinaan usaha ekonomi dan pengembangan jaringan irigasi di tingkat usaha tani;
6. Pengembangan basis data sistem pengelolaan dan pemanfaatan air melalui inventarisasi, validasi, dan konsolidasi data dan informasi pengelolaan dan pemanfaatan air di 34 provinsi serta peningkatan sarana dan prasarana pengolahan data dan informasi.



Anggaran yang dialokasikan untuk Direktorat Irigasi Pertanian pada TA 2017 sesuai dengan revisi DIPA terakhir sebesar Rp.352.076.836.000,00. Anggaran tersebut terdiri dari Dana Tugas Pembantuan sebesar Rp.344.312.980.000,00; Dana Dekonsentrasi sebesar Rp.3.323.456.000,00; dan Dana Satker Pusat sebesar Rp.4.440.400.000,00. Pagu kegiatan irigasi pertanian TA. 2017 dapat dilihat pada tabel 15 berikut.

Tabel 15. Pagu Kegiatan Irigasi Pertanian TA. 2017

KEGIATAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	PERSENTASE REALISASI (%)
Jaringan Irigasi Tertier	147.225.380.000	147.145.886.000	99,95
Irigasi Air Permukaan	48.264.000.000	47.821.695.500	99,08
Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim	62.804.400.000	61.521.473.237	97,96
Irigasi Rawa	90.459.600.000	90.057.747.000	99,56
Layanan dan Pembinaan Kegiatan Lingkup Kegiatan Irigasi Pertanian	3.323.456.000	3.211.778.505	96,64
TOTAL	352.076.836.000	349.758.580.242	99,34

Dalam anggaran Direktorat Irigasi Pertanian terdapat alokasi dana luncuran dari dana tunda bayar kegiatan tahun 2016, selain kegiatan reguler tahun 2017 sebesar Rp. 107.047.980.000,00 terdiri dari : a) RJIT sebesar Rp. 30.010.380.000,00; b) Pengembangan Irigasi Rawa sebesar Rp. 60.459.600.000,00; c) Pengembangan sumber air/ Perpipaan sebesar Rp. 8.184.000.000,00; dan d) Pengembangan embung/dam parit/long storage sebesar Rp. 8.394.000.000,00; dengan realisasi sampai akhir Bulan Desember 2017 sebesar Rp. 106.920.780.000,00 atau 99,90 %. Dana luncuran tersebut dialokasikan pada Dana Tugas Pembantuan di daerah.

Realisasi penyerapan anggaran Direktorat Irigasi Pertanian sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp. 349.758.580.242,00 atau 99,34% dari target Rp. 352,076,836,000,00. Dari realisasi anggaran tersebut, 97,83% digunakan untuk melaksanakan kegiatan fisik pembangunan kegiatan mendukung irigasi pertanian di daerah melalui

tugas pembantuan. Dengan mekanisme pengelolaan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan fisik di lapangan dilakukan secara Bantuan Pemerintah (banpem), tercapai efisiensi penggunaan anggaran melalui:

1. Tidak adanya unsur pengambilan keuntungan dari anggaran bapem yang diserahkan;
2. Adanya potensi penambahan volume pekerjaan dari volume yang ditargetkan melalui swadaya masyarakat/petani.

Sehingga dapat disimpulkan dari sisi efisiensi anggaran dalam pencapaian sasaran program tahun 2017 dapat dikatakan efisien. Realisasi anggaran Direktorat Irigasi Pertanian secara detail pada Tabel 16.

Tabel 16. Realisasi Anggaran Direktorat Irigasi Pertanian TA. 2017

KEWENANGAN SATKER	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	PERSENTASE REALISASI (%)
DEKONSENTRASI	3.323.456.000	3.211.778.505	96,64
PUSAT	4.440.400.000	4.377.473.237	98,58
TUGAS PEMBANTUAN	344.312.980.000	342.169.328.500	99,38
TOTAL	352.076.836.000	349.758.580.242	99,34

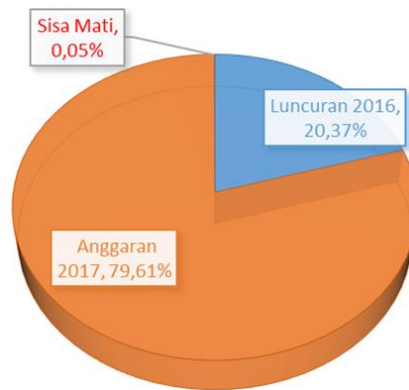
Realisasi penyerapan anggaran Dana Tugas Pembantuan kegiatan irigasi pertanian adalah sebesar Rp. 342.169.328.500,00 atau 99,38% dari pagu anggaran sebesar Rp. 344.312.980.000,00. Adapun realisasi anggaran dari masing-masing kegiatan Direktorat Irigasi Pertanian sebagai berikut

1. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier

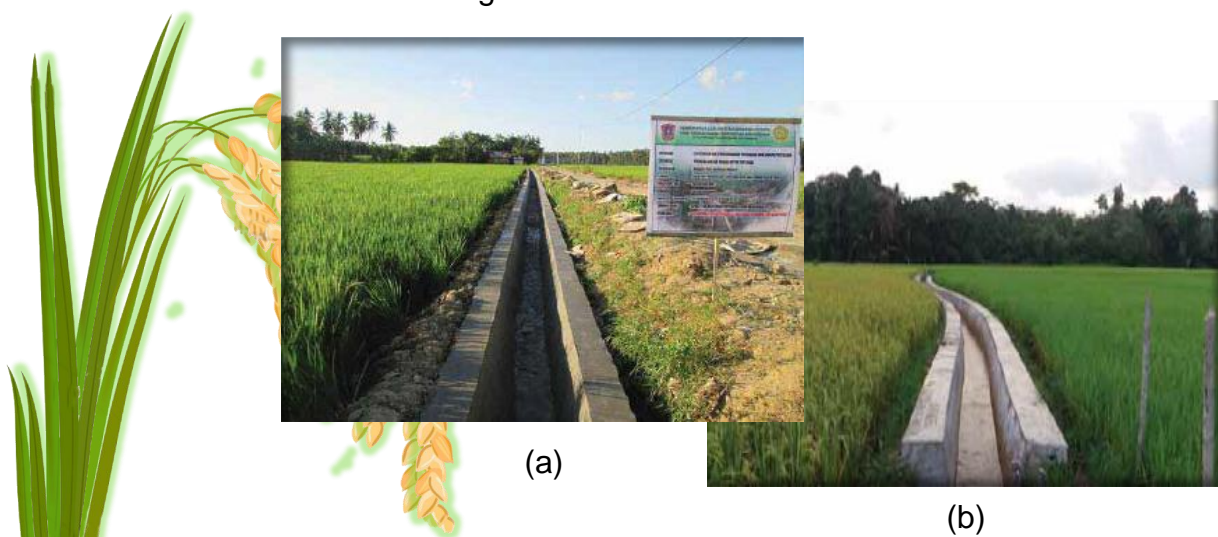
Rehabilitasi Jaringan irigasi Tersier merupakan kegiatan perbaikan/penyempurnaan jaringan irigasi guna mengembalikan/meningkatkan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula sehingga dapat berdampak pada penambahan luas areal tanam dan/atau meningkatkan Intensitas Pertanaman (IP). Pada tahun 2017, jumlah luas areal sawah yang jaringan irigasinya

direhabilitasi atau ditingkatkan fungsinya melalui kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi Tersier di 29 Provinsi dan 203 Kabupaten mencapai sebesar 99.995 ha atau 99,99 % dari target 100.000 ha.

Realisasi anggaran kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier tahun 2017 sebesar Rp. 147.145.886.000 atau 99,95% dari target Rp. 147.225.380.000. Anggaran tersebut terdiri dari anggaran reguler Tahun 2017 (79,61%) seluas 100.000 ha dengan nilai Rp. 117.215.000.000 dan luncuran Tahun 2016 (20,37%) seluas 57.281 Ha dengan nilai Rp. 30.010.380.000. Rincian realisasi per provinsi dapat dilihat pada Lampiran 5.

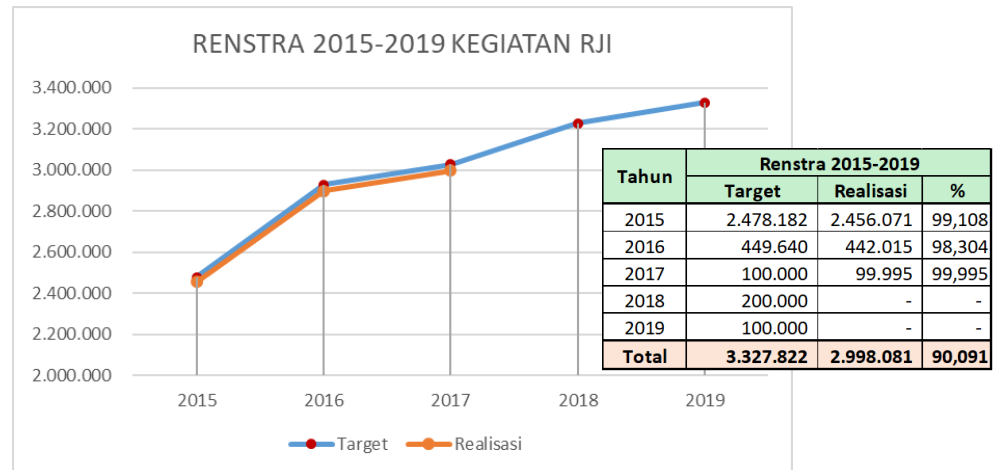


Gambar 4. Realisasi Anggaran Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier



Gambar 5. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (a). Desa Motomingo Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara; (b). Desa Sekabuk Kecamatan Sadaniang Kabupaten Mompowah

Apabila dilihat dari pencapaian target renstra 2015-2019 sebesar 3.327.822 ha, sampai dengan Tahun 2017 telah dilaksanakan seluas 2.998.081 ha atau 90,091%.



Gambar 6. Matrik Capaian Kegiatan & Target Pengembangan Jaringan Irigasi Periode TA. 2015-2019.

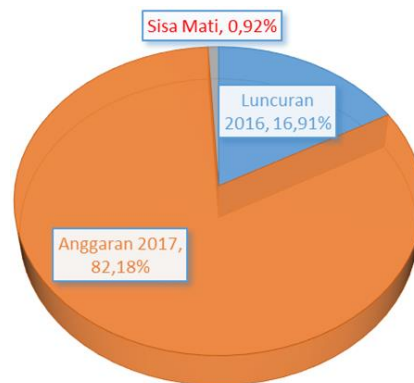
2. Pengembangan Irigasi Perpompaaan/Perpipaan

Kegiatan Pengembangan Irigasi Perpompaaan/Perpipaan merupakan salah satu bentuk upaya pengembangan sumber air irigasi untuk usaha pertanian mendukung sub sektor tanaman pangan. Kegiatan irigasi perpompaaan/perpipaan dimaksudkan untuk meningkatkan intensitas pertanaman (IP) sebesar 0,5 pada lahan sawah serta meningkatkan ketersediaan air sebagai suplesi pada lahan pertanian. Hal ini perlu dilakukan mengingat beragamnya kondisi dan potensi daerah, yang berdampak pada beragamnya perkembangan teknologi irigasi yang berkembang di setiap daerah. Kegiatan irigasi perpompaaan/perpipaan untuk sub sektor tanaman pangan merupakan kegiatan baru yang dialokasikan pada TA. 2017, karena pada tahun-tahun sebelumnya hanya dibatasi untuk mendukung sub sektor hortikultura, perkebunan dan peternakan.



Pada TA. 2017, jumlah bangunan dan peralatan pelengkap nya pemanfaatan sumber air yang dibangun melalui kegiatan Pengembangan Irigasi Perpompaaan/Perpipaan di 32 Provinsi dan 212 Kabupaten yang berhasil dikembangkan adalah sebanyak 496 unit atau 99,20 % dari target 500 unit.

Realisasi anggaran kegiatan Pengembangan Irigasi Perpompaaan/Perpipaan Tahun 2017 sebesar Rp. 47.821.695.000 atau 99,08% dari target Rp. 48.264.000.000. Anggaran tersebut terdiri dari anggaran reguler Tahun 2017 (82,18%) sebanyak 500 unit dengan nilai Rp. 40.000.000.000 dan luncuran Tahun 2016 (16,91%) sebanyak 105 unit dengan nilai Rp. 8.264.000.000. Rincian realisasi per provinsi dapat dilihat pada Lampiran 6.

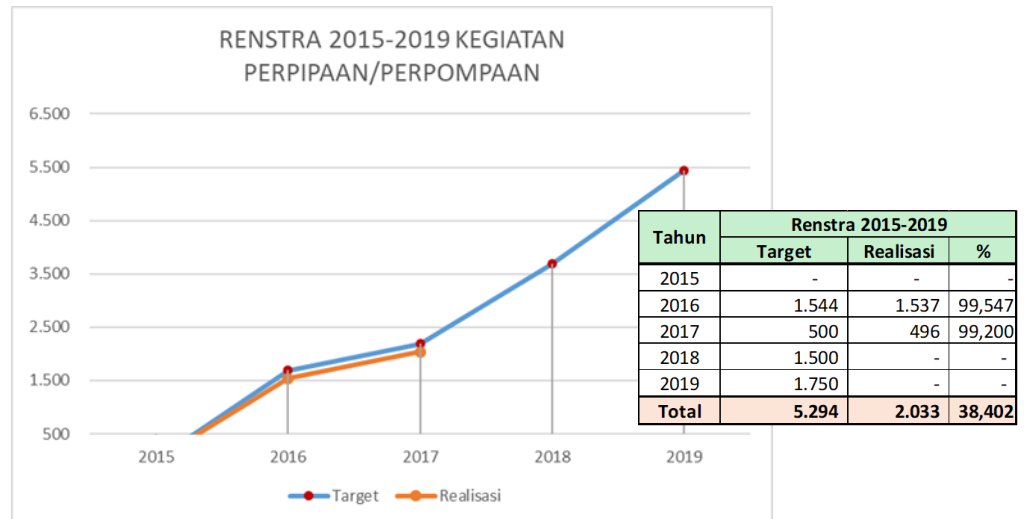


Gambar 7. Realisasi Anggaran Kegiatan Pengembangan Irigasi Perpipaan/Perpompaaan



Gambar 8. Irigasi Perpipaan Desa Tanjaya Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi

Berdasarkan target renstra 2015-2019 kegiatan Pengembangan perpompaan/perpipaan sebesar 5.441 unit, telah dilaksanakan kegiatan Pengembangan Perpompaan/Perpipaan pada tahun 2017 sebanyak 2.033 unit atau baru mencapai 37,36 %.



Gambar 9. Matrik Capaian Kegiatan & Target Pengembangan Perpompaan/Perpipaan Periode TA. 2015-2019

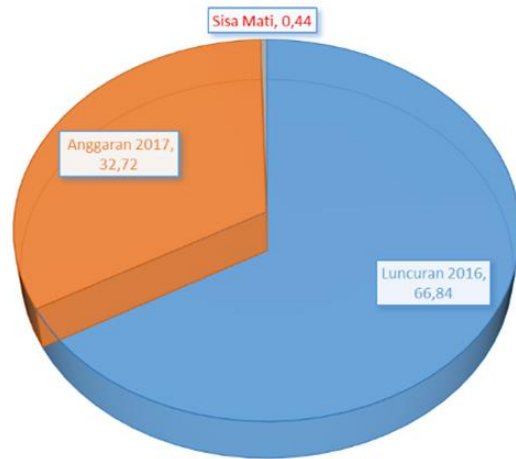
3. Pengembangan Irigasi Rawa

Kegiatan Pengembangan Irigasi Rawa dimaksudkan untuk pembangunan, perbaikan dan penyempurnaan jaringan irigasi tersier/kuarter dan bangunan pelengkap yang mengalami kerusakan, serta sarana pendukung lainnya yang diperlukan guna meningkatkan fungsi dan pelayanan irigasi sehingga lahan rawa dapat dimanfaatkan secara optimal. Kegiatan pengembangan irigasi rawa merupakan kegiatan baru tahun dilaksanakan TA. 2017 seluas 10.000 Ha.

Pada TA. 2017, jumlah luas areal lahan rawa yang jaringan irigasinya dibangun/direhabilitasi melalui kegiatan Pengembangan Irigasi Rawa di 5 Provinsi dan 11 Kabupaten adalah sebesar 9.941 ha atau 99,41 % dari target 10.000 ha.

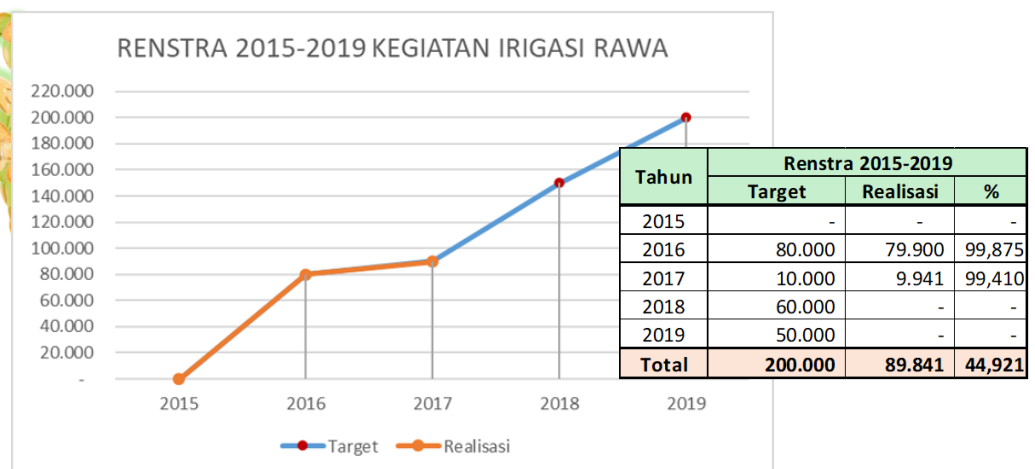
Realisasi Anggaran Kegiatan Pengembangan irigasi rawa adalah sebesar Rp.90.057.747.000 atau 99,56% dari target anggaran Rp.90.459.600.000.





Gambar 10. Realisasi Anggaran Kegiatan Pengembangan Irigasi Rawa

Untuk kegiatan Pengembangan Irigasi Rawa, besarnya anggaran kegiatan tersebut terdiri dari anggaran Tahun 2017 (32,72%) seluas 10.000 ha dengan nilai Rp.30.000.000.000 dan luncuran Tahun 2016 (66,84%) seluas 67.092 ha dengan nilai Rp.60.459.600.000. Kegiatan regular Tahun 2017 sejumlah Rp.30.000.000.000 telah terealisasi sebesar Rp29.823.000.000 (99,41%) sampai akhir Tahun 2017. Kegiatan Pengembangan Irigasi Rawa berdasarkan renstra 2015-2019 sebesar 200.000 ha telah terealisasi sebesar 89.841 ha atau mencapai 44,92% pada akhir tahun 2017. Matrik Capaian Kegiatan & Target Pengembangan Perpompaaan/Perpipaan Periode TA. 2015-2019



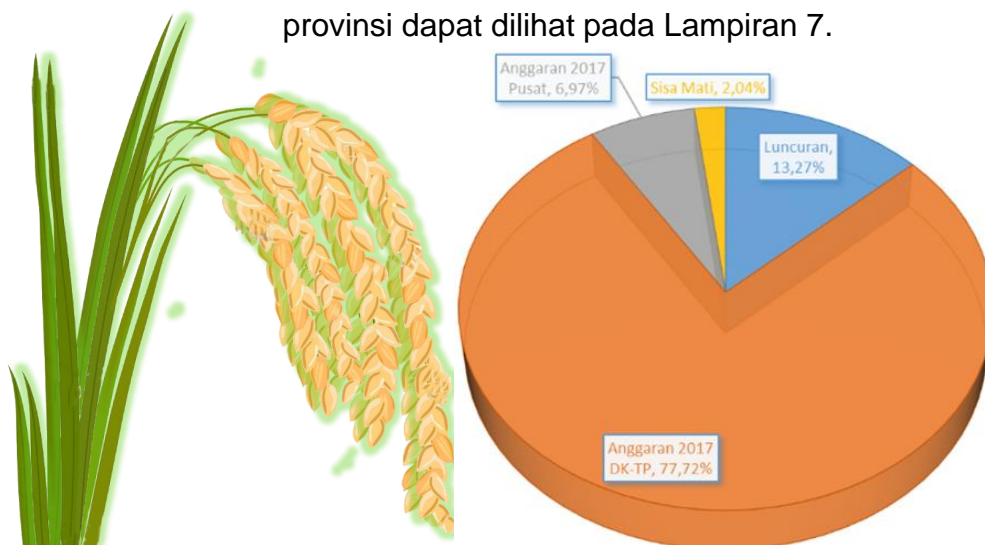
Gambar 11. Matrik Capaian Kegiatan & Target Pengembangan Irigasi Rawa Periode TA. 2015-2019

4. Pengembangan Embung Pertanian

Pengembangan Embung/Dam Parit/ Long Storage bertujuan untuk meningkatkan dan mempertahankan ketersediaan sumber air di tingkat usaha tani sebagai suplesi air irigasi untuk komoditas Tanaman Pangan dan mengurangi resiko terjadinya kegagalan panen akibat kekeringan pada lahan usaha tani di musim kemarau.

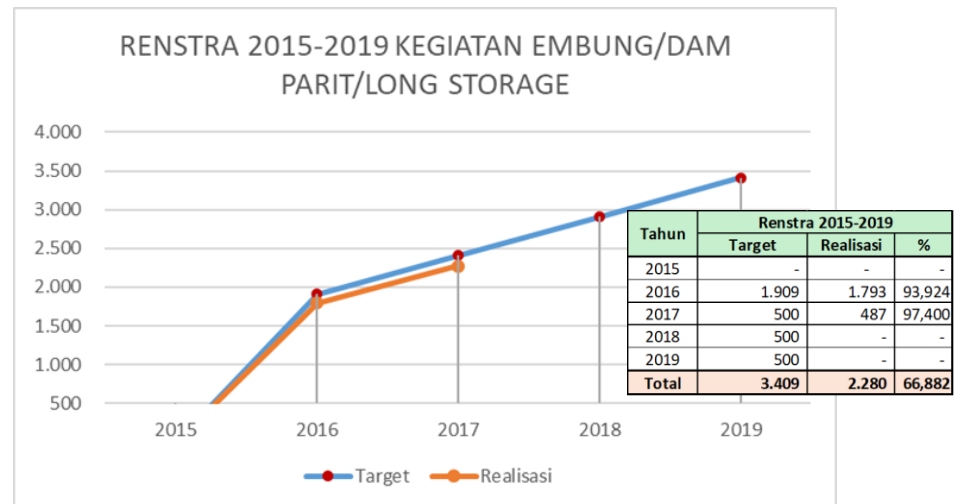
Pada TA 2017, jumlah bangunan fisik konservasi air yang berhasil dibangun dalam rangka antisipasi perubahan iklim melalui kegiatan Pengembangan Embung/Dam Parit/Long Storage di 22 Provinsi dan 147 Kabupaten adalah sebanyak 487 unit atau 97,4% dari target 500 unit.

Realisasi anggaran kegiatan Pengembangan Embung/Dam Parit/Long Storage sebesar Rp61.521.473.237 atau 97,96% dari target Rp62.804.400.000 pada tahun 2017. Anggaran tersebut terdiri dari anggaran reguler Tahun 2017 untuk satker Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (77,72 %) sebanyak 500 unit dengan nilai Rp50.000.000.000 dan anggaran reguler Tahun 2017 untuk satker kantor pusat (6,97%) dengan nilai Rp4.440.400.000 serta luncuran Tahun 2016 (13,27%) sebanyak 180 unit dengan nilai Rp8.364.000.000.. Rincian realisasi per provinsi dapat dilihat pada Lampiran 7.



Gambar 12. Realisasi Anggaran Kegiatan Pengembangan Konservasi Air dan Antisipasi Perubahan Iklim

Berdasarkan Renstra 2015-2019, target kegiatan Pembangunan embung/dam parit/long storage sebesar 3.409 unit, sampai dengan tahun 2017 telah dilaksanakan sebanyak 2.280 unit atau 54,33 % dari target tersebut.



Gambar 13. Matrik Capaian Kegiatan & Target Pengembangan Embung/Dam Parit/Long Storage Periode TA. 2015-2019



Gambar 14. Embung di Desa Tanjung Sari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Bogor

5. Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Proyek Pengembangan Sistem Pertanian Terpadu di Daerah Dataran Tinggi

Sistem Pertanian Terpadu di Daerah Dataran Tinggi terdiri dari beberapa *pilot project* dengan komoditas yang berbeda antara satu lokasi dengan yang lainnya. Komoditas yang dipilih merupakan komoditas unggulan setiap daerah yang akan berkontribusi kepada produktivitas pertanian dan ketahanan pangan nasional.

Kegiatannya mencakup seluruh kegiatan pengembangan pertanian dari hulu hingga ke hilir yaitu mulai dari budidaya, pemanenan, sampai dengan pemrosesan hasil dan pemasaran.

Tujuan dari kegiatan ini ialah guna meningkatkan produktivitas pertanian dan pendapatan petani di daerah dataran tinggi melalui peambangunan dan peningkatan infrastruktur lahan dan air, sistem pertanian modern, dan penanganan pasca panen. Oleh karenanya, nilai kegiatannya yang tergolong besar, maka kegiatannya didesain sebagian besar diperuntukkan bagi pembangunan infrastruktur pertanian serta dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan petani dan masyarakat dalam rangka mendukung produktivitas pertanian dan ketahanan pangan nasional.

Ruang lingkup dan penjabaran komponen kegiatan Pengembangan Sistem Pertanian Terpadu di Daerah Dataran Tinggi terdiri dari :

a) Infrastruktur (Pekerjaan Sipil) yang berfokus pada :

- Pembangunan irigasi di daerah dataran tinggi yang sesuai dengan kondisi lahan dan komoditas yang dikembangkan, dalam kerangka efisiensi penggunaan dan pengelolaan air.
- Konservasi lahan di daerah dataran tinggi.
- Pembangunan jalan pertanian.

b) Alat dan mesin serta sarana produksi meliputi peralatan penyiapan lahan, penanaman, pemanenan, pasca panen, dan pengolahan hasil serta peralatan inseminasi buatan untuk ternak. Sarana produksi meliputi benih/bibit, pupuk, pestisida, serta obat-obatan untuk ternak.

c) Bangunan dan fasilitas penyimpanan guna mempersiapkan mata rantai pengelolaan komoditas, pinjaman akan membiayai pembangunan gudang multi guna untuk mendukung kegiatan pasca panen dan pengolahan hasil, termasuk fasilitas pendingin dan penyimpanan/pergudangan. Untuk sub sektor



peternakan dibiayai pembangunan kandang ternak komunal, rumah potong hewan, dan instalasi penganan limbah.

d) Penguatan kelembagaan terbagi menjadi dua yaitu penguatan kelembagaan/institusi kelompok tani atau gabungan kelompok tani dan penguatan SDM petani.

- Penguatan kelembagaan/institusi berupa: penyuluhan, studi banding, dan pengembangan networking dengan petani/kelompok tani.
- Penguatan SDM petani dapat berupa: pelatihan (budidaya, processing hasil, pelatihan pemasaran, dll) dan kampanye publik.

e) Pembentukan Lembaga Keuangan. Dalam rangka mewujudkan petani yang mandiri dan keberlanjutan proyek pasca pendanaan dari pinjaman IDB, maka salah satu komponen proyek adalah pembentukan lembaga keuangan bagi petani. Pembentukan lembaga keuangan ini termasuk memberikan modal kemitraan yang akan menjadi saham Semua usulan RAB dievaluasi dengan menyetandarkan harga satuan untuk setiap jenis alsintan, pembangunan irigasi, dan pembangunan jalan usaha tani/jalan produksi.

f) Memasukkan konsep Lembaga Keuangan Mikro (LKM) pada semua calon lokasi dengan tujuan memperkuat kelembagaan petani sehingga kegiatan masih dapat berlanjut pada saat proyek pinjaman luar negeri sudah selesai.

Hasil dari evaluasi RAB didapatkan nilai proyek yang baru yaitu sebesar Rp 1,14 triliun atau setara dengan USD 88 juta. Hasil rekapitulasi biaya sesuai dengan lokasi dan jenis komoditas yang akan dikembangkan sebagaimana pada tabel 17 berikut ini:



Tabel 17. Lokasi dan Komoditas Proyek Pengembangan Sistem Pertanian Terpadu di Daerah Dataran Tinggi

No	Provinsi/Kabupaten	Komoditi	Luas (Ha)	Biaya (Rp)
1	Jawa Barat			1.000.000.000 *)
	1.1. Subang	Manggis	1.444	90.914.320.000
	1.2. Tasikmalaya	Padi organik	500	25.945.000.000
	1.3. Cirebon	Mangga Gedong Gincu	535	94.060.620.000
	1.4. Garut	Kentang		44.582.000.000
2	Banten			1.000.000.000 *)
	2.1. Lebak	Durian	450	32.021.750.000
3	Jawa Tengah			1.000.000.000 *)
	3.1. Banjarnegara	Pengembangan Domba		19.960.550.000
	3.2. Purbalingga	Pengembangan Kambing		36.451.500.000
	3.3. Magelang	Padi organik	1.800	50.658.400.000
4	Jawa Timur			1.000.000.000 *)
	4.1. Sumenep	Bawang merah	150	29.342.500.000
	4.2. Malang	Bawang merah	100	21.800.000.000
5	Nusa Tenggara Barat			1.000.000.000 *)
	5.1. Lombok Timur	Bawang putih	1.640	163.410.000.000
	5.2. Sumbawa	Bawang merah	3.000	166.144.000.000
6	Gorontalo			1.000.000.000 *)
	6.1. Gorontalo	Pisang Gape	400	28.035.000.000
7	Sulawesi Utara			1.000.000.000 *)
	7.2. Minahasa Selatan	Kentang	2.000	134.325.000.000
9	Operational PMU			10.000.000.000
	Total Base Cost			954.650.640.000
10	Contingencies (10%)			95.465.064.000
11	Konsultan (PMDSC)			95.555.880.000
TOTAL PROJECT AREA & COST			12019	1.145.671.584.000

Catatan: *) Operasional PPIU

Rekapan diatas merupakan hasil perumusan dari sejumlah usulan beberapa daerah yang dilakukan oleh tim Project Management Unit (PMU) pusat. Kemudian diseleksi untuk kemudian disusun menjadi satu usulan proyek yang kemudian diusulkan kepada IDB sebagai pemberi pinjaman. Dalam proses penseleksian usulan yang masuk dari daerah, PMU melakukan beberapa kegiatan seperti *ground-check* dengan menurunkan tim ke lapangan. Setelah itu hasil dari cek lokasi tadi masih dibahas kembali oleh tim untuk kemudian diputuskan apakah akan diikuti ke dalam kegiatan proyek.

Pada TA. 2017 PMU Proyek Pengembangan Sistem Pertanian Terpadu di Daerah Dataran Tinggi telah melakukan persiapan proyek yaitu membuat proposal proyek yang telah disampaikan secara resmi kepada Bappenas dan calon donor yaitu IDB. Dengan adanya revisi terhadap RAB kegiatan proyek, maka rencana tindak lanjut di TA 2018 adalah:

- a) Menyampaikan proposal yang telah direvisi kepada IDB dengan usulan nilai proyek yang baru yaitu Rp 1,14 Trilyun atau USD 88 juta
- b) Membentuk tim PMU untuk menjalankan fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi, dan administrasi.
- c) Mempersiapkan surat pernyataan dari semua kepala daerah yang lokasinya terlibat di dalam proyek ini.
- d) Mempersiapkan tim dengan meminta bantuan tenaga konsultan dari IDB untuk bersama-sama mendesain Proyek Pengembangan Sistem Pertanian Terpadu di Daerah Dataran Tinggi secara matang.
- e) Mempersiapkan tim dengan cara melakukan verifikasi lapangan agar dapat menjelaskan kepada tim appraisal IDB yang direncanakan akan datang untuk mengevaluasi usulan proyek pada triwulan kedua TA. 2018.
- f) Mempersiapkan segala dokumen yang dibutuhkan dalam rangka menuju penandatanganan loan agreement yang ditargetkan dapat ditandatangani pada akhir TA 2018.
- g) Mempersiapkan pengadaan konsultan apabila sudah mendapatkan persetujuan dari IDB atas proyek Pengembangan Sistem Pertanian Terpadu di Daerah Dataran Tinggi.

6. Dukungan Manajemen Aspek Irigasi Pertanian

Kegiatan Dukungan Manajemen Aspek Irigasi Pertanian merupakan kegiatan yang ditujukan untuk memfasilitasi kegiatan aspek irigasi pertanian baik di pusat maupun daerah. Pemanfaatan

dana ini adalah untuk pembelian ATK, alat pengolah data, pertemuan koordinasi, maupun perjalanan dinas dalam rangka pembinaan, monitoring dan evaluasi. Kontribusi dari kegiatan Dukungan Manajemen Aspek Irigasi Pertanian adalah memperlancar tercapainya tujuan dan sasaran kegiatan aspek irigasi pertanian baik di pusat maupun daerah.

Untuk fasilitasi kegiatan aspek irigasi pertanian telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.13.126.006.000 yang digunakan untuk fasilitasi kegiatan di pusat Rp.9.802.550.000 dan di daerah sebesar Rp. 3.323.456.000. Realisasi keuangan tahun 2017 untuk fasilitasi tersebut sebesar Rp. 11.722.654.600 atau 89,31% dengan rincian realisasi kegiatan di pusat Rp. 8.510.876.095 (86,82%) dan di daerah sebesar Rp. 3.211.77.505 (96.64%).

5.2.3. Aspek Pupuk dan Pestisida

Pengembangan dan penyediaan prasarana dan sarana pertanian pada aspek pupuk dan pestisida adalah :

1. Memfasilitasi penyediaan **pupuk bersubsidi** dan pestisida sesuai azas 6 (enam) tepat (jenis, jumlah, tempat, waktu, mutu dan harga).
2. Meningkatkan pengawasan atas penyediaan, penyimpanan dan penggunaan pupuk dan pestisida.
3. Meningkatkan pelayanan pendaftaran pupuk dan pestisida.
4. Mendorong peran serta masyarakat dan stakeholder terkait dalam penyediaan dan pengawasan pupuk dan pestisida.

Direktorat Pupuk dan Pestisida untuk di awal Tahun Anggaran 2017 mendapatkan dukungan anggaran sebesar Rp. 99.431.680.000, yang terbagi atas dana pusat, dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan untuk kegiatan pendampingan penyaluran pupuk bersubsidi.

Realisasi keuangan kegiatan Direktorat Pupuk dan Pestisida sampai dengan 31 Desember adalah sebesar Rp. 91.397.129.061 (91,92%).

Realisasi anggaran Direktorat Pupuk dan Pestisida per kewenangan dapat dilihat pada tabel 18.

Tabel 18. Realisasi Anggaran Direktorat Pupuk dan Pestisida Lahan per Kewenangan

No.	Satker	Pagu	Real. Penyerapan	
			Rp	%
1.	Pusat	17.403.220.000	15.245.703.187	87,60
2.	Dekonsentrasi	2.217.050.000	2.034.228.931	91,75
3.	Tugas Pembantuan	79.811.410.000	74.117.196.943	92,87
	JUMLAH	99.431.680.000	91.397.129.061	91,92

Sumber data : Monev Anggaran Kementerian Keuangan, 2017

Capaian terhadap Sasaran Strategis pertama yaitu tersalurnya pupuk bersubsidi dengan 6 indikator kinerja tergolong “**berhasil**” mencapai target 100 % dengan persentase capaian indikator kinerja “Jumlah Pupuk Bersubsidi” mencapai 97,07%.

Untuk sasaran strategis kedua yaitu terlaksananya pengawasan pupuk dan pestisida, dari 2 indikator kinerja, hasil pencapaiannya tergolong “**berhasil**” yaitu mencapai 100 %. Sedangkan capaian sasaran strategis ketiga yaitu terfasilitasinya pendaftaran pupuk dan pestisida dengan 2 indikator kinerja, hasil pencapaiannya tergolong “**berhasil**” yaitu tercapai diatas 100%. Secara lengkap dapat dilihat pada matriks sasaran strategis Direktorat Pupuk dan Pestisida berikut.

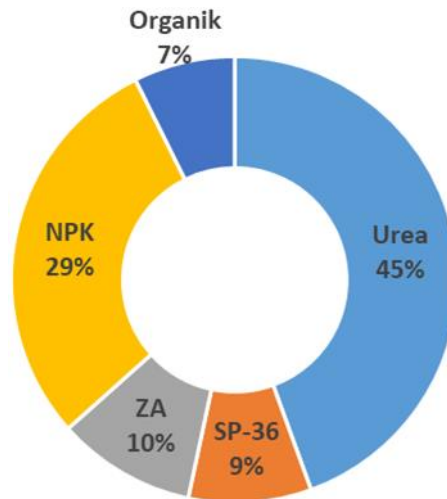


Matrik Capaian Sasaran Strategis terhadap Indikator Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi	% Capaian
Tersalurinya pupuk bersubsidi	1. Jumlah Pupuk Bersubsidi	9.550.000	Ton	9.270.008	97,07
	2. Jumlah terbit Permentan tentang alokasi pupuk bersubsidi tahun 2017 dan 2018	2	Permentan	4	200
	3. Jumlah terbit keputusan tentang HPP pupuk bersubsidi 2017 dan 2018	2	Keputusan	2	100
	4. Jumlah pedoman pendampingan verifikasi dan validasi penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2017	1	Pedoman	1	100
	5. Jumlah petunjuk pelaksanaan Penyediaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi TA.2017	1	Pedoman	1	100
	6. Jumlah pelaksanaan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2017	33	Provinsi	33	100
Terlaksananya pengawasan pupuk dan pestisida	1. Jumlah sampel mutu pupuk dan Pestisida yang beredar	150	Sampel	158	105,33
	2. Terasilitasinya Tim Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Pusat	1	Keputusan	1	100
Terasilitasinya pendaftaran pupuk dan pestisida	1. Jumlah pendaftaran pupuk	300	Ijin	562	187,33
	2. Jumlah pendaftaran pestisida	600	Ijin	1053	175,5

1. Penyaluran Pupuk Bersubsidi

Kegiatan Penyaluran Pupuk Bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan di penyalur resmi di lini IV. Sasaran kegiatan Penyaluran Pupuk Bersubsidi adalah diterapkannya pemupukan berimbang spesifik lokasi di tingkat petani, untuk mendukung peningkatan produktivitas dan produksi serta memperbaiki kualitas hasil komoditas pertanian.



Gambar 15. Grafik Alokasi Pupuk Bersubsidi

Pupuk yang disubsidi adalah Urea, ZA, SP-36, NPK dan pupuk organik yang diproduksi oleh BUMN Pupuk dengan rincian jumlah pupuk berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 69/Permentan/SR.310/12/2016 diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/Permentan/SR.310/3/2017 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 17/Kpts/SR.310/B/11/2017 tanggal 28 November 2017 tentang Perubahan Alokasi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2017 sebagaimana Tabel 19 berikut :

Tabel 19. Alokasi dan Anggaran Pupuk Bersubsidi

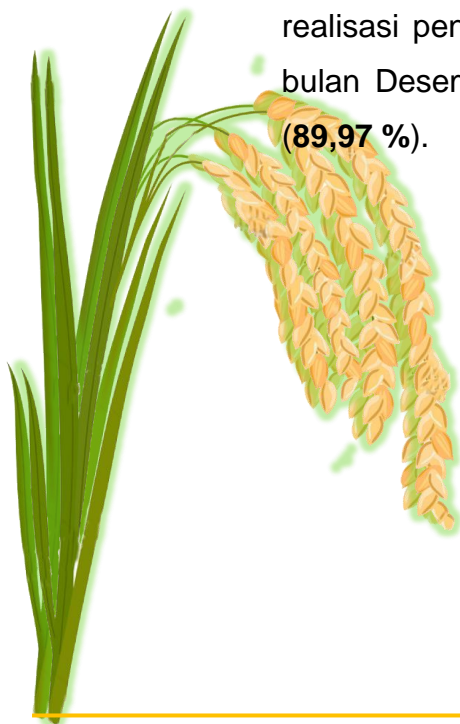
PERMENTAN No.17/Kpts/SR.310/B/11/2017 tanggal 28 November 2017		ANGGARAN sesuai DIPA Nomor SP DIPA- 999.07.1.984149/2017
Jenis Pupuk	Alokasi (Ton)	Pagu (Rp.)
Urea	4.245.000	13.070.918.392.928
SP-36	850.000	2.571.530.500.000
ZA	960.000	1.684.833.600.000
NPK	2.795.000	11.526.797.307.877
Organik	700.000	978.444.152.614
Jumlah	9.550.000	29.832.523.953.419

Capaian penyerapan pupuk subsidi tahun 2017 adalah sebesar **97,07 %** atau tersalurkan sebanyak 9.270.008 ton.



Gambar 16. Distribusi Pupuk Bersubsidi

Alokasi anggaran subsidi pupuk tahun 2017 berdasarkan DIPA Nomor : SP DIPA-999.07.1.984149/2017 ditetapkan sebesar Rp. 30.063.193.551.000 yang mengalami revisi POK dengan rincian terdiri dari kegiatan subsidi pupuk urea sebesar Rp. 13.070.918.392.928; SP-36 sebesar Rp. 2.571.530.500.000; ZA sebesar Rp. 1.684.833.600.000; NPK sebesar Rp. 11.526.797.307.877 dan Organik sebesar Rp. 978.444.152.614. Realisasi keuangan untuk penyaluran pupuk bersubsidi merupakan realisasi penyerapan sementara, sampai dengan tagihan subsidi bulan Desember 2017 yakni mencapai Rp. 26.840.701.056.839. **(89,97 %)**.



Tabel 20. Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan Penyaluran Pupuk Bersubsidi TA. 2017

Kegiatan	Fisik			Keuangan			
	Jenis Pupuk	Alokasi (Ton)	Realisasi (Ton)	%	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
Urea		4.245.000	4.101.379	96,62	13.070.918.392.928	11.865.056.582.218	90,77
SP-36		850.000	843.663	99,25	2.571.530.500.000	2.431.706.766.160	94,56
ZA		960.000	960.450	100,05	1.684.833.600.000	1.656.364.580.548	98,31
NPK		2.795.000	2.677.193	95,79	11.526.797.307.877	9.984.327.789.081	86,62
Organik		700.000	687.323	98,19	978.444.152.614	903.245.338.832	92,31
Jumlah		9.550.000	9.270.008	97,07	29.832.523.953.419	26.840.701.056.839	89,97

Kontribusi kegiatan penyaluran pupuk bersubsidi bagi peningkatan produksi padi adalah jaminan ketersediaan pupuk yang dapat menjaga/meningkatkan produktivitas padi di areal sawah yang mendapatkan pupuk. Setiap tahun, Menteri Pertanian perlu menetapkan Kebutuhan dan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian sebagai respon terhadap perubahan yang terjadi di setiap tahunnya. Data penyaluran pupuk bersubsidi sampai bulan Desember 2017 sebagaimana tabel 21.

Tabel 21. Realisasi Pupuk Subsidi Tahun 2012 – 2017

Jenis Pupuk		Fisik						Keuangan (Rp.000.000.000)					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Urea	Target (Ton)	5.100.000	3.860.101	4.100.000	4.100.000	4.140.472	4.245.000	5.063,30	5.490,42	6.039,87	11.572,33	12.144,46	13.070,92
	Realisasi (Ton)	4.095.548	3.885.658	3.979.765	3.655.477	4.024.716	4.101.379	5.063,30	5.314,12	11.387,59	8.081,25	10.674	11.865,06
	Persentase (%)	80,30	100,66	97,07	89,16	97,20	96,62	100,00	96,79	188,54	69,83	87,89	90,77
SP-36	Target (Ton)	1.000.000	805.396	850.000	850.000	880.000	850.000	1.870,03	2.008,55	2.577,20	3.203,68	3.173,94	2.571,53
	Realisasi (Ton)	855.490	824.055	795.179	798.758	859.766	843.663	1.870,03	2.008,55	2.380,54	2.407,52	2.934,12	2.431,71
	Persentase (%)	85,55	102,32	93,55	93,97	97,70	99,25	100,00	100,00	92,37	75,15	92,44	94,56
ZA	Target (Ton)	1.000.000	1.075.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	960.000	1.160,12	1.412,09	1.402,87	2.213,75	2.264,84	1.684,83
	Realisasi (Ton)	1.000.034	1.070.419	971.824	944.896	1.001.443	960.450	1.160,12	1.412,09	1.397,10	1.559,30	1.986,29	1.656,36
	Persentase (%)	100,00	99,57	92,55	89,99	95,38	100,05	100,00	100,00	99,59	70,44	87,70	98,31
NPK	Target (Ton)	2.598.920	2.131.224	2.550.000	2.550.000	2.700.000	2.795.000	5.147,08	5.965,21	6.899,83	9.832,76	11.380,95	11.526,80
	Realisasi (Ton)	2.136.915	2.277.873	2.372.539	2.404.672	2.643.257	2.677.193	5.147,08	5.965,21	6.575,47	7.506,97	10.409,35	9.984,33
	Persentase (%)	82,38	106,88	93,04	94,30	97,90	95,79	100,00	100,00	95,30	76,35	91,46	86,62
Organik	Target (Ton)	835.000	739.329	1.000.000	1.000.000	779.528	700.000	717,94	951,79	1.087,84	1.433,83	1.099,01	978,44
	Realisasi (Ton)	724.032	800.360	738.763	766.428	668.582	687.323	717,94	951,79	847,53	851,71	849,43	903,25
	Persentase (%)	86,71	108,25	73,88	76,64	85,77	98,19	100,00	100,00	77,91	59,40	77,29	92,31
Jumlah	Target (Ton)	10.528.920	8.611.050	9.550.000	9.550.000	9.550.000	9.550.000	13.958,47	15.828,06	18.007,61	28.256,35	30.063,20	29.832,52
	Realisasi (Ton)	8.812.019	8.858.365	8.858.070	8.570.231	9.197.764	9.270.008	13.958,47	15.651,76	22.588,23	20.406,75	26.853,25	26.840,70
	Persentase	83,69	102,87	92,75	89,74	96,31	97,07	100,00	98,89	125,44	72,22	89,32	89,97



Gambar 17. Grafik Realisasi Pupuk Subsidi Tahun 2012 – 2017

Realisasi fisik penyaluran pupuk bersubsidi sampai dengan posisi tanggal 31 Desember 2017, untuk pupuk Urea, SP-36, ZA, NPK dan Organik dalam kisaran 80-100% atau dalam katagori berhasil. Realisasi keuangan pupuk bersubsidi untuk pupuk Urea, SP-36, ZA, NPK dan Organik dalam kisaran 80-100% atau dalam katagori berhasil.

2. Kegiatan Pendampingan Penyaluran Pupuk Bersubsidi

Kegiatan pendampingan penyaluran pupuk bersubsidi tingkat provinsi melalui dana dekonsentrasi dilaksanakan di 33 Propinsi dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.217.050.000 dan telah terealisasi hingga bulan Desember sebesar Rp. 2.034.228.931 (91,75%).

Kegiatan pendampingan penyaluran pupuk bersubsidi tingkat kabupaten melalui dana tugas pembantuan dilaksanakan di 33 Propinsi dengan pagu anggaran sebesar Rp. 79.811.410.000, dan telah terealisasi hingga akhir bulan Desember sebesar Rp. 74.117.196.943 (92,87%).

3. Kegiatan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida

Pada Tahun 2017, telah dilaksanakan beberapa kegiatan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) antara lain pembinaan KP3 Pusat ke Propinsi/Stakeholder. Pengawasan bersama yang dilakukan Tim KP3 Pusat dan penugasan sebagai saksi ahli kasus pupuk dan pestisida. Melalui kegiatan KP3 Pusat diharapkan kinerja KP3 dapat lebih optimal, sehingga pupuk dan pestisida yang beredar lebih terjamin mutu dan kualitasnya.

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan oleh KP3 Pusat antara lain:

- Pembinaan KP3 Pusat ke Propinsi/Stakeholder

Beberapa Propinsi yang menyediakan anggaran untuk KP3 telah menyelenggarakan pertemuan/rapat koordinasi tingkat Propinsi dengan mengundang KP3 Kabupaten. KP3 Pusat diundang untuk memberikan pembinaan terkait kebijakan dalam pengawasan pupuk dan pestisida. Kegiatan telah dilaksanakan di Propinsi Jawa Barat, Riau, Bangka Belitung, Kalimantan Tengah, Jambi dan Crop Life Indonesia.

- Pengawasan Bersama Tim KP3 Pusat

Kegiatan pengawasan bersama dilaksanakan bersama dengan PPVTPP. Kegiatan berupa pengawasan terkait dengan kemasan pupuk, pengawasan mutu pestisida dan pengawasan pestisida ilegal. Lokasi kegiatan antara lain di Propinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, Bengkulu, Jambi, Bangka Belitung, DI. Yogyakarta, Riau.

- Penugasan Sebagai Saksi Ahli Kasus Pupuk dan Pestisida

Kegiatan sebagai saksi ahli kasus pupuk dan pestisida bekerjasama dengan pihak kepolisian. Pada Tahun 2017, bekerjasama dengan Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, Badan Reserse Kriminal POLRI Sukoharjo dan Kepolisian Negara RI Bangka Belitung.



4. Fasilitasi Pelayanan Pendaftaran Pupuk dan Pembenh Tanah

Kegiatan pelayanan pendaftaran pupuk dan pembenh tanah ditujukan untuk memberikan jaminan bahwa pupuk dan pembenh tanah yang beredar di pasaran mengandung kadar unsur hara yang sesuai dengan persyaratan teknis minimal mutu yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian dan terbukti keefektifannya sehingga upaya perbaikan kualitas dan peningkatan produktivitas lahan dapat tercapai, tidak mengganggu kelestarian lingkungan hidup dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dalam pelayanan pendaftaran pupuk dan pembenh tanah antara lain adalah memproses permohonan pendaftaran pupuk dan pembenh tanah, melakukan supervisi ke lembaga uji mutu dan uji efektivitas, evaluasi teknis pendaftaran pupuk dan pembenh tanah serta menyusun revisi Peraturan Menteri Pertanian mengenai Pendaftaran Pupuk Nomor 43 dan 70 tahun 2011.

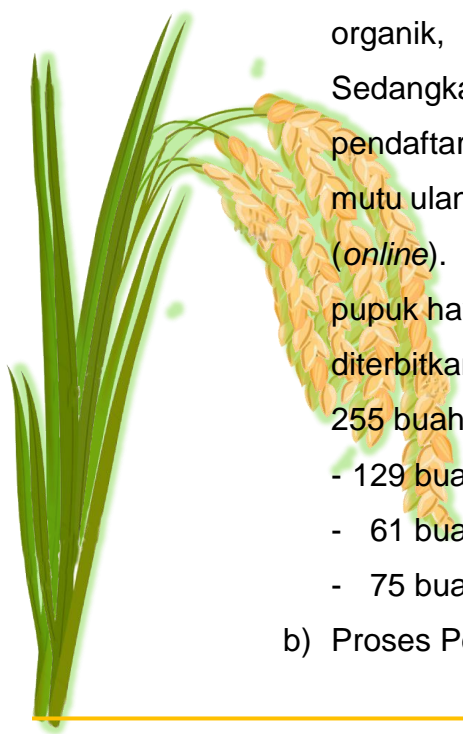
Adapun capaian kegiatan perencanaan pelaksanaan monev kegiatan pupuk dan pembenh tanah adalah sebagai berikut :

a) Proses Permohonan Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenh Tanah

Selama tahun 2017 telah masuk surat manual untuk pupuk organik, hayati dan pembenh tanah sebanyak 36 surat. Sedangkan surat yang telah dikeluarkan dalam rangka pendaftaran pupuk yang terdiri dari surat pengantar uji mutu, uji mutu ulang, uji efektivitas dan penolakan uji mutu sebanyak 390 (*online*). Dari proses pelayanan pendaftaran pupuk organik, pupuk hayati dan pembenh tanah sepanjang tahun 2017 telah diterbitkan Surat Keputusan (SK) Nomor Pendaftaran sebanyak 255 buah, dengan perincian sebagai berikut :

- 129 buah SK nomor pendaftaran pupuk organik
- 61 buah SK nomor pendaftaran pupuk hayati
- 75 buah SK nomor pendaftaran pembenh tanah

b) Proses Permohonan Pendaftaran Pupuk An-Organik



Selama tahun 2017 telah masuk surat manual untuk pupuk anorganik sebanyak 37 surat. Sedangkan surat yang telah dikeluarkan dalam rangka pendaftaran pupuk yang terdiri dari surat pengantar uji mutu, uji mutu ulang dan uji efektivitas sebanyak 992 (*online*), surat pesanan khusus sebanyak 659 (*online*). Dari proses pelayanan pendaftaran pupuk anorganik sepanjang tahun 2017 telah diterbitkan Surat Keputusan (SK) Dirjen PSP secara online (pendaftaran baru, pendaftaran ulang genap dan ganjil, persetujuan perubahan nama dagang, pengalihan pemegang nomor pendaftaran, penambahan distributor dan produsen, penambahan kemasan serta perubahan warna formula) sebanyak 658 buah.

- c) Pada tahun 2017 telah dilakukan sebanyak 12 kali pertemuan pembahasan revisi Permentan Nomor: 43/Permentan/SR.140/08/2011 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik dan Permentan Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenh Tanah. Sampai posisi akhir Desember 2017, Permentan Nomor: 43/Permentan/SR.140/08/2011 telah selesai direvisi menjadi Permentan Nomor 36/Permentan/SR/10/2017 tentang Pendaftaran Pupuk An-Organik dan akan disosialisasikan di awal tahun 2018. Sedangkan Revisi Permentan Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenh Tanah dalam tahap Finalisasi dengan masih diperlukannya pembahasan dengan Biro Hukum Setjen Kementerian Pertanian, Bagian Pengawasan Pupuk serta Instansi lain yang terkait.

Realisasi keuangan kegiatan perencanaan dan pelaksanaan monev kegiatan pupuk dan pembenh tanah untuk kegiatan Fasilitasi pelayanan pendaftaran dan dukungan kegiatan pupuk



dan pembenah tanah adalah sebesar Rp. 1.252.236.756 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.266.195.000 (98,89%).

5. Fasilitasi Pengembangan Rumah Kompos di Kementan

Penggunaan pupuk anorganik di tingkat petani dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan, namun didalam pengaplikasiannya di tingkat lapang semakin tidak efisien/tidak sesuai dengan dosis pemupukan spesifik lokasi yang direkomendasikan. Guna mendukung peningkatan produktivitas dan kualitas hasil pertanian serta mengatasi ketergantungan petani terhadap penggunaan pupuk anorganik, maka perlu digalakkan penggunaan pupuk organik terutama pada lahan pertanian tanaman pangan.

Kebutuhan akan pupuk organik relatif tinggi untuk setiap hektarnya, sehingga untuk mendorong pengembangan penggunaan pupuk organik perlu adanya fasilitasi dari Pemerintah dalam upaya pemanfaatan bahan organik yang ada di lapangan yaitu bahan organik yang berasal dari sisa tanaman (jerami) atau sampah organik dari rumah tangga.

Agar pengolahan sisa-sisa bahan organik tersebut dapat berlangsung dengan cepat dan tepat, maka dibutuhkan peralatan untuk mengolah pupuk organik. Oleh sebab itu, Pemerintah melalui pendanaan APBN tahun 2010 telah membangun rumah kompos yang dilengkapi Alat Pembuat Pupuk Organik (APPO) dan kendaraan roda 3 di Kementerian Pertanian.

Pupuk Organik yang dihasilkan Rumah Kompos di Kementerian Pertanian selama tahun 2017, adalah sebanyak 24.196 Kg, dengan rincian sebagai berikut :

- Pupuk organik yang dimanfaatkan (Kementerian Pertanian) : 3.540 Kg
- Pupuk organik yang dijual : 21.591 Kg
- Sisa stok tahun 2017 : 1.448,5 Kg



Perlengkapan penunjang rumah kompos terealisasi Rp. 1.999.000 (99,95%) dari target Rp 2.000.000. Dana tersebut selain digunakan untuk bahan operasional harian seperti pembelian sekop dan pacul juga digunakan untuk pembelian bahan material untuk renovasi bak fermentasi seperti kayu, semen, paku, terpal, dll. Dekomposer yang digunakan adalah EM,DEC sedangkan bahan bakar berupa bensin untuk alat pengayak dan solar untuk alat pencacah. Pembelian oli digunakan untuk merawat mesin alat-alat yang ada di rumah kompos tersebut. Pembelian kantong kemasan ukuran 50 Kg sudah terealisasi 100%.

Selama tahun 2017 juga dilakukan penarikan dana dari keuntungan penjualan karena tidak adanya dana khusus di dalam anggaran kegiatan fasilitasi pengembangan rumah kompos di kementan yaitu untuk renovasi rumah kompos sebesar Rp 12.800.000.

6. Kajian Revisi Peraturan Menteri Pertanian

Terkait dengan perbaikan pengelolaan pestisida memandang perlu untuk dilakukan revisi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pendaftaran Pestisida, telah dilakukan pertemuan dengan Tim Teknis Komisi Pesisida dan Komisi Pestisida terkait dengan revisi tersebut. Beberapa hal yang perlu dilakukan terkait revisi tersebut adalah :

- i. Pasal 1 Ketentuan umum
Khususnya penambahan definisi untuk impurities
- ii. Pasal 6
Khusus ayat (2) kriteria pestisida dilarang
- iii. Pasal 10
Tentang sertifikat
- iv. Pasal 13
Khusus izin tetap bahan teknis
- v. Pasal 17
Persyaratan teknis untuk Permohonan Pendaftaran izin Percobaan

- vi. Pasal 23
Persyaratan teknis pendaftaran pestisida dan persyaratan 1 bahan aktif dapat didaftarkan paling banyak untuk 3 formulasi atas nama 1 pemohon
- vii. Pasal 24
Penamaan formulasi
- viii. Pasal 29
Contoh pestisida terkait dengan uji mutu
- ix. Pasal 43
Pengalihan pemegang nomor pendaftaran
- x. Pasal 44
Perubahan pestisida

7. Fasilitasi dan Evaluasi Dokumen Pendaftaran Pestisida

Pendaftaran pestisida merupakan salah satu bagian dari pengelolaan pestisida yang bertujuan untuk mendapatkan nomor pendaftaran dan izin pestisida melalui proses evaluasi atau kajian ilmiah yang didasarkan pada efektivitas dan keamanan lingkungan. Karena sifat pestisida yang berpotensi dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan keanekaragaman hayati, menyebabkan resistensi, resurgensi, timbulnya hama baru serta gangguan kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya, pestisida harus dikelola dengan penuh kehati-hatian. Untuk itu, pendaftaran pestisida merupakan kegiatan penting dalam pengelolaan pestisida.

Pendaftaran pestisida untuk mendapatkan nomor pendaftaran dan izin pestisida dilakukan melalui beberapa tahap yang meliputi :

- a) Pemeriksaan Dokumen Izin Percobaan dan Izin Tetap
 - Penyerahan dokumen persyaratan administrasi, teknis dan lainnya.
 - Pemeriksaan, penilaian dan evaluasi dokumen oleh Tim Teknis Evaluasi Pendaftaran Pestisida.

- Evaluasi pendaftaran oleh Komisi Pestisida melalui rapat pleno sebagai bahan pertimbangan pemerintah dalam penerbitan nomor pendaftaran dan izin pestisida.

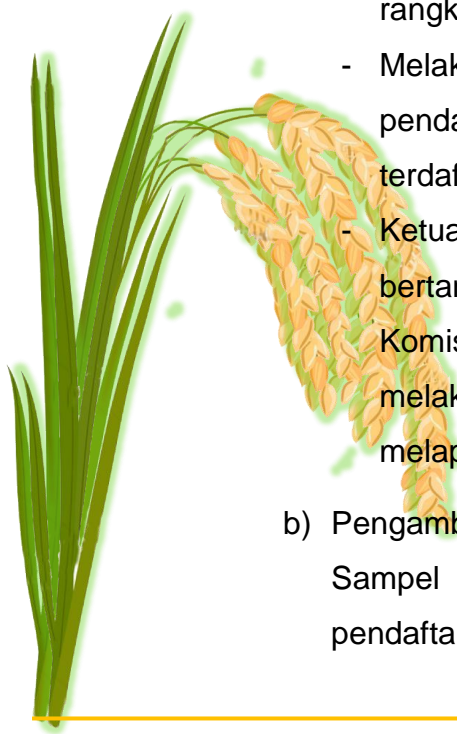
Untuk mengetahui tingkat keamanan pestisida yang didaftarkan dilakukan pengujian dengan mengikuti pendekatan pengujian berjenjang (*tiered approach*). Uji di lapangan hanya boleh dilakukan jika data uji laboratorium menunjukkan bahwa toksisitas pestisida memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Uji tersebut meliputi uji toksisitas mamalia, uji resurjensi, uji toksisitas lingkungan.

Dalam menetapkan kebijakan pestisida, Menteri Pertanian dibantu oleh Komisi Pestisida yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 345/Kpts/OT.050/5/2016 tentang Komisi Pestisida. Peraturan tersebut menetapkan pula Tim Teknis Evaluasi Pendaftaran Pestisida yang anggotanya terdiri dari perguruan tinggi IPB, ITB, UI, UGM, LIPI dan Litbang Kementerian Kesehatan serta Kementerian Pertanian. Tugas Tim Teknis Evaluasi Pendaftaran Pestisida adalah sebagai berikut :

- Menyiapkan bahan evaluasi data teknis/informasi dalam rangka pendaftaran.
- Melakukan evaluasi teknis terhadap permohonan pendaftaran pestisida dan pestisida yang telah terdaftar/telah mendapat izin Menteri Pertanian.
- Ketua Tim Teknis dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan wajib melaporkan kepada Ketua Komisi Pestisida. Ketua Komisi Pestisida dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan wajib melaporkan kepada Menteri Pertanian.

b) Pengambilan Sampel untuk Proses Pendaftaran

Sampel dalam rangka pendaftaran pestisida baik untuk pendaftaran baru maupun ulang, dilakukan oleh Petugas



Pengambil Contoh (PPC) atau Petugas yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sesuai dengan Permentan Nomor 39/Permentan/SR.330/7/2015 tentang Pendaftaran Pestisida.

- c) Dalam rangka operasional PPC diperlukan kertas segel, plastik sampel, dan peralatan segel (timah, tang, kawat, solder, gunting dan lain-lain).

Realisasi keuangan fasilitasi dan evaluasi dokumen pendaftaran pestisida sebesar Rp. 941.554.260 dari anggaran sebesar Rp. 986.000.000 (95,5%).

8. Pengawasan Pupuk

Pengawasan pupuk dilaksanakan melalui kegiatan pembinaan pengawasan pupuk dan monitoring penyaluran pupuk bersubsidi serta pengambilan sampel pupuk. Kegiatan pelaksanaan pengawasan pupuk adalah dengan pengambilan sampel pupuk di tingkat produksi, distributor dan pengecer, kemudian melakukan pengujian sampel pupuk di laboratorium/lembaga uji yang ditunjuk oleh Kementerian Pertanian.

Dalam rangka pengawasan pupuk Direktorat Pupuk dan Pestisida juga menargetkan melakukan pengujian sampel pupuk sebanyak 75 contoh. Realisasi secara fisik kegiatan pengawasan pupuk sebanyak 79 contoh atau 105,33%. Realisasi keuangan pengawasan pupuk sebesar Rp. 248.574.158 dari anggaran tersedia sebesar Rp. 290.000.000 (85,5%).

9. Pengawasan Pestisida

Dalam rangka membatasi terjadinya penyimpangan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pestisida, maka dipandang perlu untuk dilakukan pengawasan terhadap pestisida yang diproduksi dan yang beredar di lapangan. Pengawasan pestisida dilakukan berdasarkan regulasi/peraturan yang telah ditetapkan atau berlaku. Regulasi terkait pengawasan pestisida antara lain telah diatur

dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, sedangkan untuk operasionalnya diatur/dituangkan dalam Permentan No. 107/Permentan/SR.140/9/2014 tentang Pengawasan Pestisida, dan Permentan No. 39/Permentan/SR.330/7/2015 tentang Pendaftaran Pestisida. Disamping hal tersebut, sebagai bahan pelaksanaan pengawasan pestisida maka digunakan pula daftar informasi tentang pestisida yang terdaftar dan diizinkan oleh Menteri Pertanian.

Pelaksanaan Pengawasan pestisida juga dilaksanakan melalui pembinaan pengawasan pestisida ke daerah dan kegiatan koordinasi dengan instansi terkait yang tergabung dalam Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Pusat (KP3 Pusat), seperti dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Badan POM, dan Unit Eselon I lingkup Kementerian Pertanian seperti Badan Litbang Pertanian, Ditjen Perkebunan.

Selain melaksanakan pembinaan pengawasan dan koordinasi dengan instansi terkait, dilaksanakan pula kegiatan pengambilan dan pembelian sampel di lapangan seperti kios atau toko. Pengawasan pestisida juga dilaksanakan di tingkat pengadaan, dengan mengunjungi lokasi pabrik atau pembuatan pestisida dan kemudian diambil beberapa sampel produknya. Sampel-sampel yang diperoleh tersebut, selanjutnya diuji ke laboratorium pengujian pestisida untuk dibuat analisa sampel pestisidanya. Tahun 2017 Direktorat Pupuk dan Pestisida menargetkan melakukan pengujian sampel pestisida sebanyak 75 contoh. Realisasi kegiatan pengawasan pestisida telah terealisasi secara fisik sebesar sebanyak 79 contoh atau sebesar 105,33%. Pengujian sampel pestisida sebanyak 88 contoh tersebut dilaksanakan di lembaga uji mutu pestisida yang ditunjuk oleh Kementerian Pertanian atau laboratorium yang sudah memiliki standar KAN (Komite Akreditasi Nasional) yaitu di Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman,



Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.

Secara keseluruhan, realisasi keuangan kegiatan pengawasan pestisida adalah sebesar Rp. 232.383.383 dari anggaran tersedia sebesar Rp. 284.000.000 (81,8%).

5.2.4. Aspek Alat dan Mesin Pertanian

Alat dan mesin pertanian merupakan sarana yang penting untuk mendukung peningkatan produksi, mutu hasil, dan pendapatan petani. Peran alat dan mesin pertanian menjadi sangat penting dengan meningkatnya luas areal tanam, areal panen dan produksi pertanian serta tuntutan pemanfaatan teknologi mekanisasi pertanian maka kebutuhan alat dan mesin pertanian terus meningkat. Untuk itu, masih di perlukan dukungan kebijakan pemerintah dalam fasilitasi alat dan mesin pertanian.



Gambar 18. Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi Asuransi Usaha Tani Padi di Provinsi Sulawesi Selatan

Pada Tahun 2017, dukungan anggaran setelah adanya revisi anggaran adalah sebesar Rp. 3.729.022.776.200 pada tahun 2017. Anggaran tersebut terbagi atas dana Satker Pusat sebesar Rp. 3.228.936.346.000 dan dana Satker Dekon/TP sebesar Rp. 500.086.430.000. Dana Pusat sebesar Rp. 3.228.936.346.000 digunakan untuk mendukung kegiatan Belanja Alat dan Mesin Pertanian, fasilitasi Bantuan Alat Dan Mesin Pertanian dan Layanan

Perkantoran, sedangkan dana Satker TP Provinsi sebesar Rp. 500.086.430.000 digunakan untuk mendukung kegiatan Belanja Alat dan Mesin Pertanian di daerah dan kegiatan operasional dalam aspek alsintan di daerah.

Realisasi pencapaian kinerja penyediaan bantuan alat dan mesin pertanian dana Satker Pusat tahun 2017 dapat dilihat pada tabel 23 berikut.

Tabel 22. Matrik Capaian Realisasi Fisik Penyediaan Bantuan Alsintan Satker Pusat TA. 2017

S/D 9 JANUARI 2018 Rp. dalam (.000)

NO.	NAMA KEGIATAN	FISIK			KEUANGAN				
		VOLUME	SAT	VOLUME	SAT	%	NILAI (Rp.)	SP2D (Rp.)	%
	Alsintan Pusat	251.511	Unit	251.501	Unit	99,996	3.228.936.346,00	3.165.665.434,57	98,04
	Penyediaan Alsintan	251.511	Unit	251.501	Unit	99,996	3.148.576.870,00	3.101.249.379,26	98,50
	1. Traktor Roda 2	16.405	Unit	16.405	Unit	100,00	407.664.250,00	406.820.670,50	99,79
	2. Traktor Roda 4 TP	2.873	Unit	2.873	Unit	100,00	959.582.000,00	945.524.101,30	98,53
	3. Pompa Air	13.798	Unit	13.798	Unit	100,00	258.712.500,00	257.497.480,90	99,53
	4. Rice Transplanter Walking	1.980	Unit	1.980	Unit	100,00	128.700.000,00	127.866.136,80	99,35
	Rice Transplanter Riding	20	Unit	20	Unit	100,00	7.837.600,00	5.725.750,00	73,05
	5. Seeding Tray	200.000	Unit	200.000	Unit	100,00	7.000.000,00	6.534.399,00	93,35
	6. Cultivator	3.300	Unit	3.300	Unit	100,00	46.200.000,00	46.182.500,00	99,96
	7. Excavator Mini	159	Unit	159	Unit	100,00	119.250.000,00	117.608.067,04	98,62
	Excavator Standart	225	Unit	215	Unit	95,56	348.750.000,00	327.526.706,52	93,91
	8. Hand Sprayer	10.637	Unit	10.637	Unit	100,00	5.850.350,00	5.729.235,00	97,93
	9. Alat Tanam Benih Jagung (Implement TR4)	1.800	Unit	1.800	Unit	100,00	51.300.000,00	50.479.149,70	98,40
	10. Alat Tanam Benih Jagung Dorong	100	Unit	100	Unit	100,00	200.000,00	169.962,50	84,98
	11. Mist Blower	100	Unit	100	Unit	100,00	187.170,00	179.250,00	95,77
	12. Grain Seeder	50	Unit	50	Unit	100,00	12.500.000,00	11.788.475,00	94,31
	12. Rotatanam	35	Unit	35	Unit	100,00	15.750.000,00	12.836.253,00	81,50
	13. Backhoe Loader/TR4 Multiguna	29	Unit	29	Unit	100,00	26.825.000,00	26.519.700,00	98,86
	11. Pembayaran Tunggalan Alsintan TA. 2016						752.268.000	752.261.542,00	100,00
	Penyaluran Alat dan Mesin Pertanian						68.321.393,00	56.113.177,76	82,13
	Biaya Penginman/Perakitan/Pelatihan Alsintan						68.321.393,00	56.113.177,76	82,13
	Layanan Operasional Mendukung Penyaluran Alsintan						1.769.733	1.258.966,45	71,14
	Layanan Operasional Kegiatan Alsintan						10.268.350	7.043.911,10	68,60

Penyediaan unit Alsintan pusat pada TA. 2017 dapat terealisasi sebesar 99,996% dengan total realisasi sebesar 251.101 unit dari

251.511 unit. Berdasarkan keuangannya melalui SP2D kegiatan, telah terealisasi sebesar 98,04% dengan total realisasi sebesar Rp. 3.165.665.434.570 dari pagu sebesar Rp. 3.228.936.346.000. Realisasi pembayaran penundaan tagihan tahun 2017 yang telah dibayarkan pada Tahun 2017 sebesar Rp. 752.261.542.000. Realisasi pencapaian kinerja penyediaan bantuan alat dan mesin pertanian dana Satker Pusat tahun 2017.

Pencapaian kinerja realisasi fisik Direktorat Alat dan Mesin Pertanian dana satker TP Provinsi khususnya penyediaan bantuan alat dan mesin pertanian adalah sebesar 100% dan Pencapaian kinerja realisasi keuangan adalah sebesar 96,31%. Pengadaan Alsintan selain dilaksanakan di pusat juga di daerah sebanyak 32.973 unit yang terdiri dari Traktor Roda 2 sebanyak 9.630 unit, Pompa Air sebanyak 5.769 unit, Rice Transplanter sebanyak 1.043 unit, Cultivator sebanyak 519 unit, Hand Sprayer sebanyak 13.471 unit, Alat Tanam Benih Jagung Dorong sebanyak 2.541 unit, dan Traktor Roda 4 sebanyak 5 unit. Secara detail bantuan alsintan melalui Dekon dan TP-Provinsi diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 23. Matrik Kontribusi Alsintan Terhadap Pencapaian Surplus Beras Tahun 2011-2015

S/D 9 JANUARI 2018

Rp. dalam (.000)

NO.	NAMA KEGIATAN	FISIK				KEUANGAN			
		VOLUME	SAT	VOLUME	SAT	%	NILAI (Rp.)	SP2D (Rp.)	%
	Alsintan Daerah (DK/TP)	32.973	Unit	32.540	Unit	98,69	500.086.430	442.031.286,78	88,39
1.	Traktor Roda 2	9.630	Unit	9.630	Unit	100	262.462.559	246.035.518,00	93,74
2.	Pompa Air	5.769	Unit	5.769	Unit	100	126.333.092	106.005.512,27	83,91
3.	Rice Transplanter	1.043	Unit	1.043	Unit	100	74.174.541	68.234.735,01	91,99
4.	Cultivator	519	Unit	505	Unit	97,30	8.340.475	7.623.740,90	91,41
5.	Hand Sprayer	13.471	Unit	13.330	Unit	98,95	8.494.263	6.823.000,50	80,32
6.	Alat Tanam Benih Jagung Dorong	2.541	Unit	2.258	Unit	88,86	4.927.500	4.059.274,79	82,38
7.	Traktor Roda 4	5	Unit	5	Unit	100	2.125.000	2.106.550,00	99,13
8.	Operasional Provinsi						3.030.000	626.028,81	20,66
9.	Operasional Brigade TNI						10.199.000	516.926,49	5,07

Sumber Data : Direktorat Alat dan Mesin Pertanian Ditjen PSP, 2017

Penyediaan Alsintan tersebut sudah terealisasi seluruhnya (100%) dengan rincian alokasi alsintan per Provinsi dapat dilihat pada Lampiran 10.

Dukungan penggunaan alsintan saat ini sangat diperlukan mengingat kondisi sektor pertanian di Indonesia saat ini dihadapkan pada permasalahan semakin terbatasnya ketersediaan tenaga kerja, khususnya di daerah perdesaan. Pengurangan jumlah rumah tangga petani dan tingginya arus urbanisasi, ditambah dengan perubahan iklim yang terjadi menyebabkan pola dan sistem budidaya semakin tidak teratur sehingga membutuhkan waktu pengelolaan yang semakin cepat. Diharapkan fasilitasi bantuan alsintan dapat meningkatkan mutu pengolahan tanah; peningkatan Indeks Pertanaman (IP); efisiensi biaya produksi; penyelamatan kehilangan hasil; peningkatan mutu hasil; dan peningkatan pendapatan petani.

Hasil kajian Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Badan Litbang Kementerian Pertanian telah menunjukkan bahwa alsintan merupakan salah satu kegiatan yang berdampak nyata terhadap peningkatan produksi komoditas padi. Artinya jika kita memberikan bantuan penyediaan alsintan kepada petani padi maka diyakini akan mampu memberikan kontribusi pada peningkatan produksi padi. Bentuk dukungan alsintan terhadap peningkatan produksi padi adalah sebagai berikut:

1. Dukungan Terhadap Peningkatan Intensitas Pertanaman dan Efisiensi Tenaga kerja

Dukungan alsintan memungkinkan terjadinya peningkatan efisiensi tenaga kerja dan Intensitas Pertanaman (IP). Pemanfaatan alsintan secara optimal lebih jauh akan membantu memecahkan permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi seperti menurunnya pertumbuhan produksi tanaman pangan, produktivitas lahan dan meningkatnya alih fungsi lahan.

Selain traktor, dukungan pompa irigasi memungkinkan terjadinya perubahan pola tanam (intensitas pertanaman) dari 1 kali setahun menjadi 2 kali atau lebih dalam setahun. Selain dapat

memecahkan permasalahan kelangkaan air, pompa air irigasi sekaligus dapat meningkatkan kesempatan kerja, karena bertambahnya jumlah areal tanam per tahun. Dalam hal ini, efisiensi yang dilakukan pompa dapat berupa penghematan jumlah air atau tenaga kerja yang digunakan untuk usaha tani, atau dapat pula berupa peningkatan indeks pertanaman (IP) yaitu dengan semakin meningkatnya jumlah frekuensi tanam per tahun per satuan luas dan waktu.

2. Dukungan Terhadap Upaya Menekan Urbanisasi/Meningkatkan Daya Tarik Bekerja di Sektor Pertanian

Dewasa ini SDM pertanian di pedesaan mengalami penurunan sehingga perlu upaya menarik tenaga potensial pedesaan untuk tidak keluar (urban) dari desa/daerah masing-masing dan bekerja di sektor pertanian. Alsintan merupakan salah satu dari upaya tersebut. Jika upaya sosialisasi alsintan tidak dilakukan, maka tidak tertutup kemungkinan pada waktu mendatang akan terjadi kesulitan dalam mencari tenaga kerja pedesaan ini.

3. Dukungan Terhadap Upaya Menekan Biaya Produksi

Efisiensi sebagai akibat penggunaan alsintan dalam proses produksi akan menurunkan biaya produksi per satuan luas dan pada akhirnya akan terjadi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani.

Mengingat strategisnya peranan alsintan dalam memberikan dukungan pada tercapainya sasaran pembangunan pertanian secara luas, maka untuk meningkatkan kemampuan pencapaian sasaran produksi tanaman pangan, maka langkah operasional kebijakan pengembangan alsintan pra panen di Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian diarahkan kepada pemenuhan kebutuhan alsintan pengolahan lahan (traktor roda 2 dan traktor roda 4), rice transplanter, dan pompa air.

Kebijakan pengadaan alsintan oleh pemerintah dilakukan melalui dana/anggaran yang berasal dari APBN (Dana Pusat dan Tugas



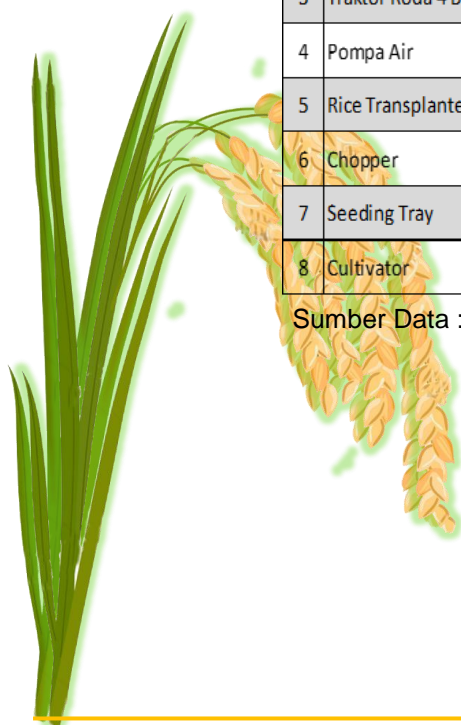
Pembantuan) dan APBD. Selain itu pengadaan juga dapat melalui cara swadaya dan kerjasama dengan swasta. Agar pengadaan, peredaran, dan penggunaan alsintan oleh petani dapat mengarah kepada alsintan yang berkualitas dan sesuai dengan Standar Nasional (SNI), maka ditetapkan Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran, dan Penggunaan Alsintan melalui Permentan No. 65/Permentan/OT.140/12/2006 yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah (Bupati/Walikota) untuk menetapkan petugas pengawasnya.

Sebagai gambaran kondisi Alsintan di Indonesia (*existing*) berdasarkan bantuan alsintan dari APBN dari tahun 2012 sd 2017 seperti pada tabel 25.

Tabel 24. Matrik Bantuan Alsintan dari APBN Tahun 2012 s.d 2017

NO.	JENIS ALSINTAN	TAHUN								TOTAL
		2012	2013	2014		2015		2016	2017	
				APBN	KTINGENSI	REFOC	APBNP			
1	Traktor Roda 2	1.567	1.567	7.635	7.800	6.100	20.624	46.980	16.405	108.678
2	Traktor Roda 4 TP	40	-	-	-	2.328	1.339	2.250	2.772	8.729
3	Traktor Roda 4 BUN	10	-	-	-	-	-	-	-	10
4	Pompa Air	600	2.002	4.122	3.000	-	18.642	19.518	13.798	61.682
5	Rice Transplanter	-	153	279	-	-	5.879	7.854	2.000	16.165
6	Chopper	-	154	225	100	-	-	-	-	479
7	Seeding Tray	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Cultivator	-	200	240	-	-	-	-	3.300	3.740

Sumber Data : Direktorat Alat dan Mesin Pertanian Ditjen PSP, 2017



5.2.5. Aspek Pembiayaan Pertanian

Sektor pertanian memiliki potensi yang besar dalam memberikan kontribusi pembangunan nasional. Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, diperlukan adanya dukungan aspek pembiayaan yang berasal dari beberapa sumber permodalan/pembiayaan sehingga tercapai tujuan pembangunan pertanian yang tepat sasaran dan berkelanjutan. Permasalahan utama yang dihadapi petani dalam melaksanakan usaha taninya adalah kesulitan dalam akses terhadap sumber-sumber atau fasilitasi pembiayaan serta keterbatasan lembaga sosial ekonomi yang mampu menyediakan modal dan mendorong pertumbuhan ekonomi petani.

Kegiatan utama yang dilaksanakan antara lain:

1. Pelaksanaan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dan Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS)
2. Pemberdayaan Permodalan dan Pengembangan Asuransi Pertanian dan Ternak Sapi
3. Fasilitasi Pembiayaan Pertanian melalui Program Kredit Usaha Rakyat (KUR).
4. Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Unit Khusus Pertanian.
5. Pemberdayaan dan Penguatan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) dan Koperasi Pertanian.
6. Fasilitator Pembiayaan Petani Sawadaya (FPPS).
7. *Pilot Project* Pembiayaan Pertanian Inklusif.

Pada tahun anggaran 2017, Direktorat Pembiayaan Pertanian mendapat dukungan anggaran dalam fasilitasi pembiayaan sebesar Rp. 187.953.960.000 yang terdiri dari Dana Pusat sebesar Rp. 181.600.010.000 dan Dana Dekonsentrasi sebesar Rp. 1.528.950.000 serta Tugas Pembantuan sebesar Rp.4.825.000.000. dengan rincian seperti pada tabel 26.

Tabel 25. Anggaran Fasilitas Pembiayaan Pertanian

No.	Satker	Pagu	Real. Penyerapan	
			Rp	%
1.	Pusat	181.600.010.000	175.429.110.595	96,60
2.	Dekonsentrasi	1.528.950.000	1.383.383.498	90,48
3.	Tugas Pembantuan	4.825.000.000	4.177.905.048	86,59
	JUMLAH	187.953.960.000	180.990.399.141	96,30

Sumber data : Monev Anggaran Kementerian Keuangan, 2017

Realisasi anggaran Direktorat Pembiayaan pada kegiatan Fasilitas Pembiayaan per 31 Desember 2017 adalah senilai Rp. 180.990.399.141 dari pagu anggaran kegiatan senilai Rp.187.953.960.000 (96,30%).

Selain anggaran untuk fasilitas pembiayaan pertanian, Direktorat Pembiayaan Pertanian memperoleh alokasi anggaran dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya yang berada di pusat senilai Rp. 21.461.100.000. Dukungan anggaran tersebut disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing subdirektorat pada Direktorat Pembiayaan Pertanian dalam melaksanakan serangkaian kegiatan fasilitas pembiayaan pertanian. Adapun rincian realisasi Anggaran Pusat Direktorat Pembiayaan Pertanian dari masing-masing Sub Direktorat dan Sub Bagian Tata Usaha seperti pada tabel 27.

Tabel 26. Realisasi Anggaran Pusat Direktorat Pembiayaan Pertanian

No	Sub Direktorat	Pagu	Realisasi	%
1	Kredit Program dan Fasilitas Pembiayaan	16.053.000.000,00	7.839.177.957,00	48,83%
2	Pemberdayaan Permodalan dan Asuransi Pertanian	182.600.010.000,00	176.144.866.768,00	96,46%
3	Kelembagaan Pembiayaan	2.965.800.000,00	2.565.717.206,00	86,51%
4	Tata Usaha	1.442.300.000,00	1.147.853.987,00	79,58%
	Total	203.061.110.000,00	187.697.615.918,00	92,43%

Pencapaian sasaran kegiatan Fasilitas Pembiayaan yaitu “meningkatnya fasilitas pembiayaan, pemberdayaan kelembagaan, dan permodalan pertanian, serta peningkatan perlindungan terhadap risiko gagal panen melalui asuransi pertanian” diukur berdasarkan indikator jumlah asuransi pertanian dan jumlah asuransi ternak sapi.

Tabel 27. Capaian Fasilitas Pembiayaan, Pemberdayaan Kelembagaan, dan Permodalan Petani, serta Peningkatan Perlindungan Terhadap Resiko TA. 2017

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Meningkatnya fasilitas pembiayaan pemberdayaan kelembagaan dan permodalan pertanian, serta peningkatan perlindungan terhadap risiko gagal panen melalui asuransi	Jumlah Asuransi Pertanian	1.000.000 Ha	997.960,54 Ha
	Jumlah Asuransi Ternak Sapi	120.000 Ekor	91.831 Ekor

1. Asuransi Usaha Tanaman Padi (AUTP)

Pada tahun 2017, capaian jumlah asuransi pertanian (AUTP) sesuai target dalam perjanjian kinerja tercapai seluas 997.960,54 Ha dari target seluas 1.000.000 Ha (99,79%) tergolong “berhasil”. Adapun capaian kegiatan asuransi pertanian Tahun 2017 secara terperinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 28. Capaian Kegiatan Asuransi Pertanian Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Fisik (Ha)		% Capaian	Keuangan (Rp.)		% Capaian
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Jumlah Asuransi Pertanian	1.000.000	997.960,54	99,80	144.000.000.000	143.706.317.760	99,80

Realisasi anggaran kegiatan Asuransi Pertanian (AUTP) adalah sebesar Rp. 143.706.317.760 (99,80%) dari total pagu anggarannya.

Tabel 29. Realisasi Anggaran Asuransi Pertanian (AUTP)

No	Indikator Kinerja	Keuangan (Rp.)		% Capaian
		Target	Realisasi	
1	Jumlah Asuransi Pertanian	144.000.000.000	143.706.317.760	99,80

Capaian tahun 2017 mengalami peningkatan dibandingkan capaian tahun 2016. Capaian tahun 2017 sebesar 997.960,54 Ha, sedangkan capaian tahun 2016 sebesar 499.962,25 Ha. Capaian tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 497.998,29 (99,61%) dibandingkan tahun 2016.

Capaian Jumlah Asuransi Pertanian tahun 2017 yaitu seluas 1.000.000 Ha bila dibandingkan dengan target jangka menengah seluas 4.500.000 Ha, maka baru mencapai 38,48% dan masih terdapat kekurangan seluas 2.768.577,66 Ha yang harus terwujudkan di periode 2018-2019 ke depan. Untuk pencapaian kekurangan target jangka menengah, maka pada tahun 2017 selalu dilakukan pendampingan oleh petugas pusat, daerah dan pihak Jasindo dalam rangka sosialisasi dan percepatan pelaksanaan kegiatan AUTP.



Gambar 19. Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi Asuransi Usaha Tani Padi di Provinsi Sulawesi Selatan

2. Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS)

Pada tahun 2017, Capaian jumlah asuransi ternak sapi sesuai target dalam perjanjian kinerja tercapai sejumlah 91.831 ekor dari target sejumlah 120.000 ekor (**76,53%**) pada tahun 2017. Realisasi fisik dan keuangan selengkapnya disajikan dalam Tabel 31 berikut.

Tabel 30. Capaian Kegiatan Asuransi Ternak Sapi Tahun 2016

No	Indikator Kinerja	Fisik (Ha)		% Capaian	Keuangan (Rp.)		% Capaian
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Jumlah Asuransi Ternak Sapi	120.000	91.831,00	76,53	19.200.000.000	14.692.960.000	76,53

Realisasi anggaran kegiatan Asuransi Ternak Sapi (AUTS) sebesar Rp. 14.692.960.000 dari pagu kegiatan sebesar Rp. 19.200.000.000 (76,53%).

Tabel 31. Realisasi Anggaran Asuransi Pertanian (AUTS)

No	Indikator Kinerja	Keuangan (Rp.)		% Capaian
		Target	Realisasi	
1	Jumlah Asuransi Ternak Sapi	19.200.000.000	14.692.960.000	76,53

Kegiatan asuransi ternak sapi merupakan program baru yang dilaksanakan sebagai bagian dari program kegiatan prasarana dan sarana pertanian pada Tahun 2017. Dari pencapaian target dan realisasi, capaian pelaksanaan kegiatan ini dikategorikan "**Cukup Berhasil**".

Capaian tahun 2017 mengalami peningkatan sebanyak 71.831 ekor (359,2%) dibandingkan capaian tahun 2016. Capaian tahun 2016 adalah sebanyak 20.000 ekor.

Capaian Jumlah Asuransi Usaha Ternak Sapi tahun 2017 yaitu sebanyak 91.831 ekor bila dibandingkan dengan target jangka menengah sebanyak 380.000 ekor, maka baru mencapai 29,43%

dan masih terdapat kekurangan sebanyak 268.169 ekor yang harus terwujudkan di periode 2018-2019 ke depan. Kontribusi dari kegiatan asuransi ternak sapi untuk mendukung program swasembada daging melalui mitigasi terjadinya kerugian peternak sapi akibat mati dan atau kehilangan sejumlah 91.831 ekor sapi melalui pembayaran bantuan premi dari pemerintah 80% untuk ternak sapi sejumlah 91.831 ekor sapi.

3. Pemberdayaan Permodalan dan Pengembangan Asuransi Pertanian dan Ternak Sapi

Dalam pelaksanaan Asuransi Pertanian terdapat kegiatan pendukung pemberdayaan permodalan dan pengembangan asuransi pertanian dan ternak sapi. Kegiatan pendukung yang telah dilaksanakan dalam penyelenggaraan kegiatan asuransi pertanian (tanaman padi dan usaha ternak sapi) sebagai berikut:

- a. Koordinasi dan Sosialisasi Asuransi Pertanian
- b. Penyusunan pedoman Asuransi Usaha Tani Padi dan Asuransi Ternak Sapi
- c. Penyusunan petunjuk penyaluran bantuan premi
- d. Penyusunan leaflet asuransi pertanian
- e. Pengumpulan data CPCL asuransi pertanian
- f. Verifikasi dokumen
- g. Bimbingan teknis dan pembinaan
- h. Monev kegiatan asuransi

Realisasi anggaran dari kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pemberdayaan permodalan
Realisasi kegiatan pemberdayaan permodalan sebesar Rp. 637.616.773 (63,76%) dari pagu Rp. 1.000.000.000.
- b. Operasional Asuransi Usaha Tani Padi
Realisasi kegiatan pengembangan asuransi pertanian sebesar Rp. 1.433.769.685 (69,82%) dari pagu senilai Rp. 2.053.500.000.

c. Operasional Usaha Ternak Sapi

Realisasi kegiatan pengembangan asuransi usaha ternak sapi sebesar Rp. 1.086.551.950 (55,82%) dari pagu senilai Rp. 1.946.500.000.

4. Kelembagaan Pertanian

Pada kegiatan mengenai kelembagaan pertanian dilaksanakan dalam rangka pemberdayaan dan penguatan LKMA dan Koperasi Pertanian. Adapun realisasi anggaran kegiatan kelembagaan pertanian senilai Rp. 2.565.717.206 dari pagu Rp. 2.965.800.000 (86,51%). Realisasi anggaran tersebut terlaksana melalui kegiatan berikut :

a. Pemberdayaan dan Penguatan LKMA

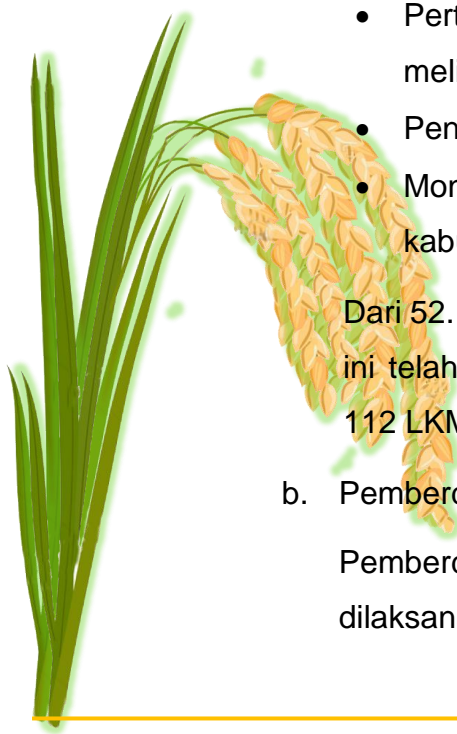
Dalam rangka pemberdayaan dan penguatan LKMA pada TA. 2017 dilaksanakan serangkaian kegiatan, antara lain :

- Penyusunan pedoman pemberdayaan LKMA dan Koperasi Pertanian
- Apresiasi gapoktan LKMA yang dilaksanakan di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara
- Identifikasi pengumpulan data LKMA
- Pertemuan pemberdayaan dan penguatan LKMA yang melibatkan instansi terkait di tingkat pusat
- Penyusunan buku basis data unit usaha LKMA
- Monev kegiatan LKMA ke Propinsi Jawa Barat (5 kabupaten) dan Jawa Tengah (5 Kabupaten).

Dari 52.186 desa/gapoktan penerima PUAP (2008-2015), saat ini telah terbentuk 6.887 LKMA. Dari 6.887 LKMA, sejumlah 112 LKMA telah mendapatkan ijin usaha dari OJK

b. Pemberdayaan dan Penguatan Koperasi

Pemberdayaan dan penguatan Koperasi Pertanian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memberdayakan dan



penguatan LKMA untuk memiliki badan hukum koperasi. Dari 6.887 LKMA yang telah terbentuk, saat ini telah tercapai 607 LKMA yang memiliki legalitas koperasi. Capaian pemberdayaan LKMA dan koperasi pertanian memberikan kontribusi dalam peningkatan penyediaan akses petani pada lembaga keuangan di perdesaan, sehingga petani dapat dengan mudah memperoleh pinjaman modal untuk melaksanakan kegiatan usaha taninya dan membantu mewujudkan peningkatan produktivitas dalam usaha pertanian yang dijalankan.

5. Pengembangan Pembiayaan Program Pertanian melalui Kredit Program (KUR)

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan salah satu skema kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi yang diberikan kepada debitur yang memiliki usaha produktif dan layak termasuk sektor pertanian, namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. Skema kredit ini disalurkan oleh Bank maupun Lembaga Keuangan bukan Bank yang ditunjuk, dengan pola penjaminan, yang dilaksanakan atas kerjasama Pemerintah, lembaga penjamin dan perbankan, dengan imbal jasa penjaminan disediakan Pemerintah.

Pada tahun 2017 Pemerintah menyediakan anggaran sebesar Rp. 106,6 Triliun untuk program KUR termasuk untuk sektor pertanian di dalamnya. Untuk sektor pertanian, alokasi program KUR tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemberian kredit kepada Usaha Mikro dan retail yang menjalankan usaha di sektor pertanian.

Untuk pelaksanaan Pengembangan pembiayaan program pertanian melalui kredit program (KUR) telah dilaksanakan beberapa kegiatan pendukung yaitu :

- a. Koordinasi kredit program dan fasilitasi pembiayaan. Koordinasi ini dilaksanakan melibatkan instansi terkait seperti Ditjen Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan

peternakan, PSE-KP dan Kementerian Perekonomian dalam rangka penyusunan rencana biaya indikatif komoditas pertanian untuk KUR TA. 2017 dan persiapan usulan skema kredit komoditas pertanian untuk TA.2018.

- b. Koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka akselerasi KUR Koordinasi ini dilaksanakan dengan instansi terkait seperti perbankan (Bank BRI, BNI dan Mandiri), Bank Indonesia dan OJK dalam mempersiapkan pelaksanaan kegiatan pembekalan Fasilitator Pembiayaan Petani Swadaya (FPPS).
- c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan KUR sektor pertanian ke Propinsi Sulawesi Tenggara, NTB, Sumatera Utara dan Jawa Barat.
- d. *Focus Group Discussion* KUR di Bandung. FGD ini dilaksanakan untuk memonitor dan mengevaluasi penyaluran KUR sektor pertanian di Propinsi Jawa Barat dan mengupayakan strategi peningkatan penyaluran KUR.

Realisasi penyaluran KUR sektor pertanian, perburuan dan kehutanan per Desember tahun 2017 oleh perbankan sebesar Rp. 23,1 triliun atau 24% dari target KUR Nasional sebesar Rp. 106,6 triliun. Capaian realisasi KUR sektor pertanian tahun 2017 dibandingkan capaian tahun 2016 dengan realisasi penyaluran KUR sektor pertanian dan kehutanan tercapai sebesar Rp16,36 triliun, maka capaian realisasi KUR sektor pertanian meningkat sebesar 41,20%.



Gambar 20. Evaluasi Realisasi Penyaluran KUR 2017

Kontribusi kegiatan kredit program melalui KUR dalam dukungan sawsembada pangan adalah membantu permodalan petani/peternak melalui subsidi suku bunga dalam menjalankan usaha pertaniannya. Apabila kredit diterima tepat waktu maka dampaknya dapat membantu kelangsungan usaha tani sekaligus meningkatkan produktivitas usaha tani yang dilaksanakan.

6. Pengembangan Pembiayaan Program Pertanian Melalui Penyusunan RPP Unit Khusus Pertanian

Permodalan sebagai elemen penting dalam pembangunan pertanian, masih terbatas ketersediaannya oleh pemerintah, di sisi lain dukungan lembaga perbankan masih rendah rata-rata setiap tahun hanya sekitar 5% membiayai sektor pertanian. Persoalan mendasar yang dihadapi petani dalam akses permodalan kepada lembaga perbankan masih rendah karena menerapkan perbankan menerapkan azas prudential (character, capital, condition, capacity dan collateral/ 5C). Prinsip 5C sulit dipenuhi petani subsistence di pedesaan yang tidak memiliki sertifikat sebagai jaminan dan sebagian tidak memiliki lahan.

Mengingat sebagian besar penduduk Indonesia berusaha di bidang pertanian, di sisi lain tidak tersedianya Bank Pertanian maka Pemerintah berupaya menciptakan payung hukum guna melindungi dan memberdayakan petani melalui UU No. 19 tahun 2013 pasal 87. Berdasarkan Undang-undang No. 5 tahun 1992 pasal 5 juncto Undang-undang No. 10 tahun 1998 tercantum Bank Umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu. Sejalan dengan Undang-Undang tersebut agar dapat dapat dilaksanakan secara operasional perlu pengaturan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah.

Penyusunan RPP UKP telah dimulai sejak tahun 2016 dan menjadi kegiatan yang dipantau oleh Kantor Staf Presiden (KSP). Sejalan

dengan perkembangan pembahasan RPP Unit Khusus Pertanian, saat ini telah menjadi RPP Pembiayaan dan Pendanaan Usaha Tani. Proses pembahasan yang telah dilaksanakan pada TA. 2017, sebagai berikut:

- a. Penyusunan draft RPP tentang Pembiayaan dan pendanaan Usaha Tani serta pembahasan intern pada Bulan Agustus-Desember 2016
- b. Pembahasan Draft RPP oleh Tim Panitia Antar Kementerian (PAK) pada tanggal 20 Desember 2016.

Penyusunan RPP pada TA. 2017 dilaksanakan melalui beberapa kegiatan pendukung sebagaimana tabel berikut.

Bulan - 2017	Kegiatan
Maret	Pembahasan bersama Biro Hukum Kementan
April	Pembahasan bersama Bagian hukum Ditjen Teknis terkait
Juni	<ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan dan penyempurnaan Draft RPP bersama Kemenko, Kementerian Keuangan, OJK, BI, PSE-KP, BBSDMP dan Biro Hukum Kementan. • Pembahasan Draft dan Penyusunan <i>position paper</i> bersama Tim Kecil Kementan
Juli	Pembahasan dan penyempurnaan Draft RPP bersama Tim Kecil Kementan
Desember	Penyampaian Draft RPP ke Biro Hukum Sekjen Kementan untuk diserahkan kepada Kemenkumham.

Capaian kegiatan penyusunan Draft RPP UKP telah tersampaikan kepada Biro Hukum Sekjen Kementan untuk selanjutnya diserahkan kepada Kemenkumham. Kontribusi dari RPP UKP ini adalah menyediakan perangkat peraturan pemerintah sebagai payung pelaksanaan dalam penyediaan fasilitas pembiayaan dan

akses permodalan petani terhadap sumber-sumber pembiayaan pertanian.

7. Fasilitator Pembiayaan Petani Swadaya (FPPS)

Fasilitator Pembiayaan Petani Swadaya (FPPS) adalah tenaga swadaya yang mendampingi petani/kelompok tani/gapoktan/pelaku usaha pertanian untuk bisa akses pelayanan perbankan/lembaga keuangan. FPPS dimaksudkan untuk mengembangkan model pendampingan oleh tenaga FPPS yang berasal dari PMT PUAP yang tercantum dalam SK Dirjen PSP No.03/2016 tentang Penetapan Penyelia Mitra Tani Kementerian Pertanian TA. 2016. Peran dan fungsi FPPS adalah untuk menjembatani petani dalam melakukan akses kepada perbankan sehingga tercapai revitalisasi pembiayaan pertanian. Pemerintah telah menyediakan berbagai fasilitas pembiayaan kepada petani untuk mengembangkan usaha taninya. Pendampingan bagi petani diperlukan baik secara teknis kewirausahaan, manajemen, maupun pengelolaan *cash flow* agar petani dapat dengan mudah mengakses sumber pembiayaan.

Alokasi kegiatan FPPS melalui anggaran Ditjen PSP TA. 2017 senilai Rp. 12.464.050.000, hingga akhir tahun 2017 telah terealisasi senilai Rp. 5.567.993.493 (44,67%).

Pelaksanaan kegiatan FPPS ini memberikan kontribusi terhadap percepatan penyaluran KUR sektor pertanian kepada petani sehingga membantu penyediaan modal bagi usaha tani. Akselerasi KUR melalui peran FPPS pada TA. 2017 memberikan akselerasi penyaluran KUR senilai + Rp10,5 Milyar.

8. Pilot Project Pembiayaan Pertanian Inklusif

Pembiayaan inklusif pertanian dilaksanakan dalam rangka pemanfaatan akses pembiayaan dari berbagai sumber dana dalam mendukung pembangunan pertanian. Kegiatan *Pilot Project* Pembiayaan Pertanian Inklusif mendapatkan alokasi anggaran

senilai Rp728.000.000 untuk pelaksanaannya. Realisasi anggaran senilai Rp254.792.080,00 (35%) terhadap pagu anggaran, dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Kajian awal oleh Tim PSE-KP dan Dit. Pembiayaan Pertanian, dengan objek pengamatan pada LKMA penerima PUAP yang saat ini posisinya ada yang sudah berbadan hukum koperasi ataupun belum berbadan hukum dan bergerak menjalankan bisnis di perdesaan mengikuti prinsip ekonomi koperasi. Untuk kajian awal, telah dilakukan pengamatan pada LKMA di 5 (lima) provinsi, yaitu Provinsi Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Sumatera Utara.
- b. Pemaparan hasil kajian Tim PSE-KP terkait konsep pembiayaan pertanian inklusif melalui FGD yang melibatkan instansi terkait seperti BI, perbankan (BNI, BRI, Mandiri, BPD Yogyakarta), OJK, Dinas Pertanian Prop DIY dan kabupaten lingkup DIY. FGD dilaksanakan pada tanggal 21 November 2017 di Yogyakarta.
- c. FGD untuk merumuskan model pembiayaan pertanian inklusif yang melibatkan instansi terkait seperti BI, perbankan (BNI, BRI, Mandiri), OJK, Direktorat Teknis Lingkup Kementan. Pada FGD ini diperoleh berbagai pandangan dan masukan untuk perumusan model pembiayaan pertanian inklusif. FGD ini dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2017 di Depok.

Untuk pelaksanaan uji coba pembiayaan pertanian inklusif di TA. 2018, akan dilaksanakan di Propinsi Jawa Barat, DIY, Jawa Timur, NTB, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan.

9. Dukungan Manajemen Pembiayaan Pertanian

Pelaksanaan kegiatan Direktorat Pembiayaan Pertanian dalam mencapai tujuan program prasarana dan sarana pertanian dan kegiatan dalam Direktorat juga didukung melalui dukungan

manajemen pembiayaan pertanian. Adapun pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kegiatan teknis dan administrasi kesekretariatan lingkup Direktorat Pembiayaan
2. Koordinasi dan sinkronisasi kegiatan di lingkup Direktorat Pembiayaan
3. Koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan Direktorat Pembiayaan
4. Pembinaan dan monitoring kegiatan Direktorat Pembiayaan
5. Evaluasi kegiatan Direktorat Pembiayaan

Capaian kegiatan dukungan manajemen Direktorat Pembiayaan Pertanian adalah senilai Rp1.147.853.987 dari pagu Rp. 1.442.300.000 (79,58%).

5.2.6. Aspek Sekretariat Direktorat Jenderal

Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian mengalokasikan anggaran awal sebesar Rp. 324.914.471.000, kemudia memperoleh *self blocking* sehingga pagu sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian menjadi sebesar Rp. 187.611.815.000 untuk belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Adapun perincian anggaran tersebut tercantum dalam tabel dibawah ini.

Tabel 32. Realisasi Anggaran Unit Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian TA. 2017

No	Unit Kerja	Pagu Anggaran (Rp)	Pagu Setelah Self Blocking (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Anggaran (Rp)	%
	Setditjen PSP	324.914.495.000	187.611.815.000	150.684.447.606	80,32	36.927.367.394	19,68
1	Belanja Pegawai	36.562.360.000	29.605.784.000	24.061.722.396	81,27	5.544.061.604	18,73
2	Belanja Barang	284.469.535.000	154.123.431.000	123.307.864.083	80,01	30.815.566.917	19,99
3	Belanja Modal	3.882.600.000	3.882.600.000	3.314.861.127	85,38	567.738.873	14,62

Sumber data : Bagian Keuangan, Setditjen PSP 2017

Secara keseluruhan alokasi anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang sudah terealisasi sebesar Rp 150.684.447.606 (80,32%) dengan sisa anggaran sebesar Rp. 36.927.367.394.

1. Penyelesaian Kerugian Negara Pada Kegiatan Direktorat Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian

Penyelesaian Temuan LHA/P merupakan salah satu kriteria untuk penilaian kinerja satker Tahun 2017, sehingga sangat berpengaruh pada kinerja satker secara keseluruhan. Sebagai tindak lanjut penyelesaian kerugian Negara, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian secara triwulanan melakukan rekonsiliasi data kerugian Negara dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian. Hasil rekonsiliasi data kerugian negara sampai dengan akhir bulan Desember 2017 (Triwulan IV) adalah sebagai berikut :

Tabel 33. Hasil Rekonsiliasi Data Kerugian Negara Antara Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

NO.	LHP-APF/NON LHP	NILAI TEMUAN	SALDO 30 November 2017	MUTASI		SALDO 31 Desember 2017
				PENAMBAHAN	PENYELESAIAN	
1.	ITJENTAN :					
	a. Reguler :					
	SKTJM	1.102.505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NON SKTJM	956.666.098,83	662.503.370,83	0,00	0,00	662.503.370,83
	JUMLAH a	2.059.171.098,83	662.503.370,83	0,00	0,00	662.503.370,83
	b. Investigasi :					
	SKTJM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NON SKTJM	21.295.759.345,00	20.254.091.626,00	0,00	0,00	20.254.091.626,00
	JUMLAH b	21.295.759.345,00	20.254.091.626,00	0,00	0,00	20.254.091.626,00
	JUMLAH 1(a+b)	23.354.930.443,83	20.916.594.996,83	0,00	0,00	20.916.594.996,83
2.	BPKP :					
	SKTJM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NON SKTJM	953.219.872,12	888.469.872,12	0,00	182.259.600,00	706.210.272,12
	JUMLAH 2	953.219.872,12	888.469.872,12	0,00	182.259.600,00	706.210.272,12
3.	BPK-RI :					
	SKTJM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NON SKTJM	660.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH 3	660.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (Jumlah 1+2+3)	24.968.150.315,95	21.805.064.868,95	0,00	182.259.600,00	21.622.805.268,95

2. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya

Dalam rangka mencapai swasembada padi, jagung dan kedelai, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian memberikan dukungan manajemen dan dukungan teknis pada kegiatan-kegiatan yang telah diprogramkan. Pendampingan dan dukungan manajemen diperlukan untuk mengatur dan mengarahkan agar penggunaan segala sumber daya berjalan secara efisien dan efektif, yang pelaksanaannya meliputi mulai dari proses perencanaan hingga implementasi kegiatan.

Anggaran kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya sesuai dengan alokasi terakhir adalah sebesar Rp. 796.463.057.000 dan telah terealisasi sebesar Rp. 623.474.115.843 (78,28%). Uraian kegiatan yang berada dalam lingkup satker pusat terkait dukungan manajemen dan dukungan teknis yang mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Ditjen PSP adalah kegiatan padat karya produktif, pendampingan TNI, dan pengembangan embung/dam parit/long storage berikut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 34. Capaian Anggaran Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya

NO.	ASPEK KEGIATAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	PERSENTASE (%)
1	Padat Karya Produktif Infrastruktur/Prasarana dan Sarana Pertanian	130.629.038.000	60.982.911.911	46,68
2	Pendampingan TNI Mendukung Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian	37.484.500.000	15.786.743.978	42,12
3	Pengembangan Embung/Dam Parit/Long Storage	52.415.594.000	37.853.150.450	72,22
4	Fasilitas Kegiatan Ditjen PSP Mendukung Swasembada Pangan	16.069.449.000	2.976.266.577	18,52

a. Padat Karya Produktif Infrastruktur/Prasarana dan Sarana Pertanian

Arah pembangunan pertanian ke depan sesuai agenda prioritas kabinet kerja yang tertuang dalam Nawa Cita adalah mewujudkan kedaulatan pangan. Kedaulatan pangan dimaksud harus dimulai dari swasembada pangan yang secara bertahap diikuti dengan peningkatan nilai tambah usaha pertanian secara luas untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Untuk mewujudkan swasembada pangan tersebut, prasarana dan sarana pertanian memiliki peranan yang penting sebagai penggerak pembangunan pertanian.

Dalam pencapaian tujuan Nawa Cita dimaksud, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian memberikan bantuan prasarana dan sarana pertanian diluar program regular Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian melalui Kegiatan Padat Karya Produktif Infrastruktur/ Prasarana dan Sarana Pertanian. Kegiatan Padat Karya Produktif Infrastruktur/ Prasarana dan Sarana Pertanian dilakukan untuk merespon permasalahan yang dihadapi petani untuk meningkatkan produksi dan produktivitas, terutama permasalahan yang terkait prasarana dan sarana pertanian. Kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan melalui padat karya produktif infrastruktur adalah seluruh aspek prasarana dan sarana pertanian dari aspek pengelolaan air irigasi, pengelolaan dan perluasan lahan, penyediaan alat dan mesin pertanian, fasilitasi pupuk dan pestisida, serta fasilitasi pembiayaan pertanian.

Pagu Kegiatan Padat Karya Produktif Infrastruktur/Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2017 memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 129.256.488.000,00. Anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 60.571.634.711 (46,86%), termasuk di dalamnya kegiatan bantuan pemerintah Pilot Percontohan Padat Karya Prasarana dan Sarana Pertanian untuk pengembangan jaringan irigasi, normalisasi saluran irigasi, rehabilitasi jaringan irigasi, pengembangan irigasi tanah dangkal, sertifikasi padi organik, pilot percontohan pengembangan padi menuju organik, pengembangan irigasi perpipaan, bantuan pompa air, pemanfaatan sumber air tanah, pembangunan box culvert, dan pengembangan sumur pertanian/sumur gali.

b. Fasilitasi Kegiatan Mendukung UPSUS Swasembada Pangan

Kegiatan UPSUS swasembada pangan untuk mencapai keberhasilan didukung oleh kegiatan Fasilitasi dan Pengarusutamaan Gender (PUG) sebagai berikut:

a. Fasilitasi Kegiatan Ditjen PSP Mendukung Swasembada Pangan

Kegiatan ini ditujukan untuk memfasilitasi kegiatan untuk menunjang proses pencapaian UPSUS menuju swasembada pangan sehingga dapat berjalan lancar, teratur, efektif dan efisien. Anggaran fasilitasi kegiatan Ditjen PSP mendukung swasembada pangan adalah sebesar Rp. 16.069.449.000,00 telah mencapai realisasi sebesar Rp. 2.976.266.577,00 atau **18,52 %**.

b. Pengarusutamaan Gender (PUG) di Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian

Alokasi anggaran untuk kegiatan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian adalah sebesar Rp. 2.442.902.000 dan sampai dengan akhir bulan Desember sudah terealisasi sebesar Rp. 2.379.946.000,00 (**97,42%**). Kegiatan ini termasuk Bantuan Pemerintah *Pilot Project* Optimalisasi Lahan *Responsive Gender* melalui pengintegrasian ternak kelinci/itik dan kambing dengan areal tanaman pangan/hortikultura senilai Rp. 1.700.000.000,00 dengan perincian bantuan ternak kelinci/itik sebesar Rp. 50.000.000,00/paket dan ternak kambing sebesar Rp. 75.000.000,00/paket yang dilaksanakan di Provinsi Sumatera Utara (Kab. Tanah Karo), Sumatera Selatan (Kab. Bukit Tinggi), Jawa Barat (Kab. Bandung), Jawa Tengah (Kab. Banjarnegara, Kab. Banyumas, Kab. Klaten, Kab. Wonosobo) dan Jawa Timur (Kab. Malang)..





Gambar 21. Pilot Project Optimalisasi Lahan Responsive Gender melalui pengintegrasian ternak kambing dengan areal tanaman pangan/hortikultura

Kegiatan *pilot project* optimalisasi lahan *responsive gender* dilaksanakan melalui pengintegrasian ternak kelinci/itik dan kambing dengan areal tanaman pangan/hortikultura dengan tujuan untuk mendukung sub sektor Tanaman Pangan, Peternakan maupun Hortikultura. Pola pelaksanaan *Pilot Project Optimalisasi Lahan Responsive Gender* dilakukan sebesar-besarnya melibatkan partisipasi masyarakat/petani setempat baik laki-laki maupun perempuan. Partisipasi tersebut mulai dari perencanaan, pelaksanaan, maupun pemanfaatan. Pola ini diharapkan dapat menumbuhkan semangat kebersamaan dan rasa memiliki dalam mengembangkan kegiatan. Seluruh komponen dalam kegiatan ini dilaksanakan sepenuhnya melalui mekanisme bantuan belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat atau Pemda dan swadaya petani.





Gambar 22. Ternak kelinci dalam kegiatan Pilot Project Optimalisasi Lahan

c. Pendampingan TNI Mendukung Kegiatan Ditjen PSP

Program ini dilaksanakan berdasarkan Nota Kesepahaman antara Menteri Pertanian dengan Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) No.01/MOU/RC.120/ M/1/2015 tentang Mewujudkan Kedaulatan Pangan tanggal 8 Januari 2015, maka dilaksanakan pelibatan dukungan/partisipasi dari jajaran TNI dalam pencapaian kedaulatan pangan dalam Program UPSUS Pajale. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian menindaklanjuti MoU tersebut dengan membuat Perjanjian Kerjasama dengan Asisten Teritorial Kepala Staf Angkatan Darat dengan Nomor : 06/SR.120/B.1/01/2015 dan Nomor : 2/ 1/ 2015 tentang Program Kerjasama Mendukung Peningkatan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai melalui Program Perbaikan Jaringan Irigasi dan Sarana Pendukungnya. Dukungan dari jajaran TNI ini telah diwujudkan sejak persiapan pertanaman sampai pengawalan benih dan pupuk. Peran dari jajaran TNI adalah:

- menggerakkan dan memotivasi petani untuk melaksanakan : 1) tanam serentak; 2) perbaikan dan pemeliharaan jaringan irigasi; 3) gerakan pengendalian OPT dan panen
- melaksanakan dukungan dalam keadaan tertentu untuk: 1) penyaluran benih, pupuk dan alsintan; 2) infrastruktur jaringan irigasi
- Melakukan pengawasan terhadap pemberkasan administrasi dan penyaluran bantuan kepada penerima manfaat.

Tugas Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian secara normatif adalah merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pengelolaan dan perlindungan lahan, irigasi pertanian, pembiayaan pertanian, pupuk pestisida, dan alat mesin pertanian. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian membentuk Tim Pendampingan Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dalam Mendukung Upaya Khusus (UPSUS) Peningkatan Swasembada Padi, Jagung, dan Kedelai pada tahun 2017 (tahun kedua). Tim tersebut selanjutnya disebut Tim Pendampingan UPSUS. Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 37.484.500.000,00 yang terdiri dari :

- (i) Koordinasi Pendampingan TNI Rp.25.438.100.000
- (ii) Operasional Posko Upsus Pajale Rp. 3.743.400.000
- (iii) Operasional Pengawasan Upsus Kedelai Rp. 8.303.000.000

Anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan Pendampingan TNI Mendukung Kegiatan Ditjen PSP sebesar Rp. 37.484.500.000,00 dengan capaian sebesar **42,14%** senilai Rp. 15.786.743.978,00.

d. Pengembangan Embung/Dam Parit/Long Storage

Kegiatan teknis ini merupakan bagian dari kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya yang berperan sebagai pendorong dalam upaya pencapaian swasembada pangan dengan mempertahankan ketersediaan air irigasi pada lahan usaha tani sebagai suplesi air irigasi dalam pengelolaan lahan pertanian tanaman pangan. Penerima manfaat kegiatan pengembangan embung/dam parit/long storage sebanyak 341 kelompok tani yang tersebar di 53 kabupaten pada 14 propinsi.

Alokasi anggaran kegiatan Pengembangan Embung/Dam Parit/Long Storage adalah sebesar Rp. 52.415.594.000 dan sudah terealisasi Rp. 37.853.150.450 atau sebesar 72,22%. Sedangkan realisasi fisik kegiatan pengembangan embung/dam parit/long storage dari target sebanyak 341 unit terealisasi 100% sebanyak 341 unit. Jenis bangunan sebanyak 341 unit terdiri dari bangunan embung sebanyak 178 unit, Dam Parit sebanyak

134 unit, dan Long Storage (LS) sebanyak 29 unit. Perincian realisasi kegiatan pengembangan embung/dam parit/long storage terlampir pada Lampiran 12.



Gambar 23. Lokasi Kegiatan Pengembangan Embung/Dam Parit/Long Storage



BAB VI PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT



6.1. PERMASALAHAN

Dalam upaya pelaksanaan dan pencapaian kinerja pembangunan prasarana dan sarana pertanian Tahun 2017, secara umum masih mengalami berbagai hambatan/kendala, sehingga pencapaian target sasaran strategis belum 100%. Dalam rangka meningkatkan kinerja di tahun mendatang, maka perlu diketahui faktor yang menjadi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Tahun 2017 agar dapat disempurnakan untuk kegiatan TA. 2018. Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan antara lain :

6.1.1. Kegiatan Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan

1. Kendala Kegiatan Perluasan Sawah

- a. Adanya evaluasi kegiatan cetak sawah oleh DPR RI, menyebabkan pelaksanaan persiapan kegiatan (penandatanganan kontrak, penyusunan tim swakelola) baru dilaksanakan pada akhir bulan Mei 2017. Sementara pelaksanaan fisik baru dimulai pada bulan Juli 2017.
- b. Hasil SID yang dijadikan acuan untuk pelaksanaan konstruksi cetak sawah kurang akurat, akibatnya:
 - Banyak lahan yang tumpang tindih dengan kawasan hutan, kawasan izin usaha pertambangan maupun izin perkebunan
 - Luasan lahan setelah dikerjakan cetak sawah tidak sesuai dengan hasil SID (luasannya berkurang).
 - Terjadi pergeseran lokasi, karena lokasi yang direncanakan melalui SID tidak sesuai.
- c. Tidak semua lokasi kegiatan dilengkapi shop drawing.

- d. Penetapan CP/CL belum sepenuhnya mengikuti ketentuan dalam pedoman teknis, sehingga masih ada beberapa lokasi mengalami kesulitan dalam memperoleh sumber air. Atau sebaliknya ada lokasi yang merupakan rawa lebak dalam dan rawan terhadap bencana banjir, sehingga ketika puncak musim hujan, lokasi tenggelam.
- e. Koordinasi dan komunikasi antara PPK dengan kalaklap/kalakgiat belum berjalan intensif, sehingga penyelesaian pekerjaan fisik di lapangan kurang berjalan lancar.
- f. Tim pengawasan tidak melakukan tugas secara maksimal. Sehingga masih ada pekerjaan di lapang yang tidak sesuai dengan kriteria teknis pekerjaan cetak sawah.
- g. Dokumen lingkungan (UKL-UPL dan izin lingkungan) terlambat diterbitkan
- h. Penyelesaian pengerjaan fisik terlambat, hal ini dikarenakan kurangnya jumlah alat berat, sulitnya mobilisasi alat berat ke lokasi terutama lokasi yang merupakan kepulauan, adanya banjir, serta beberapa lokasi yang mempunyai vegetasi sangat berat. Lokasi yang berpencar (spot luasan kecil), sehingga memakan waktu yang lama untuk mobilisasi alat berat dari satu lokasi ke lokasi yang lainnya.
- i. Adanya rotasi pejabat di pihak pelaksana, khususnya kalaklap. Hal ini menyebabkan adendum kontrak dan pelaksanaan fisik di lapang sempat terhenti.
- j. Sawah yang sudah selesai dicetak tidak bisa segera ditanami, hal ini disebabkan antara lain lokasi terkena banjir, kebiasaan petani yang tidak mau tanam diluar kebiasaan musim tanam di wilayah setempat, dan sumber air terbatas (lokasi sumber air yang jauh dari lokasi kegiatan perluasan sawah).
- k. Masih ada beberapa lokasi yang terdapat simpukan sisa land clearing dan masih berada dilokasi sawah. Sehingga mengurangi luas efektif lahan yang bisa digarap petani,

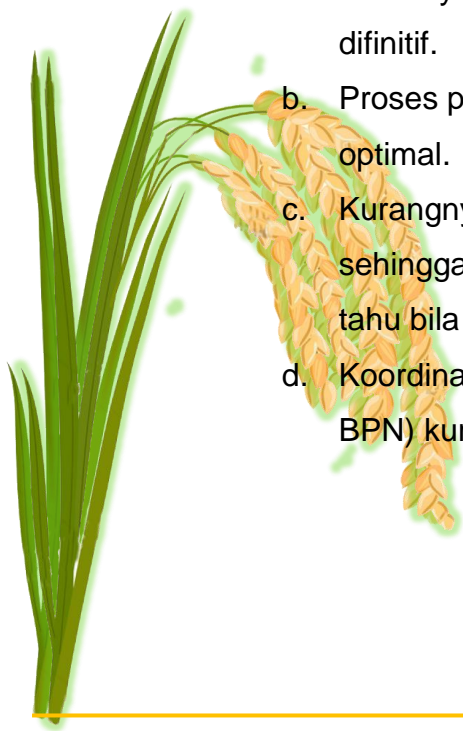


menyulitkan pengolahan tanah, dan menjadi sarang hama tikus.

- l. Pengukuran realisasi sering tidak sinkron antara pelaksana dan pengawas. Sehingga laporan mingguan tidak sama.
- m. Masih banyak administrasi kegiatan perluasan sawah yang belum lengkap, baik dari mulai dokumen perencanaan, laporan bulanan, maupun laporan akhir.
- n. Sawah yang sudah selesai dicetak belum dibuat berita acara serah terima oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), maupun BAST. Hal ini disebabkan tim PPHP menilai pekerjaan belum sempurna sesuai kontrak.
- o. Dukungan pembiayaan oleh pemerintah daerah melalui APBD I / dan APBD II, masih sangat terbatas, bahkan ada kabupaten yang sama sekali tidak mendapat dukungan pembiayaan tersebut, sehingga menjadi kendala untuk melakukan operasional ke lapangan seperti pembinaan, koordinasi, dan pengumpulan data ke daerah-daerah/kabupaten yang memiliki potensi areal untuk pencetakan sawah.

2. Kendala Kegiatan SID Perluasan sawah

- a. Lokasi yang disampaikan oleh kabupaten/kota ke provinsi tidak difinitif.
- b. Proses pelibatan pihak dinas pertanian kabupaten/kota kurang optimal.
- c. Kurangnya sosialisasi program CPCL yang akan dilakukan, sehingga masih banyak masyarakat dan pemilik lahan tidak tahu bila ada program tersebut.
- d. Koordinasi dengan instansi terkait (dinas kehutanan, Bappeda, BPN) kurang optimal.



3. Kendala Kegiatan Pengembangan Pemanfaatan Lahan Rawa/Gambut Terpadu
 - a. Kegiatan Pengembangan Pemanfaatan Lahan Rawa/Gambut Terpadu merupakan kegiatan baru sehingga petugas dinas Provinsi dan kabupaten memerlukan waktu untuk mempelajari.
 - b. Rekomendasi teknis dari BPTP belum memperhitungkan *unit cost*, sehingga ketika dalam pelaksanaan di lapangan tidak dapat dilaksanakan 100% sama, namun disesuaikan dengan *unit cost* yang tersedia.
 - c. Pada pertengahan pelaksanaan kegiatan, terjadi revisi DIPA karena terbitnya kebijakan pemerintah untuk melaksanakan penghematan anggaran, sehingga pencairan anggaran sempat terhambat.

4. Kendala Kegiatan Pra Sertifikasi Lahan Pertanian
 - a. Petugas Distan Provinsi dan Kabupaten masih fokus melaksanakan/mendahulukan pelaksanaan kegiatan Perluasan Sawah TA. 2017, terutama 3 (tiga) Provinsi dengan alokasi kegiatan Prasertifikasi cukup besar juga mendapatkan alokasi kegiatan Perluasan Sawah yaitu Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat dan Sumatera Selatan), sehingga dalam pelaksanaan kegiatannya, petugas daerah lebih mendahulukan pelaksanaan alokasi kegiatan yang bersifat fisik seperti kegiatan Perluasan Sawah.
 - b. Sasaran kegiatan Prasertifikasi Lahan Pertanian TA. 2017 hanya ditujukan mendukung sektor Tanaman Pangan, sedangkan potensi lahan calon lokasi prasertifikasi adalah lokasi yang mendukung perkebunan. Hal ini cukup membuat petugas daerah kesulitan dalam mendapatkan CPCL-nya.
 - c. Tidak semuanya lahan sawah hasil kegiatan perluasan sawah TA. 2017 dapat diprasertifikasikan, karena merupakan lahan area transmigrasi dan tanah ulayat/desa



- d. Adanya program sejenis dari BPN untuk mendukung program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap) yang ditargetkan 126 juta bidang tanah tersertifikasi pada 2025 dimana di dalamnya sudah melingkupi kegiatan pra sertifikasi. Dalam rangka menghindari double counting maka anggaran prasertifikasi dari Kementan tidak digunakan walaupun terealisasi secara fisik.
- e. Masyarakat keberatan dengan kegiatan prasertifikasi pada tahun berjalan karena daftar nominatif petani dan lokasi tahun-tahun sebelumnya belum disertifikasi oleh BPN.
- f. Terdapat beberapa kendala yang umumnya dihadapi di daerah yaitu sebagai berikut:
 - (i) Petani masih belum memiliki berkas administrasi bukti kepemilikan
 - (ii) Sebagian petani telah mengikuti program Prona atau PTSL dari BPN setempat
 - (iii) Di sebagian daerah, BPN setempat hanya mendapat alokasi PTSL yang lebih kecil dari alokasi prasertifikasi
 - (iv) Lahan calon lokasi terindikasi lahan perkebunan, sehingga pemilik ragu untuk ikut
 - (v) Pemilik lahan banyak berdomisili di luar kecamatan, sehingga petugas kesulitan menemui pemilik lahan

6.1.2. Kegiatan Direktorat Irigasi Pertanian

1. Kendala Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier dan Pengembangan Irigasi Rawa
 - a. Adanya revisi dan realokasi kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi dan Pengembangan Irigasi Rawa antar kabupaten.
 - b. Ketidaksiapan calon lokasi karena tidak dengan kriteria yang dipersyaratkan dalam pedoman teknis sehingga perlu direalokasi.
 - c. Dengan adanya keterkaitan antara pelaksanaan kegiatan dan faktor iklim serta perubahan musim tanam, menyebabkan

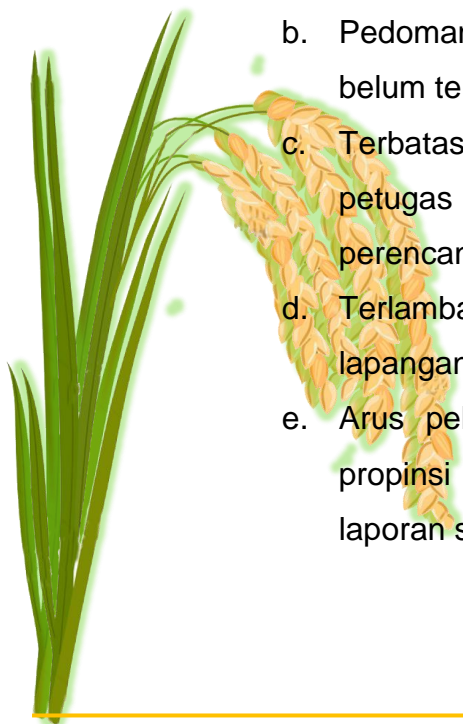
tertundanya dan terlambatnya dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Karena umumnya pelaksanaan kegiatan dilaksanakan menunggu setelah panen.

- d. Adanya perubahan struktur organisasi/SOTK dan mutasi petugas daerah, sehingga memerlukan perubahan SK Pengelola dan pengadministrasian lainnya yang mengakibatkan pelaksanaan kegiatan mengalami keterlambatan.
- e. Perbedaan Pemahaman pedoman teknis kegiatan pada beberapa daerah memperlambat jadwal kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya.
- f. Laporan yang disampaikan oleh daerah, pada umumnya tidak menginformasikan manfaat (benefit) sesudah dilaksanakan kegiatan dan juga laporan teknis serta dokumentasi kegiatan. Data ini sebenarnya sangat penting didalam upaya untuk evaluasi kebijakan selanjutnya.

2. Kendala Kegiatan Irigasi Perpipaian/Perpompaan

•Kendala Teknis

- a. Terbatasnya database lokasi yang memerlukan pengembangan irigasi perpompaan/perpipaan.
- b. Pedoman Teknis, Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis belum tersosialisasi dengan baik.
- c. Terbatasnya kemampuan kelompok penerima bantuan dan petugas Dinas Propinsi/Kabupaten untuk melakukan perencanaan dan desain kegiatan.
- d. Terlambatnya transfer dana bantuan sehingga kegiatan fisik di lapangan tidak dapat dilaksanakan tepat waktu.
- e. Arus pelaporan dari daerah baik dari kabupaten maupun propinsi belum berjalan optimal, meskipun sudah tersedia laporan secara online.



- Kendala Administrasi
 - a. Adanya perubahan struktur organisasi beberapa satker di daerah berdampak pada perubahan pejabat KPA dan PPK.
 - b. Adanya revisi POK antar kabupaten dari beberapa propinsi.
 - c. Propinsi Pelaksana kegiatan menunda proses pengajuan dokumen Banpem.
 - d. Masih ada Kelompok Tani yang melakukan transfer dana secara 2 (dua) tahap karena kurangnya pemahaman Petugas dalam memahami Pedoman Teknis dan menyelesaikan dokumen administrasi bantuan pemerintah.

- 3. Kendala Kegiatan Pengembangan Embung/Dam Parit/Long Storage
 - a. Kurangnya koordinasi antara Dinas Pertanian Propinsi dan Dinas Pertanian Kabupaten menyebabkan kegiatan di kabupaten tidak dapat dilaksanakan dengan realisasi 100%.
 - b. Keterbatasan jumlah SDM yang menangani kegiatan di daerah menyebabkan realisasi pelaksanaan keuangan dan fisik belum memenuhi target 100%
 - c. Sebagian daerah tidak menyediakan dana untuk pelaksanaan verifikasi lokasi dan kekurangan jumlah petugas/personil untuk melakukan verifikasi lokasi.
 - d. Perbedaan Pemahaman mekanisme pelaksanaan kegiatan yang terdapat dalam Pedoman teknis kegiatan pada beberapa daerah memperlambat jadwal kegiatan sesuai dengan rencana awal.

6.1.3. Kegiatan Direktorat Alat dan Mesin Pertanian

1. Kendala Administrasi
 - a. Penyelesaian pembayaran tagihan tunda bayar kegiatan anggaran tahun 2016 yang dibayarkan pada tahun 2017.

- b. Masih lemahnya sistem pengendalian dan pengawasan terhadap pelaku kegiatan di daerah.
 - c. Keterlambatan dalam penyampaian Berita Acara Serah Terima (BAST) Alsintan dari Dinas Pertanian Kabupaten/Kota ke Poktan/Gapoktan/UPJA yang disampaikan ke Direktorat Alat dan Mesin Pertanian.
2. Kendala Teknis
- a. Keterbatasan petugas pelaksana kegiatan, secara kuantitas maupun kualitas pada tingkat kabupaten dan provinsi.
 - b. Keterlambatan dalam menetapkan calon lokasi dan kelompok tani penerima kegiatan di beberapa daerah yang disebabkan kesulitan dalam memilih lokasi dan petani yang sesuai dengan pedoman teknis.

6.1.4. Kegiatan Direktorat Pembiayaan Pertanian

1. Kendala Kegiatan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)
- a. Kurangnya sosialisasi dan komunikasi dari petugas pertanian dan petugas PT. Jasindo terutama di tingkat petani/peternak Tidak adanya dana operasional di Propinsi/Kabupaten/Kota untuk mengawal program asuransi pertanian.
 - b. Publikasi yang sarasannya petani/peternak dan masyarakat umumnya masih kurang, sehingga pemahaman terhadap manfaat asuransi pertanian juga masih kurang.
 - c. Petani yang merasa lahannya aman dari risiko, masih enggan menjadi peserta asuransi dan kemauan petani untuk membayar premi swadaya 20% masih rendah.
 - d. Penerbitan polis dan pembayaran klaim banyak mengalami keterlambatan.
 - e. Penetapan DPD AUTP dan AUTS tingkat kabupaten dan pengirimannya ke tingkat lebih tinggi belum dilakukan secara periodik.



- f. Jumlah SDM PT Jasindo di tingkat lapangan masih terbatas padahal sebaran dan jangkauan wilayah asuransi pertanian sangat luas.
 - g. Petugas Propinsi/Kabupaten Kota belum memfokuskan program asuransi pertanian sebagai program utama
Petugas Propinsi/Kabupaten Kota belum memfokuskan program asuransi pertanian sebagai program utama.
2. Kendala Kegiatan Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS)
- a. Dukungan Dinas Kab/Kota yang menangani fungsi peternakan dan keswan sangat bervariasi dan dukungan tenaga kesehatan hewan belum optimal.
 - b. Kurangnya sosialisasi sampai tingkat target sasaran peternak sapi.
 - c. Tidak adanya dana operasional di Propinsi/Kabupaten/Kota untuk mengawal pelaksanaan asuransi usaha ternak sapi.
 - d. Terbatasnya petugas Dinas Peternakan dan PT. Jasindo dalam pelaksanaan AUTS terutama kemampuan dalam pemasangan eartag.
3. Kendala Kegiatan Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS)
- a. Luas kepemilikan lahan pertanian yang kecil dan petani kebanyakan merupakan petani gurem.
 - b. Belum terakomodirnya masa tenggang waktu (grace period) untuk pengembangan usaha di sektor peternakan dan perkebunan, yang nantinya akan berpengaruh terhadap pengembalian kredit.
Dukungan Dinas Kab/Kota yang menangani fungsi peternakan dan keswan sangat bervariasi dan dukungan tenaga kesehatan hewan belum optimal.
 - c. Adanya program kredit sejenis yang dikeluarkan oleh Bank dengan bunga yang lebih rendah
Kurangnya sosialisasi sampai tingkat target sasaran peternak sapi.



- d. Kodefikasi terhadap usaha tani yang tersedia dalam sistim SKP relative sempit, sehingga pengelompokan usaha tani dari calon debitur dimasukkan dalam sektor perdagangan.

6.1.5. Kegiatan Direktorat Pupuk dan Pestisida

1. Kendala Penyaluran Pupuk Bersubsidi
 - a. Perencanaan subsidi pupuk tidak menggunakan HPP yang mendekati riil
 - b. Petunjuk pelaksanaan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi kurang memadai
 - c. Pemerintah daerah terlambat menetapkan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi dan tidak menindaklanjuti realokasi kebutuhan pupuk bersubsidi.

2. Kendala Pengawasan Pupuk dan Pestisida
 - a. Koordinasi antar instansi terkait maupun dengan stake holders lain belum optimal.
 - b. Belum optimalnya peran pengawasan oleh Komisi Pengawasan pupuk dan Pestisida (KPPP) dan PPNS di daerah karena ditemukan berbagai kasus penyimpangan dalam penyediaan dan distribusi pupuk subsidi.
 - c. Penerapan sanksi hukum yang diberikan pada pelaku penyimpangan pupuk dan pestisida belum optimal.
 - d. Sosialisasi tentang pupuk dan pestisida yang terdaftar belum optimal.
 - e. Kesulitan dalam mengelola/memusnahkan stok pestisida yang tidak layak pakai (ilegal, palsu, kadaluwarsa).
 - f. Petugas pengawas, KP3 dan PPNS pupuk dan pestisida belum dapat bekerja secara optimal.
 - g. Penyimpangan-penyimpangan yang sering terjadi pada pupuk adalah peredaran pupuk palsu, penyaluran pupuk bersubsidi ke yang bukan peruntukannya.



- h. Penyimpangan-penyimpangan yang sering pada pestisida yaitu peredaran pestisida yang telah habis masa berlaku izin pendaftaran, pestisida yang telah diperpanjang izinnya tetapi di lapangan masih beredar dengan izin lama, pelanggaran label dengan memperluas sasaran penggunaan yang tidak sesuai dengan izin pendaftaran, pestisida palsu, pewadahan kembali, penjualan bebas pestisida terbatas, penggunaan pestisida terbatas oleh petani/pengguna yang tidak bersertifikat.

6.1.6. Kegiatan Sekretariat Direktorat

1. Dokumen perencanaan anggaran (POK) mengalami revisi, sehingga jadwal pelaksanaan kegiatan mundur.
2. Kurangnya pemahaman pelaksana kegiatan terhadap Penetapan Kinerja yang telah ditetapkan.

6.2. TINDAK LANJUT

Permasalahan yang dihadapi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dalam melaksanakan kegiatan ini antara lain:

6.2.1. Kegiatan Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan

1. Tindak Lanjut Kegiatan Perluasan Sawah
 - a. Aspek perencanaan (SID) sangat menentukan keberhasilan kegiatan perluasan sawah. Untuk itu Dinas Pertanian agar lebih cermat dalam melakukan perencanaan dan memeriksa kembali hasil SID, apabila hasilnya meragukan agar direview lagi. SID yang tidak sesuai dengan kondisi lapang jangan dieksekusi.
 - b. Kegiatan perluasan sawah diharapkan dapat menambah luas baku lahan sawah dan sekaligus sebagai penyeimbang laju alih fungsi lahan yang semakin marak.
 - c. Perlu dipetakan potensi wilayah yang dapat dikembangkan untuk penambahan luas baku lahan pertanian dengan



memperhatikan aspek komoditas unggulan yang akan dikembangkan, sumberdaya manusia, budaya serta infrastruktur penunjang.

- d. Perlu peningkatan kemampuan Sumberdaya Manusia yang menangani perluasan sawah baik dalam bidang teknis maupun administrasi.
- e. Pengertian luasan yang dihitung adalah luasan termasuk di dalamnya kegiatan pendukung yang masuk dalam satu hamparan.
- f. Dalam rangka pemanfaatan lahan yang telah dicetak agar tidak menyemak kembali, pada lahan tersebut dapat ditanami palawija sambil menunggu musim tanam padi.
- g. Enam tepat keberhasilan perluasan sawah adalah sebagai berikut:
 - (i) Tepat lokasi
SID valid dan akurat, lokasi clear & clean, lokasi bukan kawasan hutan dan HGU, sumber air terjamin, ada petani penggarap, kesesuaian lahan untuk tanaman padi.
 - (ii) Tepat volume/jumlah
Luasan lahan tercetak sesuai target/ sasaran yang di tetapkan, luas lahan yang tercetak telah diverifikasi oleh Timwas/PPHP (Cq. Tracking).
 - (iii) Tepat kualitas
Permukaan lahan telah bersih dari vegetasi dan tunggul (land clearing), permukaan lahan telah rata (land levelling), sudah ada pematang/ galengan, sudah ada saluran tersier dan jalan usaha tani, sudah olah tanah sehingga lahan menjadi siap tanam, sawah yang sudah sempurna dan siap tanam diikutkan sebagai peserta asuransi pertanian.
 - (iv) Tepat waktu
Pekerjaan selesai sebelum kontrak jatuh tempo, lahan segera di tanami setelah status lahan siap tanam.
 - (v) Tepat administrasi



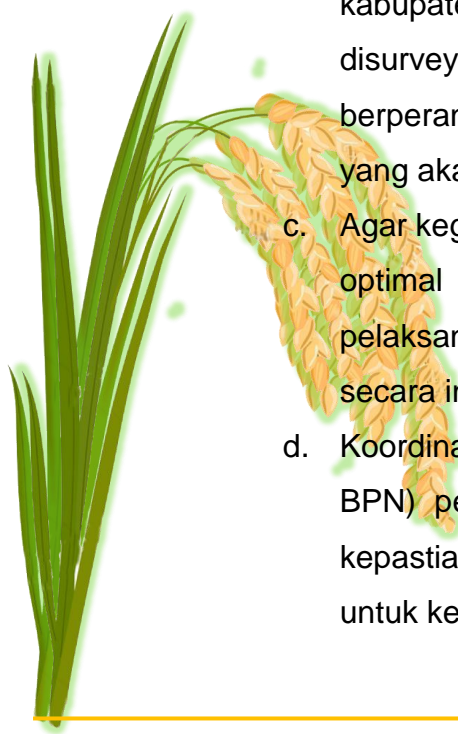
Tepat dalam menyusun rencana anggaran biaya (RAB), taat pada aturan/ perundang undangan, dokumen pendukung lengkap, valid, berurutan.

(vi) Tepat tujuan/sasaran

Sawah yang telah di cetak memproduksi padi secara berkelanjutan, sawah yang di cetak tidak terjadi alih fungsi lahan, luas tambah tanam (LTT) di daerah tersebut meningkat.

2. Tindak Lanjut Kegiatan SID Perluasan Sawah

- a. Lokasi-lokasi yang dimasukan dalam kegiatan SI CPCL haruslah lokasi yang telah diidentifikasi oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota. Proses identifikasi diantaranya, pengambilan titik koordinat dan polygon, overlay dengan peta kawasan hutan, peta tata ruang, peta sawah eksisting dan peta-peta lainnya yang terkait. Pada proses ini juga dilakukan identifikasi terhadap ketersediaan air.
- b. Agar pelaksanaan kegiatan SI CPL dan desain dapat berjalan secara optimal maka keterlibatan pihak dinas kabupaten/kota harus dilakukan secara intensif. Karena pihak dinas pertanian kabupaten/kota lebih menguasai kondisi wilayah yang akan disurvei. Pihak dinas pertanian kabupaten/kota juga dapat berperan sebagai pembuka akses ke masyarakat dan lokasi yang akan disurvei.
- c. Agar kegiatan SI CPCL dan Desain dapat dilaksanakan secara optimal dan mencapai target yang diinginkan, maka pelaksanaan sosialisasi ke pihak-pihak terkait dilakukan secara intensif.
- d. Koordinasi dengan instansi terkait (dinas kehutanan, Bappeda, BPN) penting dilakukan dalam rangka untuk mendapatkan kepastian status clean dan clearnya lokasi yang diusulkan untuk kegiatan perluasan sawah.



3. Tindak Lanjut Kegiatan Pengembangan Pemanfaatan Lahan Rawa/Gambut Terpadu

- a. Sosialisasi dan pembinaan yang lebih intensif kepada petugas Dinas dan kelompok tani penerima manfaat.
- b. Komponen kegiatan yang biayanya melebihi unit cost dapat dikurangi, disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.
- c. Untuk mengatasi keterbatasan ketersediaan bahan organik, dapat diatasi dengan pengembangan pembuatan kompos oleh petani untuk memenuhi kebutuhan pupuk organik.
- d. Dukungan APBD dan swadaya kelompok tani untuk mendukung terlaksananya kegiatan Pengembangan Pemanfaatan Lahan Rawa/Gambut Terpadu.
- e. Mempercepat proses revisi DIPA sehingga pelaksanaan kegiatan tidak terhambat terlalu lama.

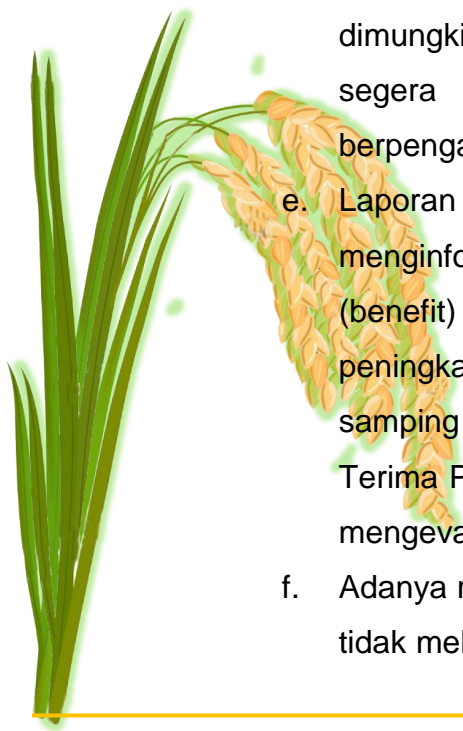
4. Tindak Lanjut Kegiatan Prasertifikasi Lahan Pertanian

- a. Sosialisasi kegiatan prasertifikasi di tingkat pusat dan daerah perlu dilakukan secara lebih intensif
- b. Di tingkat pusat Dit. PPL telah berkoordinasi dengan BPN pusat terkait PTSL. Dinas pertanian provinsi dan Kabupaten perlu berkoordinasi sejak awal dengan pihak Kantor Pertanahan agar kedepannya kegiatan prasertifikasi dapat disinkronkan dengan PTSL.
- c. Melakukan pemantauan ke daerah secara intensif khususnya daerah yang realisasi fisik dan keuangannya masih rendah agar daerah segera melakukan percepatan pelaksanaan fisik dan pencairan anggaran.
- d. Melakukan koordinasi dengan BPN pusat dan pokja di daerah agar daftar nominatif tahun-tahun sebelumnya dapat disertifikasi.



6.2.2. Kegiatan Direktorat Irigasi Pertanian

1. Tindak Lanjut Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier dan Pengembangan Irigasi Rawa
 - a. Pelaksanaan kegiatan disarankan agar mengikuti jadwal seperti yang ditetapkan dalam Pedoman teknis, sehingga pelaksanaan konstruksi rehab jaringan tidak mengganggu jadwal tanam.
 - b. Pembinaan, bimbingan dan monitoring oleh petugas Pusat ke Daerah baik kepada pelaksana kegiatan, petugas lapangan maupun petani dilaksanakan lebih intensif sehingga pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kriteria teknis dan administrasi yang telah ditetapkan.
 - c. Dokumen pengadministrasian kegiatan dengan mekanisme bantuan sosial harus benar-banar diperhatikan sehingga ketidaklengkapan/ketidaksesuaiin dokumen dapat dihindarkan. Apabila kondisi di lapangan tidak bisa sesuai dengan desain/ RUKK yang telah disusun diharapkan sesegera mungkin melakukan revisi pada desain dan RUKK tersebut sesuai dengan kondisi fisik yang dilaksanakan di lapangan.
 - d. Diharapkan kabupaten/kota dapat segera menyampaikan kendala di lapangan kepada Propinsi dan Pusat. Apabila dimungkinkan untuk melakukan revisi, Dinas Propinsi dapat segera mengusulkan revisi atau realokasi ke Pusat tanpa berpengaruh terhadap keterlambatan dalam pelaksanaannya.
 - e. Laporan yang disampaikan hendaknya dapat menginformasikan jenis dan volume pekerjaan, manfaat (benefit) serta kontribusi adanya kegiatan rehabilitasi terhadap peningkatan produksi beserta dokumentasi kegiatan. Di samping itu laporan dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan . Dokumen ini sangat penting dalam upaya mengevaluasi untuk merumuskan kebijakannya selanjutnya.
 - f. Adanya revisi/realokasi DIPA/POK serta laporan daerah yang tidak melaksanakan kegiatan ini, akan dijadikan pertimbangan



untuk menyusun kebijakan Pengembangan Jaringan Irigasi di lokasi tersebut di masa yang akan datang. Selain itu CPCL dan SID dapat dipersiapkan sebelum tahun anggaran dimulai sehingga revisi maupun daerah yang tidak melaksanakan pekerjaan dapat diminimalkan dengan adanya perencanaan awal yang matang sesuai dengan kriteria teknis yang telah ditetapkan. Adanya revisi dan realokasi kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi dan Pengembangan Irigasi Rawa antar kabupaten.

2. Tindak Lanjut Kegiatan Irigasi Perpipaan/Perpompaan

• Tindak Lanjut Teknis

- a. Masing-masing kabupaten/kota perlu T-1 melakukan identifikasi lokasi/survey lokasi yang membutuhkan kegiatan pengembangan sumber air.
- b. Pembinaan dan pengawalan oleh KPA dan PPK lebih intensif kepada Tim Teknis dan penerima bantuan.
- c. Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak pengelola sumber daya air dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.
- d. Tim Teknis/Korlap yang ditetapkan oleh daerah perlu memahami tugas dan tanggung jawabnya dalam membantu kelompok penerima bantuan dalam penyusunan RUKK, RAB dan pelaksanaan fisik di lapangan.
- e. Tim pelaporan Propinsi dan Kabupaten seyogyanya dapat melaporkan realisasi pelaksanaan kegiatan baik secara keuangan dan fisik melalui MPO serta melalui email agar dapat termonitor dengan cepat dan jika terjadi permasalahan, dapat segera dicari solusinya di lapangan.

• Tindak Lanjut Administrasi

- a. Daerah perlu mempercepat kelengkapan Satker, sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan.



- b. Perlu segera ditetapkan calon penerima kegiatan oleh PPK dan KPA sesuai alokasi kegiatan dalam DIPA ataupun revisi POK.
 - c. Percepatan melengkapi dokumen administrasi pencairan dana bantuan pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku.
 - d. Peningkatan pengawalan, pembinaan dan pengendalian kepada petugas dan penerima bantuan serta mengidentifikasi permasalahan dan mencari solusinya sejak dini.
3. Tindak Lanjut Kegiatan Pengembangan Embung/Dam Parit/Long Storage
- a. Melaksanakan koordinasi dan bimbingan teknis secara intensif kepada propinsi dan kabupaten sebagai pelaksana kegiatan.
 - b. Memberikan usulan kepada Dinas Pertanian Propinsi dan Kabupaten agar dapat mengoptimalkan jumlah dan kemampuan petugas yang menangani kegiatan
 - c. Agar daerah dapat menyiapkan data CPCL yang memenuhi syarat sesuai dengan syarat teknis sebagaimana dalam Pedoman Teknis.
 - d. Agar daerah memahami mekanisme pelaksanaan kegiatan lebih awal sebelum kegiatan dilaksanakan, sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan.

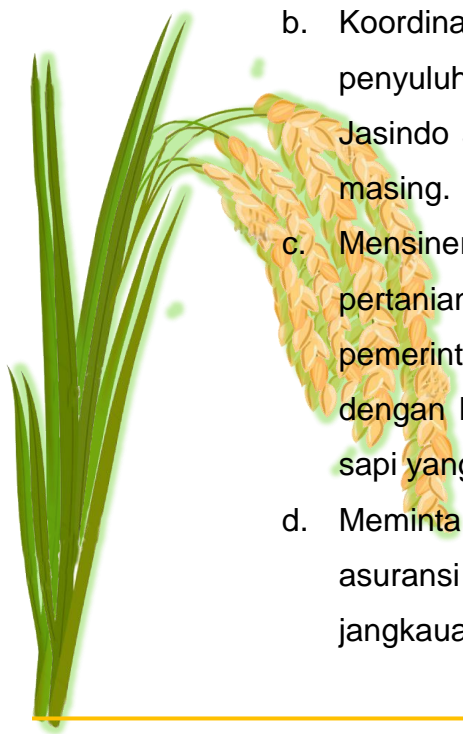
6.2.3. Kegiatan Direktorat Alat dan Mesin Pertanian

- 1. Aspek Administratif
 - a. Percepatan pelaksanaan pembayaran tunda bayar Tahun 2016 yang akan dibayarkan di 2017 kepada penyedia Alsintan dengan dilampiri hasil verifikasi dari APIP Kementan jika penundaan pembayaran antara Rp 200 juta – Rp 2 M, verifikasi dari BPKP apabila bernilai > Rp 2 M.
 - b. Percepatan proses pengadaan Alsintan Tahun 2017 di bulan Januari 50% sudah selesai dilaksanakan.

- c. Koordinasi dengan Dinas Pertanian Kab/Kota untuk melakukan percepatan penyampaian BAST dari Distan Kab/Kota ke Poktan/Gapoktan/UPJA.
 - d. Mengoptimalkan sistem pengendalian untuk dapat mengidentifikasi permasalahan dan solusinya sejak dini.
2. Aspek Teknis
- a. Penambahan petugas pelaksana kegiatan alsintan, baik di Dinas Pertanian Provinsi maupun Kabupaten.
 - b. Dalam pembinaan ke daerah menekankan agar identifikasi calon petani dan calon lokasi dapat dilakukan pada tahun sebelumnya sehingga proses penyelesaian administrasi kegiatan dapat dipercepat.

6.2.4. Kegiatan Direktorat Pembiayaan Pertanian

1. Tindak Lanjut Kegiatan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)
- a. Melakukan sosialisasi dan komunikasi sampai tingkat petani/peternak perlu dilakukan lebih intensif baik secara langsung dengan petani, maupun melalui media cetak dan media elektronik.
 - b. Koordinasi lebih intensif antara petugas Dinas kabupaten/kota, penyuluh, POPT serta Petugas Peternakan dengan PT. Jasindo agar memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing.
 - c. Mensinergikan AUTP dengan program Kementan seperti irigasi pertanian, bantuan alsintan, bantuan benih, jarwo dan program pemerintah daerah. Begitu pula program AUTS disinergikan dengan kegiatan SIWAB (Sapi Indukan Wajib Bunting), agar sapi yang sedang bunting dilindungi dari risiko sakit/mati.
 - d. Meminta PT Jasindo untuk menambah SDM yang menangani asuransi pertanian di tingkat lapangan, mengingat sebaran dan jangkauan lokasi AUTP dan AUTS sangat luas.



- e. Perlu pengembangan sistem/aplikasi dalam pelaksanaan AUTP dan AUTS sehingga mempermudah monitoring dan verifikasi.
 - f. Mendorong Dinas Pertanian Propinsi maupun kabupaten untuk menambah petugas pelaksana program AUTP
 - g. Meningkatkan sosialisasi melalui media cetak, elektronik dan sosialisasi langsung melalui pertemuan sampai tingkat desa.
2. Tindak Lanjut Kegiatan Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS)
- a. Pelaksanaan fasilitasi AUTS sinergi dengan Upaya Khusus Sapi Wajib Bunting (UPSUS SIWAB).
 - b. Lokasi AUTS dapat disesuaikan dengan Ternak Sapi akseptor UPSUS SIWAB pada daerah-daerah prioritas sentra ternak sapi
 - c. Prioritas ternak-ternak bantuan pemerintah baik APBN/APBD I dan II
 - d. Peningkatan koordinasi dan kerjasama antara PT. Jasindo dengan Dinas Kabupaten/Kota dan Dinas Provinsi dalam pencapaian target AUTS bersinergi dengan SMDWP/Manajer SPR, Inseminator dan Medik, Para Medik sebagai tenaga lapangan.
 - e. Mengusulkan dana operasional di Propinsi/Kabupaten/Kota untuk mengawal program asuransi ternak sapi di TA. 2017Melakukan sosialisasi dan komunikasi sampai tingkat petani/peternak perlu dilakukan lebih intensif baik secara langsung dengan petani, maupun melalui media cetak dan media elektronik.
3. Tindak Lanjut Kegiatan Kredit Usaha Rakyat (KUR)
- a. Koordinasi kredit program dan fasilitasi pembiayaan. Koordinasi ini dilaksanakan melibatkan instansi terkait seperti Ditjen Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan

peternakan, PSE-KP dan Kementerian Perekonomian dalam rangka penyusunan rencana biaya indikatif komoditas pertanian untuk KUR TA. 2017 dan persiapan usulan skema kredit komoditas pertanian untuk TA.2018.

- b. Koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka akselerasi KUR. Koordinasi ini dilaksanakan dengan instansi terkait seperti perbankan (Bank BRI, BNI dan Mandiri), Bank Indonesia dan OJK dalam mempersiapkan pelaksanaan kegiatan pembekalan Fasilitator Pembiayaan Petani Swadaya (FPPS).
- c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan KUR sektor pertanian ke Propinsi Sulawesi Tenggara, NTB, Sumatera Utara dan Jawa Barat.
- d. *Focus Group Discussion* (FGD) KUR di Bandung. FGD ini dilaksanakan untuk memonitor dan mengevaluasi penyaluran KUR sektor pertanian di Propinsi Jawa Barat dan mengupayakan strategi peningkatan penyaluran KUR. Pelaksanaan fasilitasi AUTS sinergi dengan Upaya Khusus Sapi Wajib Bunting (UPSUS SIWAB).

6.2.5. Kegiatan Direktorat Pupuk dan Pestisida

1. Tindak Lanjut Penyaluran Pupuk Bersubsidi

- a. Perlu dibangunnya koordinasi antar Dinas Pertanian terkait dengan Lembaga Penyuluh baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam pengawalan perencanaan kebutuhan pupuk melalui penyusunan RDKK, pengawalan penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dengan skala prioritas pada wilayah/kondisi pertanaman/kebutuhan untuk masing-masing komoditas.
- b. Perlu dorongan untuk mengoptimalkan peran Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai wadah koordinasi Satuan Kerja Dinas

dan stakeholder (produsen dan lembaga terkait) dalam pengawalan penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi di masing-masing wilayah.

- c. Perlu disepakatinya rencana kebutuhan pupuk yang berbasis RDKK yang menjadi salah satu pertimbangan dalam pengalokasian kebutuhan pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian per provinsi per subsektor.
- d. Telah dilakukannya kerjasama dengan BPKP untuk mereview HPP pupuk bersubsidi usulan produsen, selanjutnya perhitungan subsidi pupuk menggunakan HPP hasil review BPKP.
- e. Dasar penyediaan pupuk bersubsidi di daerah cukup dengan penerbitan Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Peraturan Walikota.

2. Tindak Lanjut Penyaluran Pupuk Bersubsidi

- a. Menyusun Kepmentan tentang Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Pusat
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan pupuk dan pestisida secara optimal dan intensif baik oleh pengawas pusat, pengawas provinsi dan pengawas kabupaten/kota serta instansi yang berkompeten di bidang pengawasan pupuk dan pestisida, dengan mendalami dan mencermati ketentuan-ketentuan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pupuk dan pestisida.
- c. Peran aktif Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dalam penyempurnaan database RDKK, melalui pertemuan secara rutin dengan produsen pupuk dan kelembagaan penyuluhan guna menyusun RDKK sehingga penyaluran pupuk bersubsidi sesuai data riil dan dapat dipersiapkan lebih awal dan akurat.
- d. Untuk mengatasi stok pestisida yang tidak layak pakai yang ada di gudang Dinas Pertanian, perlu dikoordinasikan dengan



- Bapedalda setempat dalam pelaksanaan pemusnahannya agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- e. Dalam menangani kasus-kasus pupuk dan pestisida ditingkat lapang perlu dukungan dan peran aktif Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Provinsi maupun Kabupaten/Kota serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagai ujung tombak di lapangan. Sehingga terjalin koordinasi antar pemerintah pusat, daerah, stakeholder dan masyarakat dalam merumuskan langkah-langkah operasional pelaksanaan pengawasan pupuk dan pestisida.
 - f. Melakukan perbaikan dan menyempurnakan sistim pengawasan sekaligus membentuk dan mengefektifkan pelaksanaan tugas pengawas di provinsi dan kabupaten/kota.
 - g. Meningkatkan kemampuan dan memberdayakan PPNS secara maksimal serta peningkatan kerjasama antara kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dalam penegakan hukum di Indonesia.
 - h. Mengoptimalkan kinerja KP3, PPNS dan meningkatkan koordinasi antara pusat, provinsi, dengan KP3 kabupaten/kota sesuai tugas, fungsi dan wewenangnya serta mendorong terbentuknya KP3 di provinsi dan kabupaten/kota.

6.2.6. Kegiatan Sekretariat Direktorat

1. Meningkatkan pemahaman SDM lingkup Setditjen terhadap pelaksanaan kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal sebagaimana tertuang dalam Penetapan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.
2. Melakukan pemantauan secara intensif terhadap dokumen perencanaan yang di revisi, dan membuat jadwal untuk pelaksanaan seluruh kegiatan Sekretariat Direktorat Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian.

BAB V PENUTUP

Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian TA. 2017 merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. Di dalam Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian TA. 2017 telah diuraikan secara garis besar pelaksanaan kegiatan utama dan pokok prasarana dan sarana pertanian (Perluasan dan Pengembangan Lahan, Pengelolaan Air Irigasi, Pembiayaan, Pupuk dan Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian serta Pelayanan dan Koordinasi) selama kurun waktu satu tahun anggaran sampai dengan 31 Desember 2017.

Dengan berbagai keterbatasan dan kendala, sasaran dan tujuan program/kegiatan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang telah ditetapkan masih belum sepenuhnya tercapai. Diharapkan dalam pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana pertanian tahun mendatang dipandang perlu mengoptimalkan dan mengambil langkah-langkah operasional yang lebih efektif dan efisien seperti peningkatan dan pemanfaatan sumber daya yang tersedia (Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam dan Dana).

Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian TA. 2017 merupakan suatu bahan evaluasi dan referensi bagi *stakeholders* untuk meningkatkan keberhasilan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pertanian pada tahun-tahun yang akan datang.



Lampiran 1.

**REALISASI ANGGARAN BELANJA MENURUT JENIS BELANJA
DITJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2017
31 Desember 2017**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT ORGANISASI : DITJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
NOMOR DIPA : DIPA-018.08-0/2017

KODE	URAIAN	RINCIAN ANGGARAN BELANJA AWAL T.A. 2017 (Rp.000)											
		BELANJA PEGAWAI			BELANJA BARANG			BELANJA MODAL			JUMLAH		
		51			52			53					
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	* Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
08	DITJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN												
	SATKER PUSAT **)	24.318.282	23.179.898,79	95,32	4.507.625.556	3.582.682.477,42	79,48	4.308.800	5.982.700,75	138,85	4.536.252.638	3.611.845.076,953	79,62
	DEKONSENTRASI	-			390.269.170	384.781.233,20	98,59	-			390.269.170	384.781.233,201	98,59
	TUGAS PEMBANTUAN	-			2.164.875.470	2.365.650.715,31	109,27	-	-	-	2.164.875.470	2.365.650.715,313	109,27
	JUMLAH	24.318.282	23.179.898,79	95,32	7.062.770.196	6.333.114.425,93	89,67	4.308.800	5.982.700,75	138,85	7.091.397.278	6.362.277.025,47	89,72

KODE	URAIAN	RINCIAN ANGGARAN BELANJA Self-Blocking T.A. 2017 (Rp.000)											
		BELANJA PEGAWAI			BELANJA BARANG			BELANJA MODAL			JUMLAH		
		51			52			53					
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	* Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
08	DITJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN												
	SATKER PUSAT **)	24.318.282	23.179.898,79	95,32	3.807.341.645	3.582.682.477,42	94,10	7.136.689	5.982.700,75	83,83	3.838.796.616	3.611.845.076,953	94,09
	DEKONSENTRASI	-			410.606.239	384.781.233,20	93,71	-			410.606.239	384.781.233,201	93,71
	TUGAS PEMBANTUAN	-			2.676.695.995	2.365.650.715,31	88,38	-	-	-	2.676.695.995	2.365.650.715,313	88,38
	JUMLAH	24.318.282	23.179.898,79	95,32	6.894.643.879	6.333.114.425,93	91,86	7.136.689	5.982.700,75	83,83	6.926.098.850	6.362.277.025,47	91,86

Lampiran 1. (lanjutan)

**PERKEMBANGAN PAGU ANGGARAN DAN REALISASI KEUANGAN
SATKER DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN TAHUN 2017**

NO	KEGIATAN	PAGU	REALISASI per 22 Desember	%	REALISASI per 31 Desember	%
1	Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian	1794 352.076.836.000	350.049.927.892	99,42	349.758.580.242	99,34
2	Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian	1795 1.788.005.840.000	1.435.668.667.372	80,29	1.508.319.740.485	84,36
3	Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian	1796 3.719.570.697.000	3.043.605.428.071	81,83	3.623.582.763.882	97,42
4	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	1797 796.463.057.000	600.791.255.871	75,43	623.474.115.843	78,28
5	Fasilitas Pupuk dan Pestisida	3993 82.028.460.000	70.005.712.175	85,34	76.151.425.874	92,84
6	Fasilitasi Pembiayaan Pertanian	3994 187.953.960.000	179.982.312.348	95,76	180.990.399.141	96,30
	TOTAL	6.926.098.850.000	5.680.103.303.729	82,01	6.362.277.025.467	91,86

Lampiran 1. (lanjutan)

**PERKEMBANGAN PAGU ANGGARAN DAN REALISASI KEUANGAN
PER-PROVINSI DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA
PERTANIAN TAHUN 2017**

(Rp. 000)

NO	NAMA SATKER	* ANGGARAN	%	REALISASI per 31 Desember	%
1	DKI JAKARTA	3.838.796.616	78,76	3.611.845.077	94,09
2	JAWA BARAT	110.662.987	92,13	102.149.440	92,31
3	JAWA TENGAH	143.098.138	90,57	130.567.636	91,24
4	DI. YOGYAKARTA	9.006.350	95,16	8.785.636	97,55
5	JAWA TIMUR	144.548.540	97,27	141.106.368	97,62
6	ACEH	156.467.114	84,69	135.740.584	86,75
7	SUMATERA UTARA	66.505.656	88,13	61.475.014	92,44
8	SUMATERA BARAT	46.188.678	87,49	41.575.874	90,01
9	RIAU	26.118.100	87,82	23.635.129	90,49
10	JAMBI	75.235.030	88,17	70.765.563	94,06
11	SUMATERA SELATAN	379.130.993	90,18	339.953.976	89,67
12	LAMPUNG	204.015.822	95,34	196.616.836	96,37
13	KALIMANTAN BARAT	185.426.021	65,08	156.705.160	84,51
14	KALIMANTAN TENGAH	142.863.136	95,94	137.057.716	95,94
15	KALIMANTAN SELATAN	57.286.920	82,34	45.639.612	79,67
16	KALIMANTAN TIMUR	51.938.878	81,67	42.843.793	82,49
17	SULAWESI UTARA	81.916.161	93,52	78.710.448	96,09
18	SULAWESI TENGAH	131.863.072	79,50	115.945.963	87,93
19	SULAWESI SELATAN	217.979.323	91,23	209.937.888	96,31
20	SULAWESI TENGGARA	115.128.745	80,06	98.856.156	85,87
21	MALUKU	68.197.132	59,30	40.523.146	59,42
22	BALI	21.918.462	87,11	19.359.629	88,33
23	NUSA TENGGARA BARAT	74.870.673	93,87	70.481.745	94,14
24	NUSA TENGGARA TIMUR	50.457.940	66,01	37.478.968	74,28
25	PAPUA	116.080.070	98,52	114.739.466	98,85
26	BENGKULU	34.694.100	63,69	22.592.841	65,12
27	MALUKU UTARA	48.548.178	91,72	45.007.623	92,71
28	BANTEN	28.041.839	99,56	28.018.022	99,92
29	BANGKA BELITUNG	85.661.895	75,78	66.893.495	78,09
30	GORONTALO	18.662.821	99,19	18.522.305	99,25
31	KEPULAUAN RIAU	39.214.759	35,23	15.964.829	40,71
32	PAPUA BARAT	78.918.981	90,73	73.500.999	93,13
33	SULAWESI BARAT	46.771.660	75,51	36.406.899	77,84
34	KALIMANTAN UTARA	29.884.060	75,75	22.873.188	76,54
	TOTAL	6.926.098.850	82,01	6.362.277.025	91,86

Lampiran 1. (lanjutan)

**PAGU ANGGARAN DAN REALISASI KEUANGAN
SATKER DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN TAHUN 2017**

31 Desember 2017

(Rp. 000)

KODE SATKER	NAMA SATKER	KW	* ANGGARAN	REALISASI	%
	DKI JAKARTA		3.838.796.616	3.611.845.077	94,09
633656	DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN	KP	3.838.796.616	3.611.845.077	94,09
	JAWA BARAT		110.662.987	102.149.440	92,31
029029	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PROPINSI JAWA BARAT	DK	32.757.600	32.603.142	99,53
029168	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PROPINSI JAWA BARAT	TP	77.905.387	69.546.298	89,27
	JAWA TENGAH		143.098.138	130.567.636	91,24
039014	DINAS PERTANIAN TPH PROPINSI JAWA TENGAH	DK	40.691.500	40.591.092	99,75
039158	DINAS PERTANIAN TPH PROPINSI JAWA TENGAH	TP	66.171.818	54.465.428	82,31
039044	DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KAB SEMARANG	TP	1.246.580	1.182.647	94,87
039045	DINAS PERTANIAN KABUPATEN KENDAL	TP	1.958.980	1.950.039	99,54
039047	DINAS PERTANIAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KAB GROBOGAN	TP	1.011.280	1.010.765	99,95
039049	DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN PEKALONGAN	TP	849.280	832.160	97,98
039050	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KAB. BATANG	TP	962.780	960.210	99,73
039055	DINAS PERTANIAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KAB. BREBES	TP	1.270.680	1.099.655	86,54
039056	DINAS PERTANIAN, TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN KAB. PATI	TP	1.888.700	1.879.127	99,49
039057	DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN KUDUS	TP	0	0	0,00
039059	DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN KAB. PEMALANG	TP	480.560	477.206	99,30
039060	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN JEPARA	TP	2.378.080	2.377.630	99,98
039061	DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN REMBANG	TP	1.303.080	1.303.009	99,99
039064	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN KABUPATEN BANYUMAS	TP	1.826.280	1.825.809	99,97
039066	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN CILACAP	TP	0	0	0,00
039067	DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN PURBALINGGA	TP	1.366.580	1.364.873	99,88
039068	DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN BANJARNEGARA	TP	1.061.280	1.060.826	99,96
039070	DINAS PERTANIAN TP, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KAB. MAGELANG	TP	1.001.580	950.000	94,85
039072	DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN TEMANGGUNG	TP	1.600.980	1.599.855	99,93
039073	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN KABUPATEN WONOSOBO	TP	962.780	962.239	99,94
039075	DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN KAB. KEBUMEN	TP	1.739.180	1.734.617	99,74
039076	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KAB. KLATEN	TP	1.639.180	1.616.616	98,62
039078	DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KAB BOYOLALI	TP	1.556.680	1.505.741	96,73
039080	DINAS PERTANIAN KAB. SRAGEN	TP	1.866.280	1.851.160	99,19
039081	DINAS PERTANIAN KABUPATEN SUKOHARJO	TP	1.278.980	1.276.220	99,78
039083	DINAS PERTANIAN TP, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KAB. KARANGANYAR	TP	1.691.880	1.611.526	95,25
039084	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KAB WONOGIRI	TP	1.519.480	1.469.621	96,72
039445	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN DEMAK	TP	1.233.080	1.228.780	99,65
039474	DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN & KEHUTANAN KABUPATEN TEGAL	TP	1.070.680	1.055.359	98,57
039516	DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN KAB BLORA	TP	419.960	419.960	100,00
039582	DINAS PERTANIAN PETERNAKAN KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB PURWOREJO	TP	1.049.960	905.467	86,24
	DI. YOGYAKARTA		9.006.350	8.785.636	97,55
049028	DINAS PERTANIAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA	DK	4.493.890	4.377.719	97,41
049094	DINAS PERTANIAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA	TP	4.512.460	4.407.917	97,68
	JAWA TIMUR		144.548.540	141.106.368	97,62
059004	DINAS PERTANIAN PROPINSI JAWA TIMUR	DK	45.488.130	44.768.941	98,42
059185	DINAS PERTANIAN PROPINSI JAWA TIMUR	TP	99.060.410	96.337.427	97,25
	ACEH		156.467.114	135.740.584	86,75
069016	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROP. ACEH	DK	19.842.950	19.241.391	96,97
069140	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROP. ACEH	TP	136.624.164	116.499.193	85,27

PAGU ANGGARAN DAN REALISASI KEUANGAN

SATKER DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN TAHUN 2017

31 Desember 2017

(Rp. 000)

KODE SATKER	NAMA SATKER	KW	* ANGGARAN	REALISASI	%
	SUMATERA UTARA		66.505.656	61.475.014	92,44
079027	DINAS PERTANIAN PROVINSI SUMATERA UTARA	DK	15.289.640	13.744.721	89,90
079132	DINAS PERTANIAN PROVINSI SUMATERA UTARA	TP	51.127.016	47.641.393	93,18
079068	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA MEDAN	TP	89.000	88.900	99,89
079039	DINAS PERTANIAN KAB. LANGKAT	TP	0	0	0,00
079042	DINAS PERTANIAN KAB SIMALUNGUN	TP	0	0	0,00
079049	DINAS PERTANIAN TPH KAB. TAPANULI SELATAN	TP	0	0	0,00
079051	DINAS PERTANIAN KAB. ASAHAN	TP	0	0	0,00
079053	DINAS PERTANIAN KAB NIAS	TP	0	0	0,00
079062	DINAS PERTANIAN TPH KAB. PADANG LAWAS UTARA	TP	0	0	0,00
079346	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN TANAH KARO	TP	0	0	0,00
079427	DINAS PERTANIAN TPH KAB. MANDAILING NATAL	TP	0	0	0,00
	SUMATERA BARAT		46.188.678	41.575.874	90,01
089011	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PROV SUMATERA BARAT	DK	9.054.540	8.030.051	88,69
089137	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PROV SUMATERA BARAT	TP	37.134.138	33.545.823	90,34
	RIAU		26.118.100	23.635.129	90,49
099035	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU	DK	6.714.880	5.938.484	88,44
099322	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU	TP	19.403.220	17.696.645	91,20
	JAMBI		75.235.030	70.765.563	94,06
109007	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PROPINSI JAMBI	DK	8.462.660	7.785.557	92,00
109125	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PROPINSI JAMBI	TP	66.772.370	62.980.006	94,32
	SUMATERA SELATAN		379.130.993	339.953.976	89,67
119004	DINAS PERTANIAN TPH PROPINSI SUMATERA SELATAN	DK	16.719.820	15.927.775	95,26
119137	DINAS PERTANIAN TPH PROPINSI SUMATERA SELATAN	TP	362.411.173	324.026.202	89,41
	LAMPUNG		204.015.822	196.616.836	96,37
129003	DINAS PERTANIAN TPH PROV. LAMPUNG	DK	12.165.560	11.915.610	97,95
129119	DINAS PERTANIAN TPH PROV. LAMPUNG	TP	191.850.262	184.701.226	96,27
	KALIMANTAN BARAT		185.426.021	156.705.160	84,51
139032	DINAS PERTANIAN TPH PROVINSI KALIMANTAN BARAT	DK	11.284.840	10.691.572	94,74
139134	DINAS PERTANIAN TPH PROVINSI KALIMANTAN BARAT	TP	168.447.781	140.404.583	83,35
139047	DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN KAB SINTANG	TP	842.560	815.692	96,81
139049	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN PONTIANAK	TP	794.060	792.750	99,84
139050	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN KAB KAPUAS HULU	TP	1.700.760	1.644.760	96,71
139057	DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN KAB. SEKADAU	TP	934.660	934.444	99,98
139308	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN BENGKAYANG	TP	1.421.360	1.421.360	100,00
	KALIMANTAN TENGAH		142.863.136	137.057.716	95,94
149003	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	DK	8.254.830	8.128.905	98,47
149120	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	TP	134.608.306	128.928.812	95,78
	KALIMANTAN SELATAN		57.286.920	45.639.612	79,67
159004	DINAS PERTANIAN TPH PROPINSI KALIMANTAN SELATAN	DK	10.600.160	8.318.916	78,48
159114	DINAS PERTANIAN TPH PROPINSI KALIMANTAN SELATAN	TP	46.686.760	37.320.696	79,94
	KALIMANTAN TIMUR		51.938.878	42.843.793	82,49
169027	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PROP. KALIMANTAN TIMUR	DK	10.229.220	7.973.522	77,95
169121	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PROP. KALIMANTAN TIMUR	TP	41.709.658	34.870.271	83,60
	SULAWESI UTARA		81.916.161	78.710.448	96,09
179024	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI UTARA	DK	8.869.940	8.786.438	99,06
179110	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI UTARA	TP	73.046.221	69.924.011	95,73
	SULAWESI TENGAH		131.863.072	115.945.963	87,93
189018	DINAS PERTANIAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH	DK	11.070.840	10.193.809	92,08
189138	DINAS PERTANIAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH	TP	120.792.232	105.752.154	87,55
	SULAWESI SELATAN		217.979.323	209.937.888	96,31
199028	DINAS PERTANIAN TPH PROVINSI SULAWESI SELATAN	DK	19.280.500	18.785.651	97,43
199133	DINAS PERTANIAN TPH PROVINSI SULAWESI SELATAN	TP	198.698.823	191.152.237	96,20

PAGU ANGGARAN DAN REALISASI KEUANGAN

SATKER DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN TAHUN 2017

31 Desember 2017

(Rp. 000)

KODE SATKER	NAMA SATKER	KW	* ANGGARAN	REALISASI	%
	SULAWESI TENGGARA		115.128.745	98.856.156	85,87
209026	DINAS PERTANIAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	DK	8.256.700	8.221.033	99,57
209114	DINAS PERTANIAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	TP	106.872.045	90.635.123	84,81
	MALUKU		68.197.132	40.523.146	59,42
219004	DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU	DK	9.997.580	9.210.930	92,13
219095	DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU	TP	58.199.552	31.312.217	53,80
	BALI		21.918.462	19.359.629	88,33
229029	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PROVINSI BALI	DK	5.980.580	5.756.352	96,25
229108	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PROVINSI BALI	TP	15.937.882	13.603.277	85,35
	NUSA TENGGARA BARAT		74.870.673	70.481.745	94,14
239011	DINAS PERTANIAN TPH PROV NUSA TENGGARA BARAT	DK	8.548.760	6.864.529	80,30
239133	DINAS PERTANIAN TPH PROV NUSA TENGGARA BARAT	TP	66.321.913	63.617.216	95,92
	NUSA TENGGARA TIMUR		50.457.940	37.478.968	74,28
249033	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROV NTT	DK	11.005.170	8.632.935	78,44
249165	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROV NTT	TP	30.642.090	20.272.472	66,16
249042	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KAB. TIMOR TENGAH SELATAN	TP	1.371.160	1.349.060	98,39
249054	DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KAB ENDE	TP	1.361.260	1.361.260	100,00
249060	DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KAB. NGADA	TP	910.810	910.810	100,00
249065	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KAB SUMBA TIMUR	TP	949.080	734.086	77,35
249074	DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KAB MANGGARAI BARAT	TP	1.335.830	1.335.805	100,00
249078	DINAS PERTANIAN KAB. SUMBA BARAT DAYA	TP	1.414.260	1.414.260	100,00
249082	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KAB. MANGGARAI TIMUR	TP	1.468.280	1.468.280	100,00
249312	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN BELU	TP	0	0	0,00
	PAPUA		116.080.070	114.739.466	98,85
259020	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI PAPUA	DK	17.880.570	17.644.347	98,68
259104	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROPINSI PAPUA	TP	98.199.500	97.095.119	98,88
	BENGGKULU		34.694.100	22.592.841	65,12
269002	DINAS PERTANIAN PROPINSI BENGGKULU	DK	7.492.160	5.938.984	79,27
269116	DINAS PERTANIAN PROPINSI BENGGKULU	TP	27.201.940	16.653.857	61,22
	MALUKU UTARA		48.548.178	45.007.623	92,71
289038	DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU UTARA	DK	8.664.150	8.664.150	100,00
289108	DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU UTARA	TP	39.884.028	36.343.473	91,12
	BANTEN		28.041.839	28.018.022	99,92
299008	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI BANTEN	DK	9.565.920	9.564.559	99,99
299387	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI BANTEN	TP	18.475.919	18.453.463	99,88
	BANGKA BELITUNG		85.661.895	66.893.495	78,09
309034	DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROP KEP. BABEL	DK	4.987.010	4.984.207	99,94
309168	DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROP KEP. BABEL	TP	80.674.885	61.909.288	76,74
	GORONTALO		18.662.821	18.522.305	99,25
319004	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROPINSI GORONTALO	DK	2.701.800	2.698.113	99,86
319094	DINAS PERTANIAN TPH PROV GORONTALO	TP	15.961.021	15.824.192	99,14
	KEPULAUAN RIAU		39.214.759	15.964.829	40,71
329030	DINAS PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PETERNAKAN PROV KEP RIAU	DK	3.412.099	2.120.212	62,14
329082	DINAS PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PETERNAKAN PROV KEP RIAU	TP	35.802.660	13.844.617	38,67

PAGU ANGGARAN DAN REALISASI KEUANGAN**SATKER DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN TAHUN 2017**

31 Desember 2017

(Rp. 000)

KODE SATKER	NAMA SATKER	KW	* ANGGARAN	REALISASI	%
	PAPUA BARAT		78.918.981	73.500.999	93,13
339022	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI PAPUA BARAT	DK	10.375.380	6.493.230	62,58
339091	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI PAPUA BARAT	TP	68.543.601	67.007.769	97,76
	SULAWESI BARAT		46.771.660	36.406.899	77,84
340059	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROPINSI SULAWESI BARAT	DK	4.377.400	4.341.098	99,17
340146	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROPINSI SULAWESI BARAT	TP	42.394.260	32.065.801	75,64
	KALIMANTAN UTARA		29.884.060	22.873.188	76,54
350038	DINAS PERTANIAN, KEHUTANAN DAN KP PROV KALIMANTAN UTARA	DK	6.089.460	5.843.259	95,96
350039	DINAS PERTANIAN, KEHUTANAN DAN KP PROV KALIMANTAN UTARA	TP	23.794.600	17.029.929	71,57
	TOTAL DITJEN PSP		6.926.098.850	6.362.277.025	91,86

*

Catatan

Pusat	1
DK	33
TP Prop.	33
TP Mandiri	40
TOTAL	107

Lampiran 2.

REALISASI KEGIATAN PENGEMBANGAN PEMANFAATAN LAHAN RAWA/GAMBUT TERPADU TA.2017

No.	PROVINSI	KABUPATEN	TARGET		REALISASI			
			VOLUME (Ha)	ANGGARAN (Rp)	FISIK (Ha)	(%)	KEUANGAN	%
TOTAL			3.900	15.600.000.000	3.529	90,49	13.816.000.000	88,56
1	Jambi		100	400.000.000	100	100,00	400.000.000	100,00
		Tanjung Jabung Barat	100	400.000.000	100		400.000.000	100,00
2	Sumatera Selatan		500	2.000.000.000	500	100,00	2.000.000.000	100,00
		Ogan Komering Ilir	500	2.000.000.000	500		2.000.000.000	100,00
3	Lampung		500	2.000.000.000	500	100,00	2.000.000.000	100,00
		Tulang Bawang	500	2.000.000.000	500		2.000.000.000	100,00
4	Kalimantan Barat		600	2.400.000.000	600	100,00	2.400.000.000	100,00
		Mempawah	500	2.000.000.000	500		2.000.000.000	100,00
		Kayong Utara	100	400.000.000	100		400.000.000	100,00
5	Kalimantan Tengah		1.250	5.000.000.000	879	70,32	3.516.000.000	70,32
		Barito Timur	500	2.000.000.000	129		516.000.000	25,80
		Pulang Pisau	250	1.000.000.000	250		1.000.000.000	100,00
		Katingan	500	2.000.000.000	500		2.000.000.000	100,00
6	Kalimantan Selatan		850	3.400.000.000	850	100,00	3.100.000.000	91,18
		Barito Kuala	300	1.200.000.000	300		1.200.000.000	100,00
		Tanah Laut	250	1.000.000.000	250		1.000.000.000	100,00
		Hulu Sungai Utara	300	1.200.000.000	300		900.000.000	75,00
7	Kalimantan Timur		100	400.000.000	100	100,00	400.000.000	100,00
		Kutai Kartanegara	100	400.000.000	100		400.000.000	100,00

Lampiran 2. (lanjutan)

REALISASI KEGIATAN LAHAN SUB OPTIMAL TA.2017

No.	PROVINSI	KABUPATEN	TARGET		REALISASI			
			VOLUME (Ha)	ANGGARAN (Rp)	FISIK	%	KEUANGAN	%
TOTAL			3.000	37.500.000.000	1.116	37,20	6.960.000.000	18,56
1	Sumatera Selatan	Ogan Komering Ilir	700	2.800.000.000	400	57,14	1.960.000.000	70,00
		Ogan Ilir	416	4.160.000.000	200	48,08	4.160.000.000	100,00

Lampiran 3.

REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN PRA SERTIPIKASI LAHAN PERTANIAN TA. 2017

NO	PROVINSI/KABUPATEN	TARGET		REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	
		Fisik (bidang)	Keuangan (Rp)	(Rp)	%	PERSIL	%
1	ACEH	2.800	560.000.000	560.000.000	100	2.800	100
2	SUMATERA UTARA	1.600	320.000.000	320.000.000	100	1.600	100
3	SUMATERA BARAT	1.600	320.000.000	83.941.400	26	435	27
4	JAMBI	3.600	720.000.000	464.252.500	64	2.800	78
5	SUMATERA SELATAN	2.000	400.000.000	162.035.000	41	1.000	50
6	BENGKULU	400	80.000.000	43.770.000	55	400	100
7	LAMPUNG	6.800	1.360.000.000	1.307.415.000	96	6.200	91
8	JAWA BARAT	2.800	560.000.000	470.725.100	84	2.400	86
9	JAWA TENGAH	3.600	720.000.000	688.897.000	96	3.600	100
10	DI YOGYAKARTA	800	160.000.000	142.321.500	89	800	100
11	JAWA TIMUR	4.600	920.000.000	437.334.000	48	3.650	79
12	BALI	800	160.000.000	34.500.000	22	226	28
13	NUSA TENGGARA BARAT	3.000	600.000.000	559.300.000	93	2.800	93
14	NUSA TENGGARA TIMUR	1.600	320.000.000	320.000.000	100	1.600	100
15	KALIMANTAN BARAT	3.600	720.000.000	720.000.000	100	3.600	100
16	KALIMANTAN TIMUR	600	120.000.000	58.215.700	49	400	67
17	KALIMANTAN TENGAH	2.600	520.000.000	468.815.000	90	2.400	92
18	KALIMANTAN UTARA	600	120.000.000	66.450.000	55	400	67
19	KALIMANTAN SELATAN	1.600	320.000.000	234.465.000	73	1.400	88
20	SULAWESI UTARA	2.600	520.000.000	459.237.000	88	2.600	100
21	SULAWESI TENGAH	3.000	600.000.000	600.000.000	100	3.000	100
22	SULAWESI SELATAN	14.000	2.800.000.000	2.720.000.000	97	13.600	97
23	SULAWESI TENGGARA	7.200	1.440.000.000	573.330.000	40	3.341	46
24	GORONTALO	400	80.000.000	80.000.000	100	400	100
25	SULAWESI BARAT	2.400	480.000.000	458.110.000	95	2.400	100
26	MALUKU	600	120.000.000	120.000.000	100	600	100
27	MALUKU UTARA	1.600	320.000.000	320.000.000	100	1.600	100
28	BANGKA BELITUNG	3.200	640.000.000	300.645.000	47	1.600	50
	TOTAL	80.000	16.000.000.000	12.773.759.200	80	67.652	85

Lampiran 4.

REALISASI KEGIATAN PENANAMAN PADI PASCA CETAK SAWAH TA.2017

No.	PROVINSI	KABUPATEN	TARGET		REALISASI			
			VOLUME (Ha)	ANGGARAN (Rp)	FISIK	%	KEUANGAN	%
TOTAL			135.995	203.992.500.000	125.608	92,39	187.092.305.870	91,89
1	Jawa Barat		500	750.000.000	500	100,00	750.000.000	100,00
		Ciamis	70	105.000.000	70	100,00	105.000.000	100,00
		Tasikmalaya	100	150.000.000	100	100,00	150.000.000	100,00
		Sumedang	250	375.000.000	250	100,00	375.000.000	100,00
		Pangandaran	80	120.000.000	80	100,00	120.000.000	100,00
2	Aceh		2.317	3.475.500.000	2.093	90,33	3.139.500.000	90,33
		Aceh Besar	470	705.000.000	440	93,62	660.000.000	93,62
		Aceh Timur	620	930.000.000	620	100,00	930.000.000	100,00
		Aceh Utara	984	1.476.000.000	933	94,82	1.399.500.000	94,82
		Kota Subulussalam	100	150.000.000	100	100,00	150.000.000	100,00
		Gayo Lues	143	214.500.000	-	-	-	-
3	Sumatera Barat		608	912.000.000	399	65,69	599.130.000	65,69
		Kepulauan Mentawai	25	37.500.000	25	100,00	37.500.000	100,00
		Solok	18	27.000.000	9	48,33	13.050.000	48,33
		Dharmasraya	72	108.000.000	35	47,92	51.750.000	47,92
		Solok Selatan	117	175.500.000	117	100,00	175.500.000	100,00
		Pasaman Barat	42	63.000.000	39	92,38	58.200.000	92,38
		Lima puluh kota	175	262.500.000	100	56,93	149.430.000	56,93
		Agam	59	88.500.000	50	84,75	75.000.000	84,75
		Sijunjung	100	150.000.000	26	25,80	38.700.000	25,80
4	Riau		730	1.095.000.000	611	83,76	917.200.000	83,76
		Kepulauan Meranti	730	1.095.000.000	611	83,76	917.200.000	83,76
5	Jambi		3.580	5.370.000.000	3.104	86,70	4.656.000.000	86,70
		Tebo	500	750.000.000	327	65,40	490.500.000	65,40
		Batanghari	350	525.000.000	350	100,00	525.000.000	100,00
		Kerinci	230	345.000.000	182	79,13	273.000.000	79,13
		Merangin	1.500	2.250.000.000	1.335	89,00	2.002.500.000	89,00
		Sarolangun	500	750.000.000	500	100,00	750.000.000	100,00
		Tanjung Jabung Barat	200	300.000.000	200	100,00	300.000.000	100,00
		Kota Sungai Penuh	100	150.000.000	10	10,00	15.000.000	10,00
		Bungo	200	300.000.000	200	100,00	300.000.000	100,00
6	Sumatera Selatan		12.475	18.712.500.000	12.175	97,60	18.262.500.000	97,60
		Musi Rawas	500	750.000.000	500	100,00	750.000.000	100,00
		Ogan Komering Ilir	10.146	15.219.000.000	10.146	100,00	15.219.000.000	100,00
		Ogan Komering Ulu	300	450.000.000	-	-	-	-
		OKU Timur	499	748.500.000	499	100,00	748.500.000	100,00
		Penukal Abab Lematang Ilir	1.030	1.545.000.000	1.030	100,00	1.545.000.000	100,00
7	Lampung		13.875	20.812.500.000	13.875	100,00	19.492.500.000	93,66
		Tulang Bawang Barat	880	1.320.000.000	880	100,00	1.320.000.000	100,00
		Mesuji	7.800	11.700.000.000	7.800	100,00	11.700.000.000	100,00
		Tulang Bawang	4.750	7.125.000.000	4.750	100,00	7.125.000.000	100,00
		Lampung tengah	445	667.500.000	445	100,00	667.500.000	100,00
8	Kalimantan Barat		17.905	26.857.500.000	17.266	96,43	25.899.735.000	96,43
		Landak	4.000	6.000.000.000	4.000	100,00	6.000.000.000	100,00
		Kapuas Hulu	1.500	2.250.000.000	961	64,04	1.440.900.000	64,04
		Ketapang	1.400	2.100.000.000	1.400	100,00	2.100.000.000	100,00
		Sambas	1.140	1.710.000.000	1.120	98,25	1.680.000.000	98,25
		Sanggau	5.800	8.700.000.000	5.721	98,64	8.581.335.000	98,64
		Sintang	1.515	2.272.500.000	1.515	100,00	2.272.500.000	100,00
		Sekadau	550	825.000.000	550	100,00	825.000.000	100,00
		Kubu Raya	2.000	3.000.000.000	2.000	100,00	3.000.000.000	100,00

No.	PROVINSI	KABUPATEN	TARGET		REALISASI			
			VOLUME (Ha)	ANGGARAN (Rp)	FISIK	%	KEUANGAN	%
9	Kalimantan Tengah		14.970	22.455.000.000	13.795	92,15	20.692.500.000	92,15
		Barito Selatan	500	750.000.000	150	30,00	225.000.000	30,00
		Barito Utara	1.200	1.800.000.000	1.200	100,00	1.800.000.000	100,00
		Kapuas	1.000	1.500.000.000	1.000	100,00	1.500.000.000	100,00
		Kotawaringin Timur	200	300.000.000	200	100,00	300.000.000	100,00
		Katingan	4.000	6.000.000.000	3.847	96,18	5.770.500.000	96,18
		Seruyan	525	787.500.000	440	83,81	660.000.000	83,81
		Gunung Mas	1.100	1.650.000.000	1.100	100,00	1.650.000.000	100,00
		Pulang Pisau	4.325	6.487.500.000	3.742	86,52	5.613.000.000	86,52
		Barito Timur	2.120	3.180.000.000	2.116	99,81	3.174.000.000	99,81
10	Kalimantan Selatan		3.237	4.855.500.000	2.812	86,87	4.218.150.000	86,87
		Banjarnegara	142	213.000.000	142	99,65	212.250.000	99,65
		Hulu Sungai Selatan	500	750.000.000	500	100,00	750.000.000	100,00
		Kotabaru	935	1.402.500.000	888	94,97	1.332.000.000	94,97
		Tabalong	473	709.500.000	292	61,67	437.500.000	61,67
		Tanah Laut	625	937.500.000	625	100,00	937.500.000	100,00
		Tapin	437	655.500.000	241	55,13	361.350.000	55,13
		Tanah Bumbu	75	112.500.000	75	100,00	112.500.000	100,00
		Balangan	50	75.000.000	50	100,00	75.000.000	100,00
11	Kalimantan Timur		790	1.185.000.000	714	90,38	1.071.000.000	90,38
		Berau	350	525.000.000	324	92,57	486.000.000	92,57
		Kutai Kartanegara	85	127.500.000	85	100,00	127.500.000	100,00
		Kutai Timur	355	532.500.000	305	85,92	457.500.000	85,92
12	Sulawesi Utara		4.735	7.102.500.000	4.534	95,75	6.800.394.370	95,75
		Kepulauan Talaud	85	127.500.000	85	100,00	127.500.000	100,00
		Bolaang Mongondow	3.850	5.775.000.000	3.714	96,46	5.570.469.150	96,46
		Bolaang Mongondow Timur	115	172.500.000	115	100,00	172.500.000	100,00
		Bolaang Mongondow Selatan	100	150.000.000	100	100,00	150.000.000	100,00
		Bolaang Mongondow Utara	25	37.500.000	25	100,00	37.500.000	100,00
		Minahasa	400	600.000.000	358	89,44	536.655.000	89,44
		Minahasa Selatan	100	150.000.000	100	100,00	150.000.000	100,00
		Minahasa Tenggara	60	90.000.000	37	61,97	55.770.220	61,97
13	Sulawesi Tengah		4.962	7.443.000.000	4.742	95,56	7.112.500.000	95,56
		Banggai	965	1.447.500.000	965	100,00	1.447.500.000	100,00
		Buol	309	463.500.000	309	100,00	463.500.000	100,00
		Morowali	375	562.500.000	375	100,00	562.500.000	100,00
		Morowali Utara	725	1.087.500.000	722	99,59	1.083.000.000	99,59
		Poso	2.000	3.000.000.000	2.000	100,00	3.000.000.000	100,00
		Parigi Moutong	476	714.000.000	259	54,34	388.000.000	54,34
		Tojo Una-Una	112	168.000.000	112	100,00	168.000.000	100,00
14	Sulawesi Selatan		12.440	18.660.000.000	12.427	99,89	18.639.951.500	99,89
		Bone	1.400	2.100.000.000	1.387	99,07	2.080.514.000	99,07
		Luwu	500	750.000.000	500	100,00	750.000.000	100,00
		Luwu Utara	1.300	1.950.000.000	1.300	100,00	1.950.000.000	100,00
		Pinrang	2.000	3.000.000.000	2.000	100,00	3.000.000.000	100,00
		Kepulauan Selayar	250	375.000.000	250	100,00	375.000.000	100,00
		Sidenreng Rappang	540	810.000.000	540	100,00	810.000.000	100,00
		Wajo	4.300	6.450.000.000	4.300	100,00	6.450.000.000	100,00
		Luwu Timur	1.400	2.100.000.000	1.400	100,00	2.100.000.000	100,00
		Soppeng	300	450.000.000	300	100,00	450.000.000	100,00
		Jeneponto	450	675.000.000	450	99,92	674.437.500	99,92
15	Sulawesi Tenggara		6.804	10.206.000.000	6.723	98,81	10.084.905.000	98,81
		Buton Tengah	50	75.000.000	50	100,00	75.000.000	100,00
		Konawe	1.128	1.692.000.000	1.172	103,94	1.758.630.000	103,94
		Konawe Selatan	1.135	1.702.500.000	1.135	100,00	1.702.500.000	100,00
		Konawe Utara	450	675.000.000	450	100,00	675.000.000	100,00
		Kolaka	1.350	2.025.000.000	1.350	100,00	2.025.000.000	100,00
		Kolaka Timur	1.255	1.882.500.000	1.175	93,61	1.762.275.000	93,61
		Muna Barat	100	150.000.000	100	100,00	150.000.000	100,00
		Bombana	1.336	2.004.000.000	1.291	96,63	1.936.500.000	96,63

No.	PROVINSI	KABUPATEN	TARGET		REALISASI			
			VOLUME (Ha)	ANGGARAN (Rp)	FISIK	%	KEUANGAN	%
9	Kalimantan Tengah		14.970	22.455.000.000	13.795	92,15	20.692.500.000	92,15
16	Maluku		1.525	2.287.500.000	1.300	85,26	1.950.400.000	85,26
		Buru	325	487.500.000	317	97,52	475.400.000	97,52
		Seram Bagian Timur	600	900.000.000	433	72,22	650.000.000	72,22
		Maluku Tengah	600	900.000.000	550	91,67	825.000.000	91,67
17	NTB		7.392	11.088.000.000	7.355	99,50	11.033.025.000	99,50
		Lombok Timur	687	1.030.500.000	817	118,95	1.225.800.000	118,95
		Bima	2.755	4.132.500.000	2.726	98,96	4.089.450.000	98,96
		Lombok Utara	750	1.125.000.000	730	97,28	1.094.400.000	97,28
		Sumbawa	2.700	4.050.000.000	2.700	100,00	4.050.000.000	100,00
		Sumbawa Barat	500	750.000.000	382	76,45	573.375.000	76,45
18	NTT		1.564	2.346.000.000	1.368	87,49	2.052.500.000	87,49
		Kupang	257	385.500.000	256	99,62	384.045.000	99,62
		Timor Tengah Selatan	100	150.000.000	100	100,00	150.000.000	100,00
		Timor Tengah Utara	333	499.500.000	190	56,97	284.550.000	56,97
		Manggarai	53	79.500.000	52	98,45	78.270.000	98,45
		Sumba Barat	58	87.000.000	58	99,71	86.745.000	99,71
		Sumba Timur	109	163.500.000	89	81,48	133.215.000	81,48
		Rote Ndao	18	27.000.000	18	100,00	27.000.000	100,00
		Manggarai Barat	46	69.000.000	46	100,00	69.000.000	100,00
		Ende	55	82.500.000	27	48,42	39.950.000	48,42
		Ngada	52	78.000.000	51	98,58	76.890.000	98,58
		Sikka	7	10.500.000	7	98,43	10.335.000	98,43
		Flores Timur	72	108.000.000	72	99,53	107.490.000	99,53
		Manggarai Timur	180	270.000.000	180	100,00	270.000.000	100,00
		Sabu Raijua	100	150.000.000	100	100,00	150.000.000	100,00
		Malaka	124	186.000.000	123	99,47	185.010.000	99,47
19	Papua		6.265	9.397.500.000	6.055	96,65	9.082.500.000	96,65
		Jayapura	250	375.000.000	250	100,00	375.000.000	100,00
		Nabire	1.000	1.500.000.000	1.000	100,00	1.500.000.000	100,00
		Keerom	700	1.050.000.000	490	70,00	735.000.000	70,00
		Mappi	200	300.000.000	200	100,00	300.000.000	100,00
		Merauke	4.115	6.172.500.000	4.115	100,00	6.172.500.000	100,00
20	Bengkulu		140	210.000.000	63	45,00	94.500.000	45,00
		Kaur	140	210.000.000	63	45,00	94.500.000	45,00
21	Maluku Utara		1.460	2.190.000.000	1.390	95,20	2.084.940.000	95,20
		Halmahera Selatan	141	211.500.000	94	66,43	140.490.000	66,43
		Halmahera Timur	241	361.500.000	220	91,29	330.000.000	91,29
		Halmahera Barat	100	150.000.000	98	98,30	147.450.000	98,30
		Pulau Morotai	651	976.500.000	651	100,00	976.500.000	100,00
		Halmahera Utara	327	490.500.000	327	100,00	490.500.000	100,00
22	Bangka Belitung		9.625	14.437.500.000	5.012	52,07	7.517.850.000	52,07
		Belitung	450	675.000.000	408	90,67	612.000.000	90,67
		Bangka Barat	1050	1.575.000.000	682	64,95	1.023.000.000	64,95
		Bangka Selatan	3980	5.970.000.000	2.056	51,67	3.084.600.000	51,67
		Belitung Timur	1945	2.917.500.000	516	26,50	773.250.000	26,50
		Bangka	2200	3.300.000.000	1.350	61,36	2.025.000.000	61,36
23	Gorontalo		500	750.000.000	495	99,05	742.875.000	99,05
		Boalemo	90	135.000.000	90	100,00	135.000.000	100,00
		Pohuwato	410	615.000.000	405	98,84	607.875.000	98,84
24	Kepulauan Riau		232	348.000.000	232	100,00	348.000.000	100,00
		Natuna	132	198.000.000	132	100,00	198.000.000	100,00
		Lingga	100	150.000.000	100	100,00	150.000.000	100,00
25	Papua Barat		2.172	3.258.000.000	1.952	89,87	2.928.000.000	89,87
		Sorong	600	900.000.000	600	100,00	900.000.000	100,00
		Manokwari	540	810.000.000	340	62,96	510.000.000	62,96
		Fak-Fak	182	273.000.000	182	100,00	273.000.000	100,00
		Raja Ampat	100	150.000.000	100	100,00	150.000.000	100,00
		Teluk Bintuni	100	150.000.000	100	100,00	150.000.000	100,00
		Teluk Wondama	150	225.000.000	130	86,67	195.000.000	86,67
		Sorong Selatan	100	150.000.000	100	100,00	150.000.000	100,00
		Manokwari Selatan	400	600.000.000	400	100,00	600.000.000	100,00

No.	PROVINSI	KABUPATEN	TARGET		REALISASI			
			VOLUME (Ha)	ANGGARAN (Rp)	FISIK	%	KEUANGAN	%
9	Kalimantan Tengah		14.970	22.455.000.000	13.795	92,15	20.692.500.000	92,15
16	Maluku		1.525	2.287.500.000	1.300	85,26	1.950.400.000	85,26
		Buru	325	487.500.000	317	97,52	475.400.000	97,52
		Seram Bagian Timur	600	900.000.000	433	72,22	650.000.000	72,22
		Maluku Tengah	600	900.000.000	550	91,67	825.000.000	91,67
26	Sulawesi Barat		4.260	6.390.000.000	4.147	97,35	6.220.560.000	97,35
		Mamuju	1.000	1.500.000.000	1.000	100,00	1.500.000.000	100,00
		Majene	350	525.000.000	324	92,69	486.615.000	92,69
		Mamasa	150	225.000.000	150	100,00	225.000.000	100,00
		Mamuju Utara	160	240.000.000	114	71,23	170.955.000	71,23
		Mamuju Tengah	1.700	2.550.000.000	1.659	97,57	2.488.035.000	97,57
		Polewali Mandar	900	1.350.000.000	900	100,00	1.349.955.000	100,00
27	Kalimantan Utara		932	1.398.000.000	467	50,16	701.190.000	50,16
		Bulungan	725	1.087.500.000	409	56,37	612.990.000	56,37
		Malinau	207	310.500.000	59	28,41	88.200.000	28,41

Lampiran 5.

TARGET DAN REALISASI KEUANGAN DAN FISIK KEGIATAN RJI TA. 2017

No	Kabupaten / Kota	TOTAL PAGU		T A H A P A N								
				SP2D Tahap I (70%)		SP2D Tahap II (30%)		TOTAL SP2D			Realisasi Fisik	
		HA	(Rp)	HA	(Rp)	HA	(Rp)	HA	(Rp)	%	HA	%
	NASIONAL	100.000	117.215.000.000	99.995	113.502.500.000	9.925	3.706.500.000	99.995	117.209.000.000	99,99	99.955	99,96
1	ACEH	6.900	8.280.000.000	6.900	8.280.000.000	-	-	6.900	8.280.000.000	100,00	6.900	100,00
1	Aceh Besar	750	900.000.000	750	900.000.000			750	900.000.000	100,00	750	100,00
2	Aceh Tamiang	500	600.000.000	500	600.000.000			500	600.000.000	100,00	500	100,00
3	Aceh Tengah	250	300.000.000	250	300.000.000			250	300.000.000	100,00	250	100,00
4	Aceh Tenggara	500	600.000.000	500	600.000.000			500	600.000.000	100,00	500	100,00
5	Aceh Timur	500	600.000.000	500	600.000.000			500	600.000.000	100,00	500	100,00
6	Aceh Utara	500	600.000.000	500	600.000.000			500	600.000.000	100,00	500	100,00
7	Bireuen	500	600.000.000	500	600.000.000			500	600.000.000	100,00	500	100,00
8	Nagan Raya	500	600.000.000	500	600.000.000			500	600.000.000	100,00	500	100,00
9	Pidie	500	600.000.000	500	600.000.000			500	600.000.000	100,00	500	100,00
10	Pidie Jaya	500	600.000.000	500	600.000.000			500	600.000.000	100,00	500	100,00
11	Aceh Barat Daya	500	600.000.000	500	600.000.000			500	600.000.000	100,00	500	100,00
12	Aceh Jaya	500	600.000.000	500	600.000.000			500	600.000.000	100,00	500	100,00
13	Aceh Selatan	500	600.000.000	500	600.000.000			500	600.000.000	100,00	500	100,00
14	Gayo Lues	400	480.000.000	400	480.000.000			400	480.000.000	100,00	400	100,00
2	SUMATERA UTARA	1.950	2.340.000.000	1.950	1.908.000.000	1.200	432.000.000	1.950	2.340.000.000	100,00	1.950	100,00
1	Asahan	400	480.000.000	400	336.000.000	400	144.000.000	400	480.000.000	100,00	400	100,00
2	Mandailing Natal	750	900.000.000	750	900.000.000			750	900.000.000	100,00	750	100,00
3	Langkat	600	720.000.000	600	504.000.000	600	216.000.000	600	720.000.000	100,00	600	100,00
4	Nias	200	240.000.000	200	168.000.000	200	72.000.000	200	240.000.000	100,00	200	100,00
3	SUMATERA BARAT	900	1.080.000.000	900	1.080.000.000	-	-	900	1.080.000.000	100,00	900	100,00
1	Solok	500	600.000.000	500	600.000.000			500	600.000.000	100,00	500	100,00
2	Kota Padang Panjang	50	60.000.000	50	60.000.000			50	60.000.000	100,00	50	100,00
3	Kota Payakumbuh	100	120.000.000	100	120.000.000			100	120.000.000	100,00	100	100,00
4	Kota Sawahlunto	50	60.000.000	50	60.000.000			50	60.000.000	100,00	50	100,00
5	Kota Solok	50	60.000.000	50	60.000.000			50	60.000.000	100,00	50	100,00
6	Kota Pariaman	150	180.000.000	150	180.000.000			150	180.000.000	100,00	150	100,00
4	RIAU	1.000	1.200.000.000	1.000	1.200.000.000	-	-	1.000	1.200.000.000	100,00	1.000	100,00
1	Kampar	250	300.000.000	250	300.000.000			250	300.000.000	100,00	250	100,00
2	Kuantan Singingi	250	300.000.000	250	300.000.000			250	300.000.000	100,00	250	100,00
3	Rokan Hilir	250	300.000.000	250	300.000.000			250	300.000.000	100,00	250	100,00
4	Siak	250	300.000.000	250	300.000.000			250	300.000.000	100,00	250	100,00

No	Kabupaten / Kota	TOTAL PAGU		T A H A P A N								
				SP2D Tahap I (70%)		SP2D Tahap II (30%)		TOTAL SP2D			Realisasi Fisik	
				HA	(Rp)	HA	(Rp)	HA	(Rp)	%	HA	%
5	JAMBI	3.425	4.110.000.000	3.425	3.885.000.000	625	225.000.000	3.425	4.110.000.000	100,00	3.425	100,00
1	Batanghari	150	180.000.000	150	180.000.000			150	180.000.000	100,00	150	100,00
2	Bungo	400	480.000.000	400	480.000.000			400	480.000.000	100,00	400	100,00
3	Kerinci	1.000	1.200.000.000	1000	1.200.000.000			1.000	1.200.000.000	100,00	1000	100,00
4	Merangin	750	900.000.000	750	900.000.000			750	900.000.000	100,00	750	100,00
5	Sarolangun	500	600.000.000	500	600.000.000			500	600.000.000	100,00	500	100,00
6	Tebo	250	300.000.000	250	210.000.000	250	90.000.000	250	300.000.000	100,00	250	100,00
7	Kota Sungai Penuh	375	450.000.000	375	315.000.000	375	135.000.000	375	450.000.000	100,00	375	100,00
6	SUMATERA SELATAN	4.600	5.520.000.000	4.600	4.872.000.000	1.800	648.000.000	4.600	5.520.000.000	100,00	4.600	100,00
1	Lahat	300	360.000.000	300	252.000.000	300	108.000.000	300	360.000.000	100,00	300	100,00
2	Ogan Komering Ulu	350	420.000.000	350	420.000.000			350	420.000.000	100,00	350	100,00
3	Empat Lawang	350	420.000.000	350	294.000.000	350	126.000.000	350	420.000.000	100,00	350	100,00
4	Musi Rawas	500	600.000.000	500	420.000.000	500	180.000.000	500	600.000.000	100,00	500	100,00
5	Ogan Komering Ilir	650	780.000.000	650	546.000.000	650	234.000.000	650	780.000.000	100,00	650	100,00
6	OKU Selatan	350	420.000.000	350	420.000.000			350	420.000.000	100,00	350	100,00
7	OKU Timur	2.100	2.520.000.000	2100	2.520.000.000			2.100	2.520.000.000	100,00	2100	100,00
7	BENGGKULU	2.075	2.490.000.000	2.070	2.484.000.000	-	-	2.070	2.484.000.000	99,76	2.070	99,76
1	Bengkulu Selatan	550	660.000.000	550	660.000.000			550	660.000.000	100,00	550	100,00
2	Kepahiang	200	240.000.000	200	240.000.000			200	240.000.000	100,00	200	100,00
3	Muko-muko	250	300.000.000	250	300.000.000			250	300.000.000	100,00	250	100,00
4	Rejang Lebong	250	300.000.000	245	294.000.000			245	294.000.000	98,00	245	98,00
5	Bengkulu Utara	200	240.000.000	200	240.000.000			200	240.000.000	100,00	200	100,00
6	Kaur	375	450.000.000	375	450.000.000			375	450.000.000	100,00	375	100,00
7	Lebong	250	300.000.000	250	300.000.000			250	300.000.000	100,00	250	100,00
8	Kota Bengkulu	50	60.000.000									
8	LAMPUNG	5.650	6.780.000.000	5.650	6.456.000.000	900	324.000.000	5.650	6.780.000.000	100,00	5.650	100,00
1	Lampung Barat	400	480.000.000	400	480.000.000			400	480.000.000	100,00	400	100,00
2	Lampung Timur	500	600.000.000	500	600.000.000			500	600.000.000	100,00	500	100,00
3	Tanggamus	500	600.000.000	500	600.000.000			500	600.000.000	100,00	500	100,00
4	Lampung Selatan	500	600.000.000	500	600.000.000			500	600.000.000	100,00	500	100,00
5	Lampung Tengah	500	600.000.000	500	600.000.000			500	600.000.000	100,00	500	100,00
6	Tulang Bawang	500	600.000.000	500	420.000.000	500	180.000.000	500	600.000.000	100,00	500	100,00
7	Pesawaran	500	600.000.000	500	600.000.000			500	600.000.000	100,00	500	100,00
8	Pring Sewu	500	600.000.000	500	600.000.000			500	600.000.000	100,00	500	100,00
9	Tulang Bawang Barat	400	480.000.000	400	336.000.000	400	144.000.000	400	480.000.000	100,00	400	100,00
10	Kota Metro	450	540.000.000	450	540.000.000			450	540.000.000	100,00	450	100,00
11	Pesisir Barat	500	600.000.000	500	600.000.000			500	600.000.000	100,00	500	100,00
12	Lampung Utara	400	480.000.000	400	480.000.000			400	480.000.000	100,00	400	100,00

No	Kabupaten / Kota	TOTAL PAGU		T A H A P A N								
				SP2D Tahap I (70%)		SP2D Tahap II (30%)		TOTAL SP2D			Realisasi Fisik	
		HA	(Rp)	HA	(Rp)	HA	(Rp)	HA	(Rp)	%	HA	%
9	BANGKA BELITUNG	600	720.000.000	600	504.000.000	600	216.000.000	600	720.000.000	100,00	600	100,00
1	Bangka	350	420.000.000	350	294.000.000	350	126.000.000	350	420.000.000	100,00	350	100,00
2	Bangka Selatan	250	300.000.000	250	210.000.000	250	90.000.000	250	300.000.000	100,00	250	100,00
10	JAWA BARAT	10.000	11.000.000.000	10.000	11.000.000.000	-	-	10.000	11.000.000.000	100,00	10.000	100,00
1	Tasikmalaya	1.000	1.100.000.000	1000	1.100.000.000			1.000	1.100.000.000	100,00	1000	100,00
2	Bandung	750	825.000.000	750	825.000.000			750	825.000.000	100,00	750	100,00
3	Bogor	500	550.000.000	500	550.000.000			500	550.000.000	100,00	500	100,00
4	Ciamis	1.000	1.100.000.000	1.000	1.100.000.000			1.000	1.100.000.000	100,00	1000	100,00
5	Cianjur	750	825.000.000	750	825.000.000			750	825.000.000	100,00	750	100,00
6	Cirebon	750	825.000.000	750	825.000.000			750	825.000.000	100,00	750	100,00
7	Garut	750	825.000.000	750	825.000.000			750	825.000.000	100,00	750	100,00
8	Kuningan	500	550.000.000	500	550.000.000			500	550.000.000	100,00	500	100,00
9	Majalengka	500	550.000.000	500	550.000.000			500	550.000.000	100,00	500	100,00
10	Purwakarta	500	550.000.000	500	550.000.000			500	550.000.000	100,00	500	100,00
11	Sumedang	750	825.000.000	750	825.000.000			750	825.000.000	100,00	750	100,00
12	Kota Tasikmalaya	500	550.000.000	500	550.000.000			500	550.000.000	100,00	500	100,00
13	Pangandaran	1.000	1.100.000.000	1000	1.100.000.000			1.000	1.100.000.000	100,00	1000	100,00
14	Sukabumi	500	550.000.000	500	550.000.000			500	550.000.000	100,00	500	100,00
15	Bandung Barat	250	275.000.000	250	275.000.000			250	275.000.000	100,00	250	100,00
11	JAWA TENGAH	12.050	13.255.000.000	12.050	13.255.000.000	-	-	12.050	13.255.000.000	100,00	12.050	100,00
1	Banjarnegara	400	440.000.000	400	440.000.000			400	440.000.000	100,00	400	100,00
2	Banyumas	750	825.000.000	750	825.000.000			750	825.000.000	100,00	750	100,00
3	Batang	500	550.000.000	500	550.000.000			500	550.000.000	100,00	500	100,00
4	Boyolali	500	550.000.000	500	550.000.000			500	550.000.000	100,00	500	100,00
5	Brebes	500	550.000.000	500	550.000.000			500	550.000.000	100,00	500	100,00
6	Demak	500	550.000.000	500	550.000.000			500	550.000.000	100,00	500	100,00
7	Grobogan	500	550.000.000	500	550.000.000			500	550.000.000	100,00	500	100,00
8	Jepara	200	220.000.000	200	220.000.000			200	220.000.000	100,00	200	100,00
9	Karanganyar	500	550.000.000	500	550.000.000			500	550.000.000	100,00	500	100,00
10	Kebumen	500	550.000.000	500	550.000.000			500	550.000.000	100,00	500	100,00
11	Kendal	200	220.000.000	200	220.000.000			200	220.000.000	100,00	200	100,00
12	Klaten	500	550.000.000	500	550.000.000			500	550.000.000	100,00	500	100,00
13	Magelang	500	550.000.000	500	550.000.000			500	550.000.000	100,00	500	100,00
14	Pati	500	550.000.000	500	550.000.000			500	550.000.000	100,00	500	100,00
15	Pekalongan	200	220.000.000	200	220.000.000			200	220.000.000	100,00	200	100,00
16	Purbalingga	500	550.000.000	500	550.000.000			500	550.000.000	100,00	500	100,00
17	Purworejo	500	550.000.000	500	550.000.000			500	550.000.000	100,00	500	100,00
18	Rembang	400	440.000.000	400	440.000.000			400	440.000.000	100,00	400	100,00
19	Semarang	500	550.000.000	500	550.000.000			500	550.000.000	100,00	500	100,00
20	Sragen	750	825.000.000	750	825.000.000			750	825.000.000	100,00	750	100,00
21	Sukoharjo	750	825.000.000	750	825.000.000			750	825.000.000	100,00	750	100,00
22	Tegal	500	550.000.000	500	550.000.000			500	550.000.000	100,00	500	100,00
23	Temanggung	500	550.000.000	500	550.000.000			500	550.000.000	100,00	500	100,00
24	Wonogiri	400	440.000.000	400	440.000.000			400	440.000.000	100,00	400	100,00
25	Wonosobo	500	550.000.000	500	550.000.000			500	550.000.000	100,00	500	100,00

No	Kabupaten / Kota	TOTAL PAGU		T A H A P A N								
				SP2D Tahap I (70%)		SP2D Tahap II (30%)		TOTAL SP2D			Realisasi Fisik	
				HA	(Rp)	HA	(Rp)	HA	(Rp)	%	HA	%
12	DI. YOGYAKARTA	1.450	1.595.000.000	1.450	1.595.000.000	-	-	1.450	1.595.000.000	100,00	1.450	100,00
1	Sleman	400	440.000.000	400	440.000.000			400	440.000.000	100,00	400	100,00
2	Bantul	400	440.000.000	400	440.000.000			400	440.000.000	100,00	400	100,00
3	Kulonprogo	400	440.000.000	400	440.000.000			400	440.000.000	100,00	400	100,00
4	Gunung Kidul	250	275.000.000	250	275.000.000			250	275.000.000	100,00	250	100,00
13	JAWA TIMUR	14.150	15.565.000.000	14.150	15.565.000.000	-	-	14.150	15.565.000.000	100,00	14.150	100,00
1	Banyuwangi	250	275.000.000	250	275.000.000			250	275.000.000	100,00	250	100,00
2	Blitar	500	550.000.000	500	550.000.000			500	550.000.000	100,00	500	100,00
3	Bondowoso	500	550.000.000	500	550.000.000			500	550.000.000	100,00	500	100,00
4	Gresik	500	550.000.000	500	550.000.000			500	550.000.000	100,00	500	100,00
5	Jombang	1.000	1.100.000.000	1000	1.100.000.000			1.000	1.100.000.000	100,00	1000	100,00
	Kediri	500	550.000.000	500	550.000.000			500	550.000.000	100,00	500	100,00
6	Lamongan	1.000	1.100.000.000	1000	1.100.000.000			1.000	1.100.000.000	100,00	1000	100,00
7	Lumajang	750	825.000.000	750	825.000.000			750	825.000.000	100,00	750	100,00
8	Madiun	500	550.000.000	500	550.000.000			500	550.000.000	100,00	500	100,00
	Magetan	1.000	1.100.000.000	1000	1.100.000.000			1.000	1.100.000.000	100,00	1000	100,00
	Malang	500	550.000.000	500	550.000.000			500	550.000.000	100,00	500	100,00
12	Nganjuk	750	825.000.000	750	825.000.000			750	825.000.000	100,00	750	100,00
13	Ngawi	1.000	1.100.000.000	1000	1.100.000.000			1.000	1.100.000.000	100,00	1000	100,00
14	Pacitan	750	825.000.000	750	825.000.000			750	825.000.000	100,00	750	100,00
15	Pasuruan	500	550.000.000	500	550.000.000			500	550.000.000	100,00	500	100,00
16	Ponorogo	1.000	1.100.000.000	1000	1.100.000.000			1.000	1.100.000.000	100,00	1000	100,00
17	Probolinggo	1.000	1.100.000.000	1000	1.100.000.000			1.000	1.100.000.000	100,00	1000	100,00
18	Situbondo	500	550.000.000	500	550.000.000			500	550.000.000	100,00	500	100,00
19	Trenggalek	500	550.000.000	500	550.000.000			500	550.000.000	100,00	500	100,00
20	Tulungagung	500	550.000.000	500	550.000.000			500	550.000.000	100,00	500	100,00
21	Tuban	650	715.000.000	650	715.000.000			650	715.000.000	100,00	650	100,00
14	BANTEN	1.500	1.650.000.000	1.500	1.650.000.000	-	-	1.500	1.650.000.000	100,00	1.500	100,00
1	Lebak	500	550.000.000	500	550.000.000			500	550.000.000	100,00	500	100,00
2	Pandeglang	500	550.000.000	500	550.000.000			500	550.000.000	100,00	500	100,00
3	Serang	500	550.000.000	500	550.000.000			500	550.000.000	100,00	500	100,00
15	BALI	3.400	3.740.000.000	3.400	3.608.000.000	400	132.000.000	3.400	3.740.000.000	100,00	3.400	100,00
1	Buleleng	1.000	1.100.000.000	1000	1.100.000.000			1.000	1.100.000.000	100,00	1000	100,00
2	Jembrana	1.000	1.100.000.000	1000	1.100.000.000			1.000	1.100.000.000	100,00	1000	100,00
3	Klungkung	500	550.000.000	500	550.000.000			500	550.000.000	100,00	500	100,00
4	Tabanan	500	550.000.000	500	550.000.000			500	550.000.000	100,00	500	100,00
5	Karangasem	400	440.000.000	400	308.000.000	400	132.000.000	400	440.000.000	100,00	400	100,00

No	Kabupaten / Kota	TOTAL PAGU		T A H A P A N								
				SP2D Tahap I (70%)		SP2D Tahap II (30%)		TOTAL SP2D			Realisasi Fisik	
				HA	(Rp)	HA	(Rp)	HA	(Rp)	%	HA	%
16	NTB	2.500	3.000.000.000	2.500	3.000.000.000	-	-	2.500	3.000.000.000	100,00	2.500	100,00
1	Bima	500	600.000.000	500	600.000.000			500	600.000.000	100,00	500	100,00
2	Lombok Tengah	500	600.000.000	500	600.000.000			500	600.000.000	100,00	500	100,00
3	Lombok Timur	500	600.000.000	500	600.000.000			500	600.000.000	100,00	500	100,00
4	Lombok Utara	500	600.000.000	500	600.000.000			500	600.000.000	100,00	500	100,00
5	Sumbawa	500	600.000.000	500	600.000.000			500	600.000.000	100,00	500	100,00
17	NTT	2.250	3.037.500.000	2.250	2.551.500.000	1.200	486.000.000	2.250	3.037.500.000	100,00	2.250	100,00
1	Ende	400	540.000.000	400	378.000.000	400	162.000.000	400	540.000.000	100,00	400	100,00
2	Manggarai Barat	250	337.500.000	250	337.500.000			250	337.500.000	100,00	250	100,00
3	Manggarai Timur	400	540.000.000	400	378.000.000	400	162.000.000	400	540.000.000	100,00	400	100,00
4	Ngada	400	540.000.000	400	540.000.000			400	540.000.000	100,00	400	100,00
5	Sumba Barat Daya	400	540.000.000	400	540.000.000			400	540.000.000	100,00	400	100,00
6	Timur Tengah Selatan	400	540.000.000	400	378.000.000	400	162.000.000	400	540.000.000	100,00	400	100,00
18	KALIMANTAN BARAT	2.000	2.700.000.000	2.000	2.700.000.000	-	-	2.000	2.700.000.000	100,00	2.000	100,00
1	Bengkayang	400	540.000.000	400	540.000.000			400	540.000.000	100,00	400	100,00
2	Kapuas Hulu	400	540.000.000	400	540.000.000			400	540.000.000	100,00	400	100,00
3	Mempawah	400	540.000.000	400	540.000.000			400	540.000.000	100,00	400	100,00
4	Sekadau	400	540.000.000	400	540.000.000			400	540.000.000	100,00	400	100,00
5	Sintang	400	540.000.000	400	540.000.000			400	540.000.000	100,00	400	100,00
19	KALIMANTAN TENGAH	1.200	1.620.000.000	1.200	1.458.000.000	400	162.000.000	1.200	1.620.000.000	100,00	1.200	100,00
1	Barito Timur	400	540.000.000	400	540.000.000			400	540.000.000	100,00	400	100,00
2	Barito Utara	400	540.000.000	400	540.000.000			400	540.000.000	100,00	400	100,00
3	Pulang Pisau	400	540.000.000	400	378.000.000	400	162.000.000	400	540.000.000	100,00	400	100,00
20	KALIMANTAN SELATAN	1.650	2.227.500.000	1.650	2.227.500.000	-	-	1.650	2.227.500.000	100,00	1.610	97,58
1	Balangan	250	337.500.000	250	337.500.000			250	337.500.000	100,00	250	100,00
2	Hulu Sungai Tengah	250	337.500.000	250	337.500.000			250	337.500.000	100,00	250	100,00
3	Hulu Sungai Utara	250	337.500.000	250	337.500.000			250	337.500.000	100,00	250	100,00
4	Kota Baru	250	337.500.000	250	337.500.000			250	337.500.000	100,00	250	100,00
5	Tabalong	250	337.500.000	250	337.500.000			250	337.500.000	100,00	210	84,00
6	Tanah Bumbu	150	202.500.000	150	202.500.000			150	202.500.000	100,00	150	100,00
7	Tapin	250	337.500.000	250	337.500.000			250	337.500.000	100,00	250	100,00
21	KALIMANTAN TIMUR	1.100	1.485.000.000	1.100	1.039.500.000	1.100	445.500.000	1.100	1.485.000.000	100,00	1.100	100,00
1	Penajam Paser Utara	1.100	1.485.000.000	1100	1.039.500.000	1100	445.500.000	1.100	1.485.000.000	100,00	1100	100,00

No	Kabupaten / Kota	TOTAL PAGU		TAHAPAN								
				SP2D Tahap I (70%)		SP2D Tahap II (30%)		TOTAL SP2D			Realisasi Fisik	
				HA	(Rp)	HA	(Rp)	HA	(Rp)	%	HA	%
22	SULAWESI UTARA	900	1.080.000.000	900	1.080.000.000	-	-	900	1.080.000.000	100,00	900	100,00
1	Bolaang Mongondow	250	300.000.000	250	300.000.000			250	300.000.000	100,00	250	100,00
2	Bolaang Mongondow Utara	250	300.000.000	250	300.000.000			250	300.000.000	100,00	250	100,00
3	Minahasa Selatan	200	240.000.000	200	240.000.000			200	240.000.000	100,0	200	100,00
4	Minahasa Utara	200	240.000.000	200	240.000.000			200	240.000.000	100,0	200	100,00
23	SULAWESI TENGAH	2.050	2.460.000.000	2.050	2.460.000.000	-	-	2.050	2.460.000.000	100,00	2.050	100,00
1	Donggala	400	480.000.000	400	480.000.000			400	480.000.000	100,00	400	100,00
2	Morowali Utara	300	360.000.000	300	360.000.000			300	360.000.000	100,00	300	100,00
3	Parigi Moutong	300	360.000.000	300	360.000.000			300	360.000.000	100,00	300	100,00
4	Poso	400	480.000.000	400	480.000.000			400	480.000.000	100,00	400	100,00
5	Tojo Una Una	250	300.000.000	250	300.000.000			250	300.000.000	100,00	250	100,00
6	Morowali	300	360.000.000	300	360.000.000			300	360.000.000	100,00	300	100,00
7	Banggai	100	120.000.000	100	120.000.000			100	120.000.000	100,00	100	100,00
24	SULAWESI SELATAN	8.200	9.840.000.000	8.200	9.480.000.000	1.000	360.000.000	8.200	9.840.000.000	100,00	8.200	100,00
1	Bantaeng	400	480.000.000	400	480.000.000			400	480.000.000	100,00	400	100,00
2	Bulukumba	500	600.000.000	500	420.000.000	500	180.000.000	500	600.000.000	100,00	500	100,00
3	Enrekang	500	600.000.000	500	600.000.000			500	600.000.000	100,00	500	100,00
4	Gowa	500	600.000.000	500	600.000.000			500	600.000.000	100,00	500	100,00
5	Jeneponto	500	600.000.000	500	600.000.000			500	600.000.000	100,00	500	100,00
6	Luwu	550	660.000.000	550	660.000.000			550	660.000.000	100,00	550	100,00
7	Luwu Timur	550	660.000.000	550	660.000.000			550	660.000.000	100,00	550	100,00
8	Luwu Utara	550	660.000.000	550	660.000.000			550	660.000.000	100,00	550	100,00
9	Maros	500	600.000.000	500	600.000.000			500	600.000.000	100,00	500	100,00
10	Pangkajene Kepulauan	500	600.000.000	500	600.000.000			500	600.000.000	100,00	500	100,00
11	Pinrang	650	780.000.000	650	780.000.000			650	780.000.000	100,00	650	100,00
12	Sidenreng Rappang	500	600.000.000	500	420.000.000	500	180.000.000	500	600.000.000	100,00	500	100,00
13	Sinjai	500	600.000.000	500	600.000.000			500	600.000.000	100,00	500	100,00
14	Soppeng	500	600.000.000	500	600.000.000			500	600.000.000	100,00	500	100,00
15	Wajo	500	600.000.000	500	600.000.000			500	600.000.000	100,00	500	100,00
16	Toraja Utara	500	600.000.000	500	600.000.000			500	600.000.000	100,00	500	100,00

Lampiran 6.

TARGET DAN REALISASI KEUANGAN DAN FISIK KEGIATAN PERPIPAAN/PERPOMPAAN TA. 2017

No	Kabupaten / Kota	TOTAL PAGU		TAHAPAN				
		UNIT	(Rp)	TOTAL SP2D			Realisasi Fisik	
				UNIT	(Rp)	%	UNIT	%
	NASIONAL	500	40.000.000.000	496	39.680.000.000	99,20	492	99,39
1	ACEH	21	1.680.000.000	21	1.680.000.000	100,00	21	100,00
1	Aceh Besar	2	160.000.000	2	160.000.000	100	2	100,00
2	Aceh Tamiang	3	240.000.000	3	240.000.000	100	3	100,00
3	Aceh Tenggara	2	160.000.000	2	160.000.000	100	2	100,00
4	Bireuen	2	160.000.000	2	160.000.000	100	2	100,00
5	Pidie	2	160.000.000	2	160.000.000	100	2	100,00
6	Pidie Jaya	3	240.000.000	3	240.000.000	100	3	100,00
7	Aceh Barat Daya	2	160.000.000	2	160.000.000	100	2	100,00
8	Aceh Selatan	2	160.000.000	2	160.000.000	100	2	100,00
9	Gayo Lues	2	160.000.000	2	160.000.000	100	2	100,00
10	Kota Langsa	1	80.000.000	1	80.000.000	100	1	100,00
2	SUMATERA UTARA	20	1.600.000.000	20	1.600.000.000	100,00	20	100,00
1	Tapanuli Selatan	3	240.000.000	3	240.000.000	100	3	100,00
2	Tapanuli Utara	3	240.000.000	3	240.000.000	100	3	100,00
3	Kota Tebing Tinggi	2	160.000.000	2	160.000.000	100	2	100,00
4	Labuhan Batu	3	240.000.000	3	240.000.000	100	3	100,00
5	Padang Lawas	3	240.000.000	3	240.000.000	100	3	100,00
6	Padang Lawas Utara	3	240.000.000	3	240.000.000	100	3	100,00
7	Karo	3	240.000.000	3	240.000.000	100	3	100,00
3	SUMATERA BARAT	5	400.000.000	5	400.000.000	100,00	5	100,00
1	Pesisir Selatan	3	240.000.000	3	240.000.000	100	3	100,00
2	Sijunjung	2	160.000.000	2	160.000.000	100	2	100,00
4	RIAU	6	480.000.000	6	480.000.000	100,00	6	100,00
1	Kampar	2	160.000.000	2	160.000.000	100	2	100,00
2	Kuantan Singingi	2	160.000.000	2	160.000.000	100	2	100,00
3	Siak	2	160.000.000	2	160.000.000	100	2	100,00
5	JAMBI	29	2.320.000.000	27	2.160.000.000	93,10	27	97,14
1	Bungo	2	160.000.000	2	160.000.000	100	2	100,00
2	Kerinci	5	400.000.000	3	240.000.000	60	3	80,00
3	Merangin	6	480.000.000	6	480.000.000	100	6	100,00
4	Sarolangun	6	480.000.000	6	480.000.000	100	6	100,00
5	Tanjab Barat	3	240.000.000	3	240.000.000	100	3	100,00
6	Tanjab Timur	2	160.000.000	2	160.000.000	100	2	100,00
7	Kota Sungai Penuh	5	400.000.000	5	400.000.000	100	5	100,00
6	SUMATERA SELATAN	21	1.680.000.000	21	1.680.000.000	100,00	21	100,00
1	Empat Lawang	1	80.000.000	1	80.000.000	100	1	100,00
2	Muara Enim	3	240.000.000	3	240.000.000	100	3	100,00
3	Lubuk Linggau	5	400.000.000	5	400.000.000	100	5	100,00
4	Ogan Komering Ilir	3	240.000.000	3	240.000.000	100	3	100,00
5	OKU Timur	2	160.000.000	2	160.000.000	100	2	100,00
6	Kota Palembang	2	160.000.000	2	160.000.000	100	2	100,00
7	Lahat	3	240.000.000	3	240.000.000	100	3	100,00
8	Penukal Abab Lematang Ilir	2	160.000.000	2	160.000.000	100	2	100,00

No	Kabupaten / Kota	TOTAL PAGU		T A H A P A N				
		UNIT	(Rp)	TOTAL SP2D			Realisasi Fisik	
				UNIT	(Rp)	%	UNIT	%
7	BENGKULU	5	400.000.000	5	400.000.000	100,00	5	100,00
1	Bengkulu Utara	3	240.000.000	3	240.000.000	100	3	100,00
2	Kaur	2	160.000.000	2	160.000.000	100	2	100,00
8	LAMPUNG	20	1.600.000.000	20	1.600.000.000	100,00	20	100,00
1	Tanggamus	2	160.000.000	2	160.000.000	100	2	100,00
2	Way Kanan	2	160.000.000	2	160.000.000	100	2	100,00
3	Lampung Selatan	2	160.000.000	2	160.000.000	100	2	100,00
4	Lampung Tengah	4	320.000.000	4	320.000.000	100	4	100,00
5	Tulang Bawang	2	160.000.000	2	160.000.000	100	2	100,00
6	Mesuji	2	160.000.000	2	160.000.000	100	2	100,00
7	Pring Sewu	2	160.000.000	2	160.000.000	100	2	100,00
8	Tulang Bawang Barat	2	160.000.000	2	160.000.000	100	2	100,00
9	Kota Metro	2	160.000.000	2	160.000.000	100	2	100,00
9	BANGKA BELITUNG	2	160.000.000	2	160.000.000	100,00	2	100,00
1	Bangka Selatan	2	160.000.000	2	160.000.000	100	2	100,00
10	JAWA BARAT	34	2.720.000.000	34	2.720.000.000	100,00	34	100,00
1	Tasikmalaya	2	160.000.000	2	160.000.000	100	2	100,00
2	Bandung	2	160.000.000	2	160.000.000	100	2	100,00
3	Bandung Barat	1	80.000.000	1	80.000.000	100	1	100,00
4	Bogor	2	160.000.000	2	160.000.000	100	2	100,00
5	Ciamis	4	320.000.000	4	320.000.000	100	4	100,00
6	Garut	2	160.000.000	2	160.000.000	100	2	100,00
7	Indramayu	2	160.000.000	2	160.000.000	100	2	100,00
8	Karawang	2	160.000.000	2	160.000.000	100	2	100,00
9	Kuningan	2	160.000.000	2	160.000.000	100	2	100,00
10	Majalengka	2	160.000.000	2	160.000.000	100	2	100,00
11	Subang	2	160.000.000	2	160.000.000	100	2	100,00
12	Sukabumi	2	160.000.000	2	160.000.000	100	2	100,00
13	Sumedang	2	160.000.000	2	160.000.000	100	2	100,00
14	Kota Tasikmalaya	1	80.000.000	1	80.000.000	100	1	100,00
15	Cianjur	2	160.000.000	2	160.000.000	100	2	100,00
16	Pangandaran	4	320.000.000	4	320.000.000	100	4	100,00
11	JAWA TENGAH	37	2.960.000.000	37	2.960.000.000	100,00	37	100,00
1	Banjarnegara	2	160.000.000	2	160.000.000	100	2	100,00
2	Banyumas	2	160.000.000	2	160.000.000	100	2	100,00
3	Boyolali	2	160.000.000	2	160.000.000	100	2	100,00
4	Brebes	2	160.000.000	2	160.000.000	100	2	100,00
5	Cilacap	1	80000000	1	80.000.000	100	1	100,00
6	Demak	2	160.000.000	2	160.000.000	100	2	100,00
7	Karanganyar	2	160.000.000	2	160.000.000	100	2	100,00
8	Kebumen	2	160.000.000	2	160.000.000	100	2	100,00
9	Kendal	2	160.000.000	2	160.000.000	100	2	100,00
10	Klaten	2	160.000.000	2	160.000.000	100	2	100,00
11	Pati	3	240.000.000	3	240.000.000	100	3	100,00
12	Purbalingga	2	160.000.000	2	160.000.000	100	2	100,00
13	Purworejo	1	80.000.000	1	80.000.000	100	1	100,00
14	Rembang	2	160.000.000	2	160.000.000	100	2	100,00
15	Semarang	3	240.000.000	3	240.000.000	100	3	100,00
16	Sragen	2	160.000.000	2	160.000.000	100	2	100,00
17	Sukoharjo	1	80.000.000	1	80.000.000	100	1	100,00
18	Temanggung	2	160.000.000	2	160.000.000	100	2	100,00
19	Wonogiri	2	160.000.000	2	160.000.000	100	2	100,00

No	Kabupaten / Kota	TOTAL PAGU		T A H A P A N				
		UNIT	(Rp)	TOTAL SP2D			Realisasi Fisik	
				UNIT	(Rp)	%	UNIT	%
12	DI. YOGYAKARTA	6	480.000.000	6	480.000.000	100,00	6	100,00
1	Bantul	2	160.000.000	2	160.000.000	100	2	100,00
2	Kulonprogo	2	160.000.000	2	160.000.000	100	2	100,00
3	Gunung Kidul	2	160.000.000	2	160.000.000	100	2	100,00
13	JAWA TIMUR	37	2.960.000.000	37	2.960.000.000	100,00	37	100,00
1	Bangkalan	2	160.000.000	2	160.000.000	100	2	100,00
2	Bondowoso	2	160.000.000	2	160.000.000	100	2	100,00
3	Gresik	2	160.000.000	2	160.000.000	100	2	100,00
4	Jombang	2	160.000.000	2	160.000.000	100	2	100,00
5	Lamongan	2	160.000.000	2	160.000.000	100	2	100,00
6	Lumajang	2	160.000.000	2	160.000.000	100	2	100,00
7	Magetan	2	160.000.000	2	160.000.000	100	2	100,00
8	Malang	2	160.000.000	2	160.000.000	100	2	100,00
9	Nganjuk	2	160.000.000	2	160.000.000	100	2	100,00
10	Ngawi	3	240.000.000	3	240.000.000	100	3	100,00
11	Pacitan	2	160.000.000	2	160.000.000	100	2	100,00
12	Ponorogo	2	160.000.000	2	160.000.000	100	2	100,00
13	Probolinggo	2	160.000.000	2	160.000.000	100	2	100,00
14	Sampang	2	160.000.000	2	160.000.000	100	2	100,00
15	Sumenep	3	240.000.000	3	240.000.000	100	3	100,00
16	Trenggalek	2	160.000.000	2	160.000.000	100	2	100,00
17	Tuban	3	240.000.000	3	240.000.000	100	3	100,00
14	BANTEN	6	480.000.000	6	480.000.000	100,00	6	100,00
1	Lebak	2	160.000.000	2	160.000.000	100	2	100,00
2	Pandeglang	2	160.000.000	2	160.000.000	100	2	100,00
3	Serang	2	160.000.000	2	160.000.000	100	2	100,00
15	BALI	14	1.120.000.000	14	1.120.000.000	100	14	100,00
1	Badung	2	160.000.000	2	160.000.000	100	2	100,00
2	Buleleng	2	160.000.000	2	160.000.000	100	2	100,00
3	Gianyar	2	160.000.000	2	160.000.000	100	2	100,00
4	Jembrana	3	240.000.000	3	240.000.000	100	3	100,00
5	Klungkung	2	160.000.000	2	160.000.000	100	2	100,00
6	Tabanan	3	240.000.000	3	240.000.000	100	3	100,00
16	NTB	15	1.200.000.000	13	1.040.000.000	86,67	13	83,33
1	Bima	3	240.000.000	3	240.000.000	100	3	100,00
2	Dompus	2	160.000.000	-	-	-	-	-
3	Lombok Barat	2	160.000.000	2	160.000.000	100	2	100,00
4	Lombok Tengah	3	240.000.000	3	240.000.000	100	3	100,00
5	Lombok Timur	2	160.000.000	2	160.000.000	100	2	100,00
6	Sumbawa	3	240.000.000	3	240.000.000	100	3	100,00
17	NTT	19	1.520.000.000	19	1.520.000.000	100,00	19	100,00
1	Manggarai Barat	4	320.000.000	4	320.000.000	100	4	100,00
2	Sabu Raijua	3	240.000.000	3	240.000.000	100	3	100,00
3	Sikka	2	160.000.000	2	160.000.000	100	2	100,00
4	Sumba Barat	2	160.000.000	2	160.000.000	100	2	100,00
5	Sumba Barat Daya	2	160.000.000	2	160.000.000	100	2	100,00
6	Sumba Tengah	2	160.000.000	2	160.000.000	100	2	100,00
7	Sumba Timur	2	160.000.000	2	160.000.000	100	2	100,00
8	Nagakeo	2	160.000.000	2	160.000.000	100	2	100,00

No	Kabupaten / Kota	TOTAL PAGU		T A H A P A N				
		UNIT	(Rp)	TOTAL SP2D			Realisasi Fisik	
				UNIT	(Rp)	%	UNIT	%
18	KALIMANTAN BARAT	18	1.440.000.000	18	1.440.000.000	100,00	18	100,00
1	Bengkayang	3	240.000.000	3	240.000.000	100	3	100,00
2	Kapuas Hulu	4	320.000.000	4	320.000.000	100	4	100,00
3	Kayong Utara	2	160.000.000	2	160.000.000	100	2	100,00
4	Kubu Raya	2	160.000.000	2	160.000.000	100	2	100,00
5	Landak	3	240.000.000	3	240.000.000	100	3	100,00
6	Sanggau	2	160.000.000	2	160.000.000	100	2	100,00
7	Sekadau	2	160.000.000	2	160.000.000	100	2	100,00
19	KALIMANTAN TENGAH	10	800.000.000	10	800.000.000	100,00	10	100,00
1	Barito Selatan	4	320.000.000	4	320.000.000	100	4	100,00
2	Kota Waringin Barat	2	160.000.000	2	160.000.000	100	2	100,00
3	Pulang Pisau	2	160.000.000	2	160.000.000	100	2	100,00
4	Seruyan	2	160.000.000	2	160.000.000	100	2	100,00
20	KALIMANTAN SELATAN	22	1.760.000.000	22	1.760.000.000	100,00	22	100,00
1	Balangan	2	160.000.000	2	160.000.000	100	2	100,00
2	Banjar	3	240.000.000	3	240.000.000	100	3	100,00
3	Hulu Sungai Selatan	2	160.000.000	2	160.000.000	100	2	100,00
4	Hulu Sungai Tengah	2	160.000.000	2	160.000.000	100	2	100,00
5	Hulu Sungai Utara	3	240.000.000	3	240.000.000	100	3	100,00
6	Kota Baru	2	160.000.000	2	160.000.000	100	2	100,00
7	Tabalong	3	240.000.000	3	240.000.000	100	3	100,00
8	Tanah Bumbu	3	240.000.000	3	240.000.000	100	3	100,00
9	Tanah Laut	2	160.000.000	2	160.000.000	100	2	100,00
21	KALIMANTAN TIMUR	11	880.000.000	11	880.000.000	100,00	8	100,00
1	Kutai Barat	2	160.000.000	2	160.000.000	100	2	100,00
2	Kutai Kertanegara	3	240.000.000	3	240.000.000	100	3	100,00
3	Penajam Paser Utara	2	160.000.000	2	160.000.000	100	2	100,00
4	Mahakam Hulu	1	80.000.000	1	80.000.000	100	1	100,00
5	Kota Samarinda	3	240.000.000	3	240.000.000	100	3	100,00
22	KALIMANTAN UTARA	2	160.000.000	2	160.000.000	100,00	2	100,00
1	Nunukan	2	160.000.000	2	160.000.000	100	2	100,00
23	SULAWESI UTARA	9	720.000.000	9	720.000.000	100,00	9	100,00
1	Bolaang Mongondow	3	240.000.000	3	240.000.000	100	3	100,00
2	Bolaang Mongondow Utara	2	160.000.000	2	160.000.000	100	2	100,00
3	Kepulauan Talaud	1	80.000.000	1	80.000.000	100	1	100,00
4	Kota Tomohon	2	160.000.000	2	160.000.000	100	2	100,00
5	Minahasa Tenggara	1	80.000.000	1	80.000.000	100	1	100,00
24	SULAWESI TENGAH	8	640.000.000	8	640.000.000	100,00	7	100,00
1	Morowali Utara	1	80.000.000	1	80.000.000	100	1	100,00
2	Poso	3	240.000.000	3	240.000.000	100	3	100,00
3	Toli-toli	2	160.000.000	2	160.000.000	100	1	100,00
4	Kota Palu	2	160.000.000	2	160.000.000	100	2	100,00

No	Kabupaten / Kota	TOTAL PAGU		T A H A P A N				
		UNIT	(Rp)	TOTAL SP2D			Realisasi Fisik	
				UNIT	(Rp)	%	UNIT	%
25	SULAWESI SELATAN	36	2.880.000.000	36	2.880.000.000	100,00	36	100,00
1	Bantaeng	2	160.000.000	2	160.000.000	100	2	100,00
2	Bone	4	320.000.000	4	320.000.000	100	4	100,00
3	Bulukumba	3	240.000.000	3	240.000.000	100	3	100,00
4	Enrekang	3	240.000.000	3	240.000.000	100	3	100,00
5	Gowa	3	240.000.000	3	240.000.000	100	3	100,00
6	Jeneponto	3	240.000.000	3	240.000.000	100	3	100,00
7	Luwu	2	160.000.000	2	160.000.000	100	2	100,00
8	Maros	3	240.000.000	3	240.000.000	100	3	100,00
9	Pinrang	3	240.000.000	3	240.000.000	100	3	100,00
10	Sinjai	3	240.000.000	3	240.000.000	100	3	100,00
11	Soppeng	2	160.000.000	2	160.000.000	100	2	100,00
12	Toraja Utara	3	240.000.000	3	240.000.000	100	3	100,00
13	Kota Palopo	2	160.000.000	2	160.000.000	100	2	100,00
26	SULAWESI TENGGARA	20	1.600.000.000	20	1.600.000.000	100,00	20	100,00
1	Bombana	3	240.000.000	3	240.000.000	100	3	100,00
2	Kolaka	3	240.000.000	3	240.000.000	100	3	100,00
3	Kolaka Utara	2	160.000.000	2	160.000.000	100	2	100,00
4	Konawe	2	160.000.000	2	160.000.000	100	2	100,00
5	Konawe Selatan	2	160.000.000	2	160.000.000	100	2	100,00
6	Konawe Utara	2	160.000.000	2	160.000.000	100	2	100,00
7	Kabupaten Bau - Bau	2	160.000.000	2	160.000.000	100	2	100,00
8	Muna Barat	2	160.000.000	2	160.000.000	100	2	100,00
9	Kota Kendari	2	160.000.000	2	160.000.000	100	2	100,00
27	GORONTALO	10	800.000.000	10	800.000.000	100,00	10	100,00
1	Boalemo	4	320.000.000	4	320.000.000	100	4	100,00
2	Bone Bolango	2	160.000.000	2	160.000.000	100	2	100,00
3	Pohuwato	2	160.000.000	2	160.000.000	100	2	100,00
4	Gorontalo Utara	2	160.000.000	2	160.000.000	100	2	100,00
28	SULAWESI BARAT	15	1.200.000.000	15	1.200.000.000	100,00	15	100,00
1	Majene	2	160.000.000	2	160.000.000	100	2	100,00
2	Mamasa	3	240.000.000	3	240.000.000	100	3	100,00
3	Mamuju	2	160.000.000	2	160.000.000	100	2	100,00
4	Mamuju Tengah	3	240.000.000	3	240.000.000	100	3	100,00
5	Mamuju Utara	2	160.000.000	2	160.000.000	100	2	100,00
6	Polewali Mandar	3	240.000.000	3	240.000.000	100	3	100,00
29	MALUKU	10	800.000.000	10	800.000.000	100,00	10	100,00
1	Kepulauan Buru	2	160.000.000	2	160.000.000	100	2	100,00
2	Maluku Tengah	2	160.000.000	2	160.000.000	100	2	100,00
3	Seram Bagian Barat	2	160.000.000	2	160.000.000	100	2	100,00
4	Seram Bagian Timur	4	320.000.000	4	320.000.000	100	4	100,00
5	Buru Selatan	-	-		-			
30	MALUKU UTARA	10	800.000.000	10	800.000.000	100,00	10	100,00
1	Halmahera Selatan	2	160.000.000	2	160.000.000	100	2	100,00
2	Halmahera Tengah	2	160.000.000	2	160.000.000	100	2	100,00
3	Halmahera Timur	2	160.000.000	2	160.000.000	100	2	100,00
4	Halmahera Utara	2	160.000.000	2	160.000.000	100	2	100,00
5	Halmahera Barat	2	160.000.000	2	160.000.000	100	2	100,00

Lampiran 8.

TARGET DAN REALISASI KEUANGAN DAN FISIK KEGIATAN EMBUNG TA. 2017

No	Kabupaten / Kota	TOTAL PAGU		T A H A P A N					Keterangan
				TOTAL SP2D			Realisasi Fisik		
		UNIT	(Rp)	UNIT	(Rp)	%	UNIT	%	
	NASIONAL	500	50.000.000.000	490	49.000.000.000	98,00	487	98,37	
1	ACEH	27	2.700.000.000	27	2.700.000.000	100	27	100,00	
1	Aceh Besar	5	500.000.000	5	500.000.000	100	5	100,00	
2	Aceh Tamiang	3	300.000.000	3	300.000.000	100	3	100,00	
3	Aceh Tenggara	3	300.000.000	3	300.000.000	100	3	100,00	
4	Aceh Timur	3	300.000.000	3	300.000.000	100	3	100,00	
5	Aceh Utara	4	400.000.000	4	400.000.000	100	4	100,00	
6	Bireuen	3	300.000.000	3	300.000.000	100	3	100,00	
7	Nagan Raya	3	300.000.000	3	300.000.000	100	3	100,00	
8	Pidie Jaya	3	300.000.000	3	300.000.000	100	3	100,00	
2	SUMATERA UTARA	33	3.300.000.000	33	3.300.000.000	100	33	100,00	
1	Dairi	4	400.000.000	4	400.000.000	100	4	100,00	
2	Humbang Hasundutan	3	300.000.000	3	300.000.000	100	3	100,00	
3	Samosir	3	300.000.000	3	300.000.000	100	3	100,00	
4	Simalungun	4	400.000.000	4	400.000.000	100	4	100,00	
5	Tapanuli Selatan	3	300.000.000	3	300.000.000	100	3	100,00	
6	Tapanuli Tengah	3	300.000.000	3	300.000.000	100	3	100,00	
7	Tapanuli Utara	5	500.000.000	5	500.000.000	100	5	100,00	
8	Labuhan Batu	3	300.000.000	3	300.000.000	100	3	100,00	
9	Karo	5	500.000.000	5	500.000.000	100	5	100,00	
3	SUMATERA BARAT	14	1.400.000.000	14	1.400.000.000	100	14	100,00	
1	Pasaman Barat	3	300.000.000	3	300.000.000	100	3	100,00	
2	Pesisir Selatan	1	100.000.000	1	100.000.000	100	1	100,00	
3	Sijunjung	3	300.000.000	3	300.000.000	100	3	100,00	
4	Solok Selatan	4	400.000.000	4	400.000.000	100	4	100,00	
5	Tanah Datar	3	300.000.000	3	300.000.000	100	3	100,00	
4	JAMBI	16	1.600.000.000	11	1.100.000.000	69	11	93,33	
1	Kerinci	4	400.000.000	4	400.000.000	100	4	80,00	
2	Merangin	3	300.000.000	3	300.000.000	100	3	100,00	
3	Sarolangun	4	400.000.000	4	400.000.000	100	4	100,00	
4	Tanjab Timur	5	500.000.000	0	0	-	-	-	
5	SUMATERA SELATAN	20	2.000.000.000	20	2.000.000.000	100	18	90,48	
1	Empat Lawang	3	300.000.000	3	300.000.000	100	3	100,00	
2	Ogan Komering Ilir	4	400.000.000	4	400.000.000	100	4	100,00	
3	OKU Selatan	3	300.000.000	3	300.000.000	100	3	100,00	
4	Penukal Abab Lematang Ilir	2	200.000.000	2	200.000.000	100	2	100,00	
5	Musi Banyu Asin	3	300.000.000	3	300.000.000	100	1	33,33	Di lokasi sedang banjir
6	OKU Timur	3	300.000.000	3	300.000.000	100	3	100,00	
7	Lahat	2	200.000.000	2	200.000.000	100	2	100,00	Realokasi dari Ogan Ilir sebanyak 2 (dua) unit
6	LAMPUNG	20	2.000.000.000	20	2.000.000.000	100	20	100,00	
1	Lampung Timur	4	400.000.000	4	400.000.000	100	4	100,00	
2	Way Kanan	3	300.000.000	3	300.000.000	100	3	100,00	
3	Lampung Tengah	4	400.000.000	4	400.000.000	100	4	100,00	
4	Mesuji	3	300.000.000	3	300.000.000	100	3	100,00	
5	Tulang Bawang Barat	3	300.000.000	3	300.000.000	100	3	100,00	
6	Pesisir Barat	3	300.000.000	3	300.000.000	100	3	100,00	

No	Kabupaten / Kota	TOTAL PAGU		TAHAPAN					Keterangan
				TOTAL SP2D			Realisasi Fisik		
		UNIT	(Rp)	UNIT	(Rp)	%	UNIT	%	
7	JAWA BARAT	43	4.300.000.000	43	4.300.000.000	100	43	100,00	
1	Bandung	4	400.000.000	4	400.000.000	100	4	100,00	
2	Bandung Barat	2	200.000.000	2	200.000.000	100	2	100,00	
3	Bogor	3	300.000.000	3	300.000.000	100	3	100,00	
4	Cianjur	4	400.000.000	4	400.000.000	100	4	100,00	
5	Indramayu	4	400.000.000	4	400.000.000	100	4	100,00	
6	Karawang	2	200.000.000	2	200.000.000	100	2	100,00	
7	Subang	3	300.000.000	3	300.000.000	100	3	100,00	
8	Sukabumi	4	400.000.000	4	400.000.000	100	4	100,00	
9	Kota Tasikmalaya	2	200.000.000	2	200.000.000	100	2	100,00	
10	Pangandaran	5	500.000.000	5	500.000.000	100	5	100,00	
11	Ciamis	4	400.000.000	4	400.000.000	100	4	100,00	
12	Garut	3	300.000.000	3	300.000.000	100	3	100,00	
13	Tasikmalaya	3	300.000.000	3	300.000.000	100	3	100,00	
8	JAWA TENGAH	45	4.500.000.000	45	4.500.000.000	100	45	100,00	
1	Banyumas	3	300.000.000	3	300.000.000	100	3	100,00	
2	Boyolali	3	300.000.000	3	300.000.000	100	3	100,00	
3	Jepara	4	400.000.000	4	400.000.000	100	4	100,00	
4	Karanganyar	5	500.000.000	5	500.000.000	100	5	100,00	
5	Kebumen	5	500.000.000	5	500.000.000	100	5	100,00	
6	Kendal	1	100.000.000	1	100.000.000	100	1	100,00	
7	Klaten	4	400.000.000	4	400.000.000	100	4	100,00	
8	Pati	5	500.000.000	5	500.000.000	100	5	100,00	
9	Purbalingga	2	200.000.000	2	200.000.000	100	2	100,00	
10	Rembang	3	300.000.000	3	300.000.000	100	3	100,00	
11	Sragen	3	300.000.000	3	300.000.000	100	3	100,00	
12	Temanggung	3	300.000.000	3	300.000.000	100	3	100,00	
13	Wonogiri	4	400.000.000	4	400.000.000	100	4	100,00	
9	DI. YOGYAKARTA	4	400.000.000	4	400.000.000	100	4	100,00	
1	Sleman	4	400.000.000	4	400.000.000	100	4	100,00	
10	JAWA TIMUR	63	6.300.000.000	63	6.300.000.000	100	63	100,00	
1	Blitar	2	200.000.000	2	200.000.000	100	2	100,00	
2	Bondowoso	3	300.000.000	3	300.000.000	100	3	100,00	
3	Jombang	4	400.000.000	4	400.000.000	100	4	100,00	
5	Lumajang	5	500.000.000	5	500.000.000	100	5	100,00	
6	Magetan	5	500.000.000	5	500.000.000	100	5	100,00	
7	Malang	4	400.000.000	4	400.000.000	100	4	100,00	
8	Nganjuk	4	400.000.000	4	400.000.000	100	4	100,00	
9	Ngawi	4	400.000.000	4	400.000.000	100	4	100,00	
10	Pacitan	5	500.000.000	5	500.000.000	100	5	100,00	
11	Ponorogo	5	500.000.000	5	500.000.000	100	5	100,00	
12	Probolinggo	5	500.000.000	5	500.000.000	100	5	100,00	
13	Situbondo	2	200.000.000	2	200.000.000	100	2	100,00	
14	Sumenep	5	500.000.000	5	500.000.000	100	5	100,00	
15	Tuban	4	400.000.000	4	400.000.000	100	4	100,00	
16	Lamongan	4	400.000.000	4	400.000.000	100	4	100,00	
17	Tulung Agung	2	200.000.000	2	200.000.000	100	2	100,00	
11	BALI	7	700.000.000	7	700.000.000	100	7	100,00	
1	Jembrana	3	300.000.000	3	300.000.000	100	3	100,00	
2	Tabanan	4	400.000.000	4	400.000.000	100	4	100,00	
12	NTB	21	2.100.000.000	16	1.600.000.000	76	16	83,33	
1	Bima	3	300.000.000	3	300.000.000	100	3	100,00	
2	Dompu	5	500.000.000		-	-	-	-	Tidak dilaksanakan
3	Lombok Barat	3	300.000.000	3	300.000.000	100	3	100,00	
4	Lombok Tengah	4	400.000.000	4	400.000.000	100	4	100,00	
5	Lombok Timur	3	300.000.000	3	300.000.000	100	3	100,00	
6	Sumbawa	3	300.000.000	3	300.000.000	100	3	100,00	

No	Kabupaten / Kota	TOTAL PAGU		TAHAPAN					Keterangan
				TOTAL SP2D			Realisasi Fisik		
		UNIT	(Rp)	UNIT	(Rp)	%	UNIT	%	
13	NTT	34	3.400.000.000	34	3.400.000.000	100	33	96,97	
1	Ende	4	400.000.000	4	400.000.000	100	4	100,00	
2	Flores Timur	3	300.000.000	3	300.000.000	100	3	100,00	
3	Manggarai Barat	3	300.000.000	3	300.000.000	100	3	100,00	
4	Manggarai Timur	3	300.000.000	3	300.000.000	100	3	100,00	
5	Sabu Raijua	3	300.000.000	3	300.000.000	100	3	100,00	
6	Sumba Barat	3	300.000.000	3	300.000.000	100	3	100,00	
7	Sumba Barat Daya	4	400.000.000	4	400.000.000	100	4	100,00	
8	Sumba Tengah	2	200.000.000	2	200.000.000	100	2	100,00	
9	Sumba Timur	3	300.000.000	3	300.000.000	100	2	66,67	1 lokasi tidak dilaksanakan (banjir)
10	Timur Tengah Selatan	3	300.000.000	3	300.000.000	100	3	100,00	
11	Timur Tengah Utara	3	300.000.000	3	300.000.000	100	3	100,00	
14	KALIMANTAN BARAT	15	1.500.000.000	15	1.500.000.000	100	15	100,00	
1	Bengkayang	3	300.000.000	3	300.000.000	100	3	100,00	
2	Kapuas Hulu	4	400.000.000	4	400.000.000	100	4	100,00	
3	Kubu Raya	3	300.000.000	3	300.000.000	100	3	100,00	
4	Landak	3	300.000.000	3	300.000.000	100	3	100,00	
5	Sanggau	2	200.000.000	2	200.000.000	100	2	100,00	
15	KALIMANTAN SELATAN	3	300.000.000	3	300.000.000	100	3	100,00	
1	Hulu Sungai Tengah	3	300.000.000	3	300.000.000	100	3	100,00	
16	SULAWESI UTARA	13	1.300.000.000	13	1.300.000.000	100	13	100,00	
1	Bolaang Mongondow	3	300.000.000	3	300.000.000	100	3	100,00	
2	Bolaang Mongondow Timur	3	300.000.000	3	300.000.000	100	3	100,00	
3	Minahasa Selatan	3	300.000.000	3	300.000.000	100	3	100,00	
4	Minahasa Utara	2	200.000.000	2	200.000.000	100	2	100,00	
5	Kepulauan Talaud	1	100.000.000	1	100.000.000	100	1	100,00	
6	Minahasa Tenggara	1	100.000.000	1	100.000.000	100	1	100,00	
17	SULAWESI TENGAH	6	600.000.000	6	600.000.000	100	6	100,00	
1	Poso	3	300.000.000	3	300.000.000	100	3	100,00	
2	Toli-toli	1	100.000.000	1	100.000.000	100	1	100,00	
3	Kota Palu	1	100.000.000	1	100.000.000	100	1	100,00	
4	Tojo una-una	1	100.000.000	1	100.000.000	100	1	100,00	
18	SULAWESI SELATAN	44	4.400.000.000	44	4.400.000.000	100	44	100,00	
1	Barru	3	300.000.000	3	300.000.000	100	3	100,00	
2	Bulukumba	3	300.000.000	3	300.000.000	100	3	100,00	
3	Enrekang	3	300.000.000	3	300.000.000	100	3	100,00	
4	Gowa	3	300.000.000	3	300.000.000	100	3	100,00	
5	Jeneponto	3	300.000.000	3	300.000.000	100	3	100,00	
6	Luwu Timur	2	200.000.000	2	200.000.000	100	2	100,00	
7	Maros	4	400.000.000	4	400.000.000	100	4	100,00	
8	Pangkajene Kepulauan	3	300.000.000	3	300.000.000	100	3	100,00	
9	Pinrang	4	400.000.000	4	400.000.000	100	4	100,00	
10	Sidenreng Rappang	2	200.000.000	2	200.000.000	100	2	100,00	
11	Sinjai	4	400.000.000	4	400.000.000	100	4	100,00	
12	Takalar	3	300.000.000	3	300.000.000	100	3	100,00	
13	Tana Toraja	4	400.000.000	4	400.000.000	100	4	100,00	
14	Kota Palopo	3	300.000.000	3	300.000.000	100	3	100,00	
19	SULAWESI TENGGARA	27	2.700.000.000	27	2.700.000.000	100	27	100,00	
1	Bombana	5	500.000.000	5	500.000.000	100	5	100,00	
2	Kolaka	5	500.000.000	5	500.000.000	100	5	100,00	
3	Kolaka Utara	5	500.000.000	5	500.000.000	100	5	100,00	
4	Konawe	5	500.000.000	5	500.000.000	100	5	100,00	
5	Konawe Selatan	3	300.000.000	3	300.000.000	100	3	100,00	
6	Konawe Utara	4	400.000.000	4	400.000.000	100	4	100,00	

Lampiran 9.

REALISASI PENGADAAN ALSINTAN PUSAT

TAHUN ANGGARAN 2016 DITJEN PRASARANA DAN SARANA, KEMENTERIAN PERTANIAN

Periode : S/D 31 Desember 2017

Nama Kegiatan	Pagu		Realisasi		%	
	Volume	Anggaran (Rp)	Volume	Anggaran (Rp)	Volume	Anggaran
Alsintan Pusat	251.511	2.396.308.870.000	251.501	2.348.987.837.259	99,996	98,03
1. TR2	16.405	407.664.250.000	16.405	406.820.670.500	100	99,79
2. TR4	2.873	959.582.000.000	2.873	945.524.101.300	100	98,53
3. Pompa Air	13.798	258.712.500.000	13.798	257.497.480.900	100	99,53
4. Rice Transplanter Walking	1.980	128.700.000.000	1.980	127.866.136.803	100	99,35
Rice Transplanter Riding	20	7.837.600.000	20	5.725.750.000	100	73,05
5. Seeding Tray	200.000	7.000.000.000	200.000	6.534.399.000	100	93,35
6. Cultivator	3.300	46.200.000.000	3.300	46.182.500.000	100	99,96
7. Excavator Mini	159	119.250.000.000	159	117.608.067.040	100	98,62
Excavator Standart	225	348.750.000.000	215	327.526.706.516	95,56	93,91
8. Hand Sprayer	10.637	5.850.350.000	10.637	5.729.235.000	100	97,93
9. Alat Tanam Benih Jagung	1.800	51.300.000.000	1.800	50.479.149.700	100	98,40
10. Alat Tanam Benih jagung	100	200.000.000	100	169.962.500	100	84,98
11. Mist Blower	100	187.170.000	100	179.250.000	100	95,77
12. Grain Seeder	50	12.500.000.000	50	11.788.475.000	100	94,31
13. Rotatanam	35	15.750.000.000	35	12.836.253.000	100	81,50
14. Backhoe Loader	29	26.825.000.000	29	26.519.700.000	100	98,86

Lampiran 10.

**REALISASI PENGADAAN ALSINTAN TP PROVINSI
TAHUN ANGGARAN 2017 DITJEN PRASARANA DAN SARANA**

Periode : S/D 31 Desember 2016

Nama Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Volume (Unit)	Realisasi (Unit)	% Pagu	% Volume
Alsintan TP Provinsi	486.857.430.200	440.888.331.473	32.978	32.540	90,56	98,67
1. Traktor Roda 2	262.462.559.000	246.035.518.000	9.630	9.630	93,74	100,00
2. Pompa Air	126.333.092.000	106.005.512.272	5.769	5.769	83,91	100,00
3. Rice Transplanter	74.174.541.200	68.234.735.011	1.043	1.043	91,99	100,00
4. Cultivator	8.340.475.000	7.623.740.900	519	505	91,41	97,30
5. Hand Sprayer	8.494.263.000	6.823.000.500	13.471	13.330	80,32	98,95
6. Alat Tanam Benih Jagung Dorong	4.927.500.000	4.059.274.790	2.541	2.258	82,38	88,86
7. Traktor Roda 4	2.125.000.000	2.106.550.000	5	5	99,13	100,00

Lampiran 10. (lanjutan)

NO	PROVINS	JENIS AL SINTAN	PAGU		KONTRAK			REALISASI KEUANGAN	
			UNIT	R.P.	UNIT	R.P.	%	R.P.	%
1	Aceh		1.337	29.384.441.000	1.337	25.201.773.200	85,77	25.201.773.200	85,77
		1 Traktor Roda 2	478	19.076.925.000	478	15.735.450.000	82,48	15.735.450.000	82,48
		2 Pompa Air	268	6.472.200.000	268	5.727.650.000	88,50	5.727.650.000	88,50
		3 Rice Transplanter	43	3.070.200.000	43	3.058.371.000	99,61	3.058.371.000	99,61
		4 Cultivator	22	341.000.000	22	340.374.200	99,82	340.374.200	99,82
		5 Hand Sprayer	446	288.116.000	446	204.328.000	70,92	204.328.000	70,92
		6 Alat Tanam Jagung Semi Manual	80	136.000.000	80	135.600.000	99,71	135.600.000	99,71
2	Bali		419	7.112.022.000	419	5.079.509.120	71,42	5.007.395.120	70,41
		1 Traktor Roda 2	162	3.912.300.000	162	3.090.529.000	79,00	3.090.529.000	79,00
		2 Pompa Air	80	1.839.600.000	80	701.566.720	38,14	701.566.720	38,14
		3 Rice Transplanter	15	1.039.500.000	15	1.002.300.000	96,42	1.002.300.000	96,42
		4 Cultivator	13	193.700.000	13	162.299.400	83,79	162.299.400	83,79
		5 Hand Sprayer	119	75.922.000	119	72.114.000	94,98	-	-
		6 Alat Tanam Jagung Semi Manual	30	51.000.000	30	50.700.000	99,41	50.700.000	99,41
3	Bangka Belitung		222	3.442.625.000	207	3.188.598.000	92,62	3.188.598.000	92,62
		1 Traktor Roda 2	65	1.876.875.000	65	1.794.285.000	95,60	1.794.285.000	95,60
		2 Pompa Air	36	929.880.000	36	811.563.000	87,28	811.563.000	87,28
		3 Rice Transplanter	6	456.000.000	6	414.450.000	90,89	414.450.000	90,89
		4 Cultivator	-	-	-	-	-	-	-
		5 Hand Sprayer	15	9.870.000	-	-	-	-	-
		6 Alat Tanam Jagung Semi Manual	100	170.000.000	100	168.300.000	99,00	168.300.000	99,00
4	Banten		796	10.424.541.000	796	9.705.910.000	93,11	9.705.910.000	93,11
		1 Traktor Roda 2	237	5.847.975.000	237	5.555.630.000	95,00	5.555.630.000	95,00
		2 Pompa Air	126	2.857.680.000	126	2.507.400.000	87,74	2.507.400.000	87,74
		3 Rice Transplanter	20	1.360.000.000	20	1.356.790.000	99,76	1.356.790.000	99,76
		4 Cultivator	6	86.100.000	6	82.500.000	95,82	82.500.000	95,82
		5 Hand Sprayer	367	204.786.000	367	135.790.000	66,31	135.790.000	66,31
		6 Alat Tanam Jagung Semi Manual	40	68.000.000	40	67.800.000	99,71	67.800.000	99,71
5	Bengkulu		30	51.000.000	-	-	-	-	-
		1 Alat Tanam Jagung Semi Manual	30	51.000.000	-	-	-	-	-
6	DIY		100	170.000.000	100	168.000.000	98,82	168.000.000	98,82
		1 Alat Tanam Jagung Semi Manual	100	170.000.000	100	168.000.000	98,82	168.000.000	98,82
7	Kalimantan Barat		100	170.000.000	100	165.000.000	97,06	165.000.000	97,06
		1 Alat Tanam Jagung Semi Manual	100	170.000.000	100	165.000.000	97,06	165.000.000	97,06
8	Kalimantan Timur		25	42.500.000	-	-	-	-	-
		1 Alat Tanam Jagung Semi Manual	25	42.500.000	-	-	-	-	-
9	Kalimantan Utara		100	170.000.000	100	170.000.000	100,00	170.000.000	100,00
		1 Alat Tanam Jagung Semi Manual	100	170.000.000	100	170.000.000	100,00	170.000.000	100,00
10	Kepulauan Riau		20	34.000.000	-	-	-	-	-
		1 Alat Tanam Jagung Semi Manual	20	34.000.000	-	-	-	-	-
11	Gorontalo		452	9.066.871.000	452	9.031.911.000	99,61	9.031.911.000	99,61
		1 Traktor Roda 2	127	5.156.200.000	127	5.155.109.000	99,98	5.155.109.000	99,98
		2 Pompa Air	121	3.112.725.000	121	3.112.434.000	99,99	3.112.434.000	99,99
		3 Rice Transplanter	6	442.800.000	6	413.894.000	93,47	413.894.000	93,47
		4 Cultivator	6	102.000.000	6	99.200.000	97,25	99.200.000	97,25
		5 Hand Sprayer	87	74.646.000	87	74.559.000	99,88	74.559.000	99,88
		6 Alat Tanam Jagung Semi Manual	105	178.500.000	105	176.715.000	99,00	176.715.000	99,00

NO	PROVINSI	JENIS ALAT	PAGU		KONTRAK			REALISASI KEUANGAN	
			UNIT	R.P.	UNIT	R.P.	%	R.P.	%
12	Jambi		502	10.466.970.000	398	9.731.413.500	93,06	9.731.413.500	93,06
		1 Traktor Roda 2	245	6.571.950.000	245	6.522.910.000	99,25	6.522.910.000	99,25
		2 Pompa Air	110	2.633.400.000	110	2.331.000.000	88,52	2.331.000.000	88,52
		3 Rice Transplanter	13	928.200.000	13	826.700.000	89,06	826.700.000	89,06
		4 Cultivator	14	217.700.000	-	-	-	-	-
		5 Hand Sprayer	90	54.720.000	-	-	-	-	-
		6 Alat Tanam Jagung Semi Manual	30	51.000.000	30	50.803.500	99,61	50.803.500	99,61
13	Jawa Barat		3.392	40.102.907.000	3.287	32.813.153.630	81,82	32.813.153.630	81,82
		1 Traktor Roda 2	869	20.986.350.000	869	19.121.330.000	91,11	19.121.330.000	91,11
		2 Pompa Air	593	13.324.710.000	593	8.799.595.830	66,04	8.799.595.830	66,04
		3 Rice Transplanter	63	4.290.300.000	63	3.923.850.000	91,46	3.923.850.000	91,46
		4 Cultivator	23	326.600.000	23	302.256.800	92,55	302.256.800	92,55
		5 Hand Sprayer	1.739	996.447.000	1.739	666.121.000	66,85	666.121.000	66,85
		6 Alat Tanam Jagung Semi Manual	105	178.500.000	-	-	-	-	-
14	Jawa Tengah		4.322	54.344.050.000	4.322	52.001.408.000	95,69	52.001.408.000	95,69
		1 Traktor Roda 2	1.342	32.220.250.000	1.342	30.803.499.000	95,60	30.803.499.000	95,60
		2 Pompa Air	876	11.584.150.000	876	10.886.968.000	93,98	10.886.968.000	93,98
		3 Rice Transplanter	135	8.861.400.000	135	8.785.953.000	99,15	8.785.953.000	99,15
		4 Cultivator	48	688.800.000	48	614.425.000	89,20	614.425.000	89,20
		5 Hand Sprayer	1.821	819.450.000	1.821	745.563.000	90,98	745.563.000	90,98
		6 Alat Tanam Jagung Semi Manual	100	170.000.000	100	165.000.000	97,06	165.000.000	97,06
15	Jawa Timur		6.032	65.212.450.000	6.026	52.829.693.180	81,01	52.829.693.180	81,01
		1 Traktor Roda 2	971	24.814.200.000	971	22.901.024.000	92,29	22.901.024.000	92,29
		2 Pompa Air	861	19.165.860.000	861	12.898.439.700	67,30	12.898.439.700	67,30
		3 Rice Transplanter	242	16.670.200.000	242	13.011.472.340	78,05	13.011.472.340	78,05
		4 Cultivator	121	1.676.350.000	121	1.648.933.200	98,36	1.648.933.200	98,36
		5 Hand Sprayer	3.577	2.164.840.000	3.576	1.884.508.400	87,05	1.884.508.400	87,05
		6 Alat Tanam Jagung Semi Manual	260	721.000.000	255	485.315.540	67,31	485.315.540	67,31
16	Kalimantan Tengah		757	15.110.486.000	757	13.918.862.000	92,11	13.918.862.000	92,11
		1 Traktor Roda 2	312	8.732.220.000	312	8.157.044.000	93,41	8.157.044.000	93,41
		2 Pompa Air	149	3.848.670.000	149	3.410.017.000	88,60	3.410.017.000	88,60
		3 Rice Transplanter	29	2.148.900.000	29	1.992.977.000	92,74	1.992.977.000	92,74
		4 Cultivator	10	163.500.000	10	145.858.000	89,21	145.858.000	89,21
		5 Hand Sprayer	232	174.696.000	232	171.216.000	98,01	171.216.000	98,01
		6 Alat Tanam Jagung Semi Manual	25	42.500.000	25	41.750.000	98,24	41.750.000	98,24
17	Lampung		1.583	21.732.421.200	1.583	21.547.903.950	99,15	21.547.903.950	99,15
		1 Traktor Roda 2	387	10.214.790.000	387	10.060.539.000	98,49	10.060.539.000	98,49
		2 Pompa Air	319	7.018.000.000	319	6.996.224.000	99,69	6.996.224.000	99,69
		3 Rice Transplanter	52	3.630.059.200	52	3.630.059.200	100,00	3.630.059.200	100,00
		4 Cultivator	16	238.400.000	16	233.565.000	97,97	233.565.000	97,97
		5 Hand Sprayer	704	452.672.000	704	450.282.000	99,47	450.282.000	99,47
		6 Alat Tanam Jagung Semi Manual	105	178.500.000	105	177.234.750	99,29	177.234.750	99,29
18	Maluku		341	9.909.782.000	322	8.729.708.000	88,09	8.729.708.000	88,09
		1 Traktor Roda 2	150	5.551.500.000	150	4.894.900.000	88,17	4.894.900.000	88,17
		2 Pompa Air	71	2.265.900.000	71	1.902.300.000	83,95	1.902.300.000	83,95
		3 Rice Transplanter	20	1.726.000.000	20	1.601.308.000	92,78	1.601.308.000	92,78
		4 Cultivator	11	228.800.000	11	217.100.000	94,89	217.100.000	94,89
		5 Hand Sprayer	19	18.582.000	-	-	-	-	-
		6 Alat Tanam Jagung Semi Manual	70	119.000.000	70	114.100.000	95,88	114.100.000	95,88

NO	PROVINSI	JENIS ALAT SINTAN	PAGU		KONTRAK			REALISASI KEUANGAN	
			UNIT	R.P.	UNIT	R.P.	%	R.P.	%
19	Maluku Utara		274	7.238.758.000	258	6.938.545.000	95,85	6.938.545.000	95,85
		1 Traktor Roda 2	130	4.772.500.000	130	4.730.200.000	99,11	4.730.200.000	99,11
		2 Pompa Air	59	1.870.890.000	59	1.709.905.000	91,40	1.709.905.000	91,40
		3 Rice Transplanter	4	368.400.000	4	318.700.000	86,51	318.700.000	86,51
		4 Cultivator	5	109.000.000	5	99.000.000	90,83	99.000.000	90,83
		5 Hand Sprayer	16	15.968.000	-	-	-	-	-
		6 Alat Tanam Jangung Semi Manual	60	102.000.000	60	80.740.000	79,16	80.740.000	79,16
20	Nusa Tenggara Barat		1.104	16.176.473.000	1.104	14.906.832.222	92,15	14.906.832.222	92,15
		1 Traktor Roda 2	304	7.970.400.000	304	7.618.838.000	95,59	7.618.838.000	95,59
		2 Pompa Air	219	5.256.000.000	219	4.526.611.500	86,12	4.526.611.500	86,12
		3 Rice Transplanter	35	2.439.500.000	35	2.309.787.722	94,68	2.309.787.722	94,68
		4 Cultivator	-	-	-	-	-	-	-
		5 Hand Sprayer	441	332.073.000	441	273.935.000	82,49	273.935.000	82,49
		6 Alat Tanam Jangung Semi Manual	105	178.500.000	105	177.660.000	99,53	177.660.000	99,53
21	Nusa Tenggara Timur		105	178.500.000	105	178.447.000	99,97	178.447.000	99,97
		1 Alat Tanam Jangung Semi Manual	105	178.500.000	105	178.447.000	99,97	178.447.000	99,97
22	Papua		277	9.542.570.000	277	8.658.161.601	90,73	8.658.161.601	90,73
		1 Traktor Roda 2	126	4.890.900.000	126	4.469.610.000	91,39	4.469.610.000	91,39
		2 Pompa Air	78	2.891.070.000	78	2.430.205.000	84,06	2.430.205.000	84,06
		3 Rice Transplanter	17	1.553.800.000	17	1.553.346.601	99,97	1.553.346.601	99,97
		4 Cultivator	6	132.600.000	6	132.000.000	99,55	132.000.000	99,55
		5 Hand Sprayer	25	31.700.000	25	31.000.000	97,79	31.000.000	97,79
		6 Alat Tanam Jangung Semi Manual	25	42.500.000	25	42.000.000	98,82	42.000.000	98,82
23	Papua Barat		287	6.156.017.000	264	6.100.304.800	99,09	6.070.304.800	98,61
		1 Traktor Roda 2	79	2.455.978.000	79	2.455.946.000	100,00	2.455.946.000	100,00
		2 Pompa Air	23	684.447.000	23	684.450.000	100,00	684.450.000	100,00
		3 Rice Transplanter	17	1.414.366.000	17	1.363.365.000	96,39	1.363.365.000	96,39
		4 Cultivator	58	1.247.226.000	58	1.242.543.800	99,62	1.212.543.800	97,22
		5 Hand Sprayer	62	186.000.000	62	186.000.000	100,00	186.000.000	100,00
		6 Alat Tanam Jangung Semi Manual	48	168.000.000	25	168.000.000	100,00	168.000.000	100,00
24	Riau		40	68.000.000	40	67.320.000	99,00	67.320.000	99,00
		1 Alat Tanam Jangung Semi Manual	40	68.000.000	40	67.320.000	99,00	67.320.000	99,00
25	Sulawesi Barat		329	5.105.160.000	254	4.384.539.296	85,88	4.384.539.296	85,88
		1 Traktor Roda 2	104	2.675.400.000	104	2.316.364.000	86,58	2.316.364.000	86,58
		2 Pompa Air	54	1.338.120.000	54	1.192.734.500	89,14	1.192.734.500	89,14
		3 Rice Transplanter	11	817.300.000	11	746.881.696	91,38	746.881.696	91,38
		4 Cultivator	5	83.000.000	5	65.748.000	79,21	65.748.000	79,21
		5 Hand Sprayer	80	63.840.000	80	62.811.100	98,39	62.811.100	98,39
		6 Alat Tanam Jangung Semi Manual	75	127.500.000	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Selatan		3.231	53.716.003.000	3.231	50.070.156.940	93,21	50.070.156.940	93,21
		1 Traktor Roda 2	1.209	32.385.675.000	1.209	30.740.311.000	94,92	30.740.311.000	94,92
		2 Pompa Air	552	13.388.780.000	552	12.197.214.940	91,10	12.197.214.940	91,10
		3 Rice Transplanter	82	5.904.000.000	82	5.388.886.000	91,28	5.388.886.000	91,28
		4 Cultivator	52	839.800.000	52	780.392.000	92,93	780.392.000	92,93
		5 Hand Sprayer	1.231	1.019.268.000	1.231	785.378.000	77,05	785.378.000	77,05
		6 Alat Tanam Jangung Semi Manual	105	178.500.000	105	177.975.000	99,71	177.975.000	99,71
27	Sulawesi Tengah		655	12.235.770.000	655	11.250.507.620	91,95	11.250.507.620	91,95
		1 Traktor Roda 2	213	6.376.125.000	213	5.892.640.000	92,42	5.892.640.000	92,42
		2 Pompa Air	109	3.010.035.000	109	2.700.541.500	89,72	2.700.541.500	89,72
		3 Rice Transplanter	30	2.373.000.000	30	2.255.530.120	95,05	2.255.530.120	95,05
		4 Cultivator	8	143.200.000	8	105.756.000	73,85	105.756.000	73,85
		5 Hand Sprayer	195	163.410.000	195	126.750.000	77,57	126.750.000	77,57
		6 Alat Tanam Jangung Semi Manual	100	170.000.000	100	169.290.000	99,58	169.290.000	99,58

NO	PROVINS	JENIS ALAT	PAGU		KONTRAK			REALISASI KEUANGAN	
			UNIT	RP.	UNIT	RP.	%	RP.	%
28	Sulawesi Tenggara		643	15.188.005.000	643	14.012.925.000	92,26	13.946.925.000	91,83
	1	Traktor Roda 2	317	9.137.625.000	317	8.638.260.000	94,54	8.638.260.000	94,54
	2	Pompa Air	114	2.968.560.000	114	2.582.667.500	87,00	2.582.667.500	87,00
	3	Rice Transplanter	34	2.509.200.000	34	2.317.017.500	92,34	2.317.017.500	92,34
	4	Cultivator	23	407.100.000	23	335.380.000	82,38	335.380.000	82,38
	5	Hand Sprayer	115	97.520.000	115	73.600.000	75,47	73.600.000	75,47
	6	Alat Tanam Jagung Semi Manual	40	68.000.000	40	66.000.000	97,06	-	-
29	Sulawesi Utara		620	12.808.601.000	620	11.962.787.000	93,40	11.962.787.000	93,40
	1	Traktor Roda 2	243	7.173.600.000	243	7.067.655.000	98,52	7.067.655.000	98,52
	2	Pompa Air	123	3.396.645.000	123	2.902.800.000	85,46	2.902.800.000	85,46
	3	Rice Transplanter	22	1.705.000.000	22	1.533.400.000	89,94	1.533.400.000	89,94
	4	Cultivator	15	261.000.000	15	219.211.000	83,99	219.211.000	83,99
	5	Hand Sprayer	112	93.856.000	112	72.576.000	77,33	72.576.000	77,33
	6	Alat Tanam Jagung Semi Manual	105	178.500.000	105	167.145.000	93,64	167.145.000	93,64
30	Sumatera Barat		1.215	14.409.898.000	1.215	13.741.015.587	95,36	11.634.465.587	80,74
	1	Traktor Roda 2	350	7.087.846.000	350	6.518.995.000	91,97	6.518.995.000	91,97
	2	Pompa Air	205	2.473.130.000	205	2.413.476.832	97,59	2.413.476.832	97,59
	3	Rice Transplanter	28	1.897.716.000	28	1.897.356.755	99,98	1.897.356.755	99,98
	4	Cultivator	13	178.799.000	13	178.278.000	99,71	178.278.000	99,71
	5	Hand Sprayer	511	229.907.000	511	229.875.000	99,99	229.875.000	99,99
	6	Alat Tanam Jagung Semi Manual	103	417.500.000	103	396.484.000	94,97	396.484.000	94,97
	7	Traktor Roda 4	5	2.125.000.000	5	2.106.550.000	99,13	2.106.550.000	99,13
31	Sumatera Selatan		1.758	23.566.353.000	1.758	22.316.900.000	94,70	22.316.900.000	94,70
	1	Traktor Roda 2	503	13.291.775.000	503	12.963.920.000	97,53	12.963.920.000	97,53
	2	Pompa Air	266	5.934.460.000	266	5.466.300.000	92,11	5.466.300.000	92,11
	3	Rice Transplanter	49	3.493.700.000	49	3.218.075.000	92,11	3.218.075.000	92,11
	4	Cultivator	9	136.800.000	9	120.337.000	87,97	120.337.000	87,97
	5	Hand Sprayer	826	531.118.000	826	374.178.000	70,45	374.178.000	70,45
	6	Alat Tanam Jagung Semi Manual	105	178.500.000	105	174.090.000	97,53	174.090.000	97,53
32	Sumatera Utara		1.910	33.530.256.000	1.910	31.669.039.750	94,45	31.669.039.750	94,45
	1	Traktor Roda 2	707	19.283.200.000	707	18.830.530.000	97,65	18.830.530.000	97,65
	2	Pompa Air	357	8.068.200.000	357	7.113.447.250	88,17	7.113.447.250	88,17
	3	Rice Transplanter	70	5.075.000.000	70	4.798.144.000	94,54	4.798.144.000	94,54
	4	Cultivator	35	539.000.000	35	528.583.500	98,07	528.583.500	98,07
	5	Hand Sprayer	641	394.856.000	641	274.530.000	69,53	274.530.000	69,53
	6	Alat Tanam Jagung Semi Manual	100	170.000.000	100	123.805.000	72,83	123.805.000	72,83
		TOTAL NASIONAL	32.978	486.857.430.200	32.540	440.540.325.396	90,49	440.372.211.396	90,45
	1	Traktor Roda 2	9.630	262.462.559.000	9.630	246.035.518.000	93,74	246.035.518.000	93,74
	2	Pompa Air	5.769	126.333.092.000	5.769	106.005.512.272	83,91	106.005.512.272	83,91
	3	Rice Transplanter	1.043	74.174.541.200	1.043	67.718.614.934	91,30	67.718.614.934	2.248
	4	Cultivator	519	8.340.475.000	505	7.653.740.900	91,77	7.623.740.900	91,41
	5	Hand Sprayer	13.471	8.494.263.000	13.330	6.895.114.500	81,17	6.823.000.500	80,32
	6	Alat Tanam Jagung Semi Manual	2.541	4.927.500.000	2.258	4.125.274.790	83,72	4.059.274.790	82,38
	7	Traktor Roda 4	5	2.125.000.000	5	2.106.550.000	99,13	2.106.550.000	99,13

Lampiran 11.

No	Propinsi	Jumlah Kabupaten	Alokasi (Unit)				Luas Layanan (Ha)	Rerata Peningkatan IP
			Dam Parit	Embung	Long Storage	Jumlah		
1	Jawa Barat	11	50	23	8	81	3.240	1.0
2	Jawa Tengah	3	-	9	-	9	360	0.5
3	Jawa Timur	4	24	-	2	26	960	1.0
4	Sumatera Selatan	2	1	3	1	5	200	0.5
5	Bengkulu	1	-	7	-	7	280	0.5
6	Aceh	1	12	3	-	15	600	0.5
7	Riau	1	-	10	-	10	400	0.5
8	NTB	7	17	25	-	42	1.680	0.5
9	Sumatera Utara	1	4	1	1	6	240	0.5
10	Sulawesi Selatan	15	18	70	4	92	3.680	1.0
11	Sulawesi Utara	1	3	1	-	4	160	0.5
12	Sulawesi Barat	4	4	35	-	39	1.560	0.5
13	Sulawesi Tengah	1	1	-	-	1	40	0.5
14	Kalimantan Tengah	1	-	-	2	2	80	0.5
		58	134	178	29	341	13.470	0,64

Lampiran 12.

DAFTAR RINGKASAN KONTRAK BANPEM BERUPA UANG UNTUK DISERAHKAN KE MASYARAKAT TAHUN 2017

Kegiatan

: Bantuan Sosial Kegiatan Pilot Project Optimalisasi Lahan Responsive Gender TA 2017

No	Uraian Pekerjaan	Pelaksana Pekerjaan	Kontrak/SPK		SP2D		Tanggal penyelesaian pekerjaan (BAST)
			No. & Tanggal	Nilai (Rp)	No. & Tanggal	Nilai (Rp)	
1	Bantuan Sosial Kegiatan Pilot Project Optimalisasi Lahan Responsive Gender Kab Karo	Kelompok Tani : Bio Apanja Ketua : Herbinson Manihuruk Desa : Nagalingga Kec : Merek Kab : Karo Jumlah Anggota : 17 Orang Usaha Bersama : Pembuatan Pupuk Organik	08.01/PPK/PSP.1/KONTRAK/09/2017	75.000.000	171391301036592 22/9/2017	75.000.000	28/12/2017
		Kelompok Tani : Juma Tonggal Ketua : Kwintal Perangin angin (082160553430) Desa : Lau Riman Kec : Tiga Panah Kab : Karo Jumlah Anggota : 25 Orang Usaha Bersama : Peternakan Sapi	08.02/PPK/PSP.1/KONTRAK/09/2017	75.000.000	171391301036592 22/9/2017	75.000.000	28/12/2017
2	Bantuan Sosial Kegiatan Pilot Project Optimalisasi Lahan Responsive Gender Kab Bandung	Kelompok Tani : Cibolang Mekar Ketua : Iiliri Desa : Lamajang Kec : Pangalengan Kab : Bandung Jumlah Anggota : 46 Orang Usaha Bersama : Koperasi	08.15/PPK/PSP.1/KONTRAK/09/2017	75.000.000	171391303026456 25/9/2017	75.000.000	13/11/2017
		Kelompok Tani : Cihideung Bangkit Ketua : Dede Wakirman Desa : Tribaktimulya Kec : Pangalengan Kab : Bandung Jumlah Anggota : 25 Orang Usaha Bersama : Peternakan Kelinci	08.16/PPK/PSP.1/KONTRAK/09/2017	75.000.000	171391303026456 25/9/2017	75.000.000	13/11/2017

No	Uraian Pekerjaan	Pelaksana Pekerjaan	Kontrak/SPK		SP2D		Tanggal penyelesaian pekerjaan (BAST)
			No. & Tanggal	Nilai (Rp)	No. & Tanggal	Nilai (Rp)	
3	Bantuan Sosial Kegiatan Pilot Project Optimalisasi Lahan Responsive Gender Kab Purbalingga	Kelompok Tani : Lembah Asri Ketua : Tahirin Desa : Serang Kec : Karangreja Kab : Purbalingga Jumlah Anggota : 22 Orang Usaha Bersama : Hortikultura	08.23/PPK/PSP.1/KONTRAK/09/2017	50.000.000	171391301041644 18/10/2017	50.000.000	
		Kelompok Tani : Sipetung Jaya Ketua : Didin Desa : Siwarak Kec : Karangreja Kab : Purbalingga Jumlah Anggota : 35 Orang Usaha Bersama : Hortikultura	08.24/PPK/PSP.1/KONTRAK/09/2017	50.000.000	171391301041644 18/10/2017	50.000.000	
		Kelompok Tani : Sri Rejeki Ketua : Mushadi Desa : Timbang Kec : Kejobong Kab : Purbalingga Jumlah Anggota : 23 Orang Usaha Bersama : Ternak	08.25/PPK/PSP.1/KONTRAK/09/2017	75.000.000	171391301041644 18/10/2017	75.000.000	
		Kelompok Tani : Sido Muncul Ketua : Sentot Budi Santoso Desa : Bukateja Kec : Bukateja Kab : Purbalingga Jumlah Anggota : 22 Orang Usaha Bersama : Penangkar Benih	08.26/PPK/PSP.1/KONTRAK/09/2017	75.000.000	171391301041644 18/10/2017	75.000.000	

No	Uraian Pekerjaan	Pelaksana Pekerjaan	Kontrak/SPK		SP2D		Tanggal penyelesaian pekerjaan (BAST)
			No. & Tanggal	Nilai (Rp)	No. & Tanggal	Nilai (Rp)	
4	Bantuan Sosial Kegiatan Pilot Project Optimalisasi Lahan Responsive Gender Kab Bukit Tinggi	Kelompok Tani : Jam Gadang Ketua : Zakwan Kel : Puhun Pintu Kabun Kec : Mandiingin Koto Selayan Kota : Bukittinggi Jumlah Anggota : 10 orang Usaha Bersama : Peternakan Kambing Ettawa	08.03/PPK/PSP.1/KONTRAK/09/2017	75.000.000	171391301041633 18/10/2017	75.000.000	
		Kelompok Tani : Baruah Saiyo Ketua : Reni Silvia Kel : Pulau anak air Kec : Mandiingin Koto Senayan Kota : Bukittinggi Jumlah Anggota : 30 Orang Usaha Bersama : Tanaman Pangan	08.04/PPK/PSP.1/KONTRAK/09/2017	75.000.000	171391301039344 6/10/2017	75.000.000	
5	Bantuan Sosial Kegiatan Pilot Project Optimalisasi Lahan Responsive Gender Kab Klaten	Kelompok Tani : Mantap Jaya Ketua : Mantep Prasojo Desa : Plawikan Kec : Jogo Nalan Kota : Klaten Jumlah Anggota : 14 Orang Usaha Bersama : Ternak Itik	08.17/PPK/PSP.1/KONTRAK/09/2017	50.000.000	171391301039151 5/10/2017	50.000.000	
		Perkumpulan Ternak Erwe Mandiri Sejahtera Ketua : Sihono Desa : Mutihan Kec : Gantiwarno Kota : Klaten Jumlah Anggota : 20 Orang Usaha Bersama : Ternak Itik	08.18/PPK/PSP.1/KONTRAK/09/2017	50.000.000	171391301039151 5/10/2017	50.000.000	

No	Uraian Pekerjaan	Pelaksana Pekerjaan	Kontrak/SPK		SP2D		Tanggal penyelesaian pekerjaan (BAST)
			No. & Tanggal	Nilai (Rp)	No. & Tanggal	Nilai (Rp)	
6	Bantuan Sosial Kegiatan Pilot Project Optimalisasi Lahan Responsive Gender Kab Wonosobo	Kelompok Tani : Wulan Tani (KWT) Ketua : Siti Mungawanah Desa : Gondo Wulan Kec : Kempil Kab : Wonosobo Jumlah Anggota : 23 Orang Usaha Bersama : -	08.13/PPK/PSP.1/KONTRAK/09/2017	75.000.000	171391301037915 2/10/2017	75.000.000	
		Kelompok Tani : Tri Rahayu (KWT) Ketua : Soimah Desa : Karang Sambung Kec : Kalibawang Kab : Wonosobo Jumlah Anggota : 20 Orang Usaha Bersama : -	08.14/PPK/PSP.1/KONTRAK/09/2017	75.000.000	171391301037915 2/10/2017	75.000.000	
7	Bantuan Sosial Kegiatan Pilot Project Optimalisasi Lahan Responsive Gender Kab Banyumas	Kelompok Tani : Gading Permai (KWT) Ketua : Atinah Desa : Klapa gading kolon Kec : Wangon Kab : Banyumas, Jawa Tengah Jumlah Anggota : 60 Orang Usaha Bersama : -	08.05/PPK/PSP.1/KONTRAK/09/2017	50.000.000	171391304001360 26/9/2017	50.000.000	
		Kelompok Tani : Tirta Sejati Ketua : Sumarjo Desa : Bantar Kec : Jati Lawang Kab : Banyumas, Jawa Tengah Jumlah Anggota : 20 Orang Usaha Bersama : -	08.06/PPK/PSP.1/KONTRAK/09/2017	50.000.000	171391304001360 26/9/2017	50.000.000	

No	Uraian Pekerjaan	Pelaksana Pekerjaan	Kontrak/SPK		SP2D		Tanggal penyelesaian pekerjaan (BAST)
			No. & Tanggal	Nilai (Rp)	No. & Tanggal	Nilai (Rp)	
7	Bantuan Sosial Kegiatan Pilot Project Optimalisasi Lahan Responsive Gender Kab Banyumas	Kelompok Tani : Takom Sejahtera Ketua : Torikum Desa : Karanggintung Kec : Sumbang Kab : Banyumas Jumlah Anggota : 21 Orang Usaha Bersama : -	08.07/PPK/PSP.1/KONTRAK/09/2017	75.000.000	171391304001360 26/9/2017	75.000.000	
		Kelompok Tani : Mendog Makmur Ketua : Arif Budiman Desa : Sido Mulya Kec : Kemranjen Kab : Banyumas Jumlah Anggota : 28 Orang Usaha Bersama : -	08.08/PPK/PSP.1/KONTRAK/09/2017	75.000.000	171391304001360 26/9/2017	75.000.000	
8	Bantuan Sosial Kegiatan Pilot Project Optimalisasi Lahan Responsive Gender Kab Malang	Kelompok Wanita Tani Melati Ketua : Siti Musmuah Desa : Pagelaran Kec : Pagelaran Kab : Malang Jumlah Anggota : 16 Orang Usaha Bersama : -	08.09/PPK/PSP.1/KONTRAK/09/2017	50.000.000	171391301037322 27/9/2017	50.000.000	
		Kelompok Wanita Tani Sido Mulyo Ketua : Masyayu Desa : Gampingan Kec : Pagak Kab : Malang Jumlah Anggota : Orang Usaha Bersama : -	08.10/PPK/PSP.1/KONTRAK/09/2017	50.000.000	171391301037322 27/9/2017	50.000.000	

No	Uraian Pekerjaan	Pelaksana Pekerjaan	Kontrak/SPK		SP2D		Tanggal penyelesaian pekerjaan (BAST)
			No. & Tanggal	Nilai (Rp)	No. & Tanggal	Nilai (Rp)	
8	Bantuan Sosial Kegiatan Pilot Project Optimalisasi Lahan Responsive Gender Kab Malang	Kelompok Tani Ngudi Makmur Ketua : Rajito Desa : Sumber Demak Kec : Wonosari Kab : Malang Jumlah Anggota : Orang Usaha Bersama : -	08.11/PPK/PSP.1/KONTRAK/09/2017	75.000.000	171391301037322 27/9/2017	75.000.000	
		Kelompok Wanita Tani Melati Ketua : Dadang Desa : Bagelan Kec : Wonosari Kab : Malang Jumlah Anggota : 41 Orang Usaha Bersama : -	08.12/PPK/PSP.1/KONTRAK/09/2017	75.000.000	171391301037322 27/9/2017	75.000.000	
9	Bantuan Sosial Kegiatan Pilot Project Optimalisasi Lahan Responsive Gender Kab Banjarnegara	Kelompok Tani : Ngudi Tani Ketua : Agus Suyono Desa : Randegan Kec : Sigaluh Kab : Banjar Negara Jumlah Anggota : 31 Orang Usaha Bersama :-	08.19/PPK/PSP.1/KONTRAK/09/2017	50.000.000	171391301041169 16/10/2017	50.000.000	
		Kelompok Tani : Anti Retak Ketua : Ponijo Desa : Lawen Kec : Pandanarun Kab : Banjar Negara Jumlah Anggota : Orang Usaha Bersama :-	08.20/PPK/PSP.1/KONTRAK/09/2017	75.000.000	171391301041169 16/10/2017	75.000.000	

No	Uraian Pekerjaan	Pelaksana Pekerjaan	Kontrak/SPK		SP2D		Tanggal penyelesaian pekerjaan (BAST)
			No. & Tanggal	Nilai (Rp)	No. & Tanggal	Nilai (Rp)	
9	Bantuan Sosial Kegiatan Pilot Project Optimalisasi Lahan Responsive Gender Kab Banjarnegara	Kelompok Tani : Balaswarung Ketua : Yudi Ismanto Desa : Gununglangit Kec : Kalibening Kab : Banjar Negara Jumlah Anggota : Orang Usaha Bersama :-	08.21/PPK/PSP.1/KONTRAK/09/2017	75.000.000	171391301041169 16/10/2017	75.000.000	
		Kelompok Tani : Sumber Rejeki Ketua : Agus Suyono Desa : Rejasari Kec : Banjarmangu Kab : Banjar Negara Jumlah Anggota : Orang Usaha Bersama :-	08.22/PPK/PSP.1/KONTRAK/09/2017	50.000.000	171391301041169 16/10/2017	50.000.000	
				1.700.000.000		1.700.000.000	